

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sub sektor perkebunan tidak dapat dipisahkan dari sejarah pertumbuhan Jawa Barat sejak masa kolonial sampai sekarang, karena sub sektor ini memiliki arti yang sangat penting dan menentukan dalam pembentukan berbagai realitas ekonomi dan sosial masyarakat Jawa Barat. Bahkan dalam konteks masa lalu, bahwa sejarah keberadaan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia serta di Jawa Barat pada khususnya, dipandang sebagai bagian dari sejarah panjang perkebunan itu sendiri. Oleh karena itu aktivitas usaha perkebunan sampai saat ini sudah menjadi bagian keseharian kehidupan masyarakat Jawa Barat, yang diperkirakan akan terus menjadi andalan perekonomian Provinsi Jawa Barat yang berbasis pertanian.

Jawa Barat yang dikaruniai dengan kesuburan lahan serta limpahan potensi sumberdaya alamnya, menyebabkan tumbuhnya berbagai macam komoditas perkebunan yang bernilai ekonomis tinggi secara melimpah, serta telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

Dari luas total Provinsi Jawa Barat sebesar 3.710.061,32 Ha, pada tahun 2012 terdapat Luas lahan Perkebunan sebesar 492.660 Ha, atau sekitar 13,28 % dari luas Provinsi Jawa Barat. Dari luas total lahan perkebunan tersebut berdasarkan status penguasaan lahannya terbagi atas Lahan Perkebunan Besar Negara seluas 66.636 Ha (13,53%), Lahan Perkebunan Besar Swasta seluas 54.472 Ha (11,06%) dan Lahan Perkebunan Rakyat seluas 371.553 Ha (75,42%).

Potensi sumber daya perkebunan Jawa Barat yang cukup melimpah tersebut, sampai sejauh ini dipandang belum secara efektif dan efisien dikembangkan, mengingat masih banyaknya kendala dalam proses pemanfaatannya. Sebagai gambaran, bahwa selama kurun waktu Tahun 2008-2012, kondisi perkembangan sumber daya perkebunan Jawa Barat mengalami perkembangan sebagai berikut:

- Luas Total lahan perkebunan selama kurun waktu lima tahun (2008-2012) mengalami penurunan luas lahan sebesar -8.355 ha atau sekitar -0,416% per tahun, yaitu dari 501.017 ha pada tahun 2008 menjadi 492.660 ha pada tahun 2012.

- Perubahan luas lahan tersebut akibat adanya penambahan luas lahan sebesar 14.059 ha, sekaligus adanya penurunan luas lahan sebesar -22.414 ha. Adapun penurunan luas lahan perkebunan tersebut diperkirakan akibat adanya alih fungsi lahan dan alih komoditas ke tanaman pangan atau hortikultura.
- Kondisi penambahan luas lahan perkebunan sebesar 14.059 ha terjadi pada beberapa wilayah yang secara historis merupakan kawasan pengembangan perkebunan dengan dukungan masyarakat yang memiliki budaya pertanian cukup kuat, yaitu di wilayah Kabupaten Purwakarta (2.686 ha), Tasikmalaya (2.585 ha), Garut (2.430 ha), Bogor (1.377 ha), Cianjur (1.262 ha), Kuningan (848 ha), Bandung Barat (810 ha), Indramayu (771 ha), Sumedang (587 ha), Kota Banjar (335 ha), Kota Tasik (193 ha) dan Majalengka (175 ha).
- Sedangkan kondisi penurunan luas lahan perkebunan sebesar -22.414 ha terjadi pada beberapa wilayah yang sedang giat-giatnya menjalankan pembangunan di luar sektor pertanian, terutama sektor perindustrian, perdagangan dan pariwisata, seperti di wilayah Kabupaten Ciamis (-10.358 ha), Sukabumi (-6.856 ha), Cirebon (-2.395 ha), Bandung (-808 ha), Subang (-724 ha), Karawang (-547 ha), Bekasi (-465 ha) dan Kota Sukabumi (-261 ha).
- Sebagai akibat dari perubahan penggunaan lahan perkebunan di berbagai wilayah kabupaten/kota se Jawa Barat, maka proporsi lahan perkebunan yang ada pada tahun 2012 adalah sebagai berikut: *Kab. Ciamis+Pangandaran (85.006 Ha), Kab. Sukabumi (68.756 Ha), Kab. Tasikmalaya (55.966 Ha), Kab. Cianjur (50.675 Ha), Kab. Garut (44.874 Ha), Kab. Bandung (31.806), Kab. Bogor (23.062 Ha), Kab. Subang (20.600 Ha), Kab. Sumedang (18.212 Ha), Kab. Kuningan (15.925 Ha), Kab. Purwakarta (14.006 Ha), Kab. Bandung Barat (13.766 Ha), Kab. Majalengka (13.502 Ha), Kab. Indramayu (12.272 Ha), Kab. Cirebon (11.976 Ha), Kab. Karawang (3.811 Ha), Kota Banjar (3.389 Ha), Kab. Bekasi (3.071 Ha), Kota Tasikmalaya (1.947 Ha) dan Kota Sukabumi (40 Ha).*
- Perkembangan permintaan pasar terhadap berbagai jenis produk perkebunan serta kondisi perkembangan harga produk, diperkirakan telah mempengaruhi pilihan minat masyarakat untuk meningkatkan atau mengurangi luas lahan budidaya beberapa komoditas perkebunan tertentu. Hal tersebut dapat dilihat pada kondisi penurunan luas lahan pada jenis komoditas selama kurun waktu 2008-2012 sebagai berikut: Teh (-5.092 ha), Jarak Pagar (-2.989 ha), Kina (-2.984 ha), Kelapa Dalam (-2.970 ha), Kakao (-1.902 ha), Tebu (-1.345 ha), Nilam (-921 ha), Panili (-

- 760 ha), Kelapa Hibrida (-675 ha), Guttapercha (-417 ha), Kapok (-340 ha), Kayu Manis (-251 ha), Lada (-224 ha), Pandan (-216 ha), Mendong (-175 ha), Cengkeh (-100 ha), Jambu Mete (-6 ha) dan Kenanga (-3 ha).
- Sedangkan komoditas yang mengalami penambahan luas lahan adalah: Kopi (4.616 ha), Karet (2.447 ha), Tembakau (2.212 ha), Pala (1.158 ha), Kemiri Sunan (995 ha), Aren (652 ha), Kelapa Sawit (601 ha), Kemiri (184 ha), Pinang (79 ha), Kumis Kucing (32 ha), Akar Wangi (24 ha) dan Sereh Wangi (16 ha).
 - Pada tahun 2012 proporsi luas lahan berdasarkan jenis komoditas perkebunan di Jawa Barat adalah sebagai berikut: *Kelapa Dalam (172.806 Ha), Teh (94.850 Ha), Karet (55.680 Ha), Cengkeh (32.778 Ha), Kopi (30.620 Ha), Tebu (22.076 Ha), Aren (14.477 Ha), Kelapa Sawit (12.482 Ha), Kakao (10.610 Ha), Tembakau (10.328 Ha), Kelapa Hibrida (9.632 Ha), Pala (5.208 Ha), Kapok (3.198 Ha), Jarak (2.691 Ha), Lada (2.546 Ha), Akar Wangi (2.330 Ha), Kemiri (1.824 Ha), Nilam (1.431 Ha), Panili (1.207 Ha), Kina (1.166 Ha), Sereh Wangi (1.102 Ha), Kemiri Sunan (995 Ha), Pinang (713 Ha), Pandan (615 Ha), Mendong (495 Ha), Guttapercha (417 Ha), Kumis Kucing (310 Ha), Jambu Mete (240 Ha), Kayu Manis (131 Ha) dan Kenanga (122 Ha).*
 - Perkembangan rata-rata peningkatan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan di Jawa Barat pada tahun 2008-2012 masih belum optimal, yaitu hanya meningkat sekitar <2 %/tahun, terutama untuk beberapa komoditas strategis yang laku dipasaran ekspor seperti Teh, Kopi, Karet, Tembakau, Cengkeh dan Kakao. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya upaya yang lebih kuat untuk mendorong pengembangan teknologi budidaya perkebunan guna meningkatkan produksi dan produktivitas, khususnya menyangkut penggunaan benih unggul bersertifikat, teknologi budidaya ramah lingkungan, penanggulangan hama-penyakit, serta teknologi panen dan pasca panen dalam rangka penurunan kehilangan hasil.
 - Dukungan fasilitasi sarana-prasarana perkebunan di Jawa Barat selama kurun waktu 2008-2012 telah cukup banyak dilakukan, baik melalui dukungan pendanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun dukungan APBN, antara lain berupa: penyediaan peralatan budidaya, peralatan panen, bangunan unit pengolahan hasil berikut mesin pengolahannya, perbaikan jalan produksi, pembangunan sumber air, peralatan pengolah lahan, bangunan pengolah pupuk organik, dlsb. Namun demikian kualitas maupun kuantitas sarana-prasarana tersebut masih perlu terus ditingkatkan.

- Perkembangan Gangguan Usaha Perkebunan selama kurun waktu tahun 2008-2012 intensitasnya masih cukup tinggi, antara lain berupa serangan wabah penyakit, hama perusak tanaman, bencana alam, kebakaran, pengrusakan dan penyerobotan lahan.
- Kondisi keberadaan Sumber Daya Manusia perkebunan selama kurun waktu 2008-2012 secara kuantitas mengalami sedikit penurunan, terutama para tenaga buruh perkebunan yang jumlahnya semakin terbatas karena kurang mengalami regenerasi. Sedangkan dari segi kompetensi dalam menangani agribisnis perkebunan nampaknya belum mengalami peningkatan berarti, hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan produktivitas maupun nilai tambah usaha perkebunan yang masih rendah. Demikian halnya dengan kondisi kelembagaan usaha perkebunan, baik di tingkat kelompok tani (poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), maupun Asosiasi, masih memerlukan peningkatan fungsi dan perannya dalam mendorong peningkatan kesejahteraan para pekebun.
- Perkembangan akses permodalan usaha perkebunan ke lembaga perbankan selama kurun waktu 2008-2012 belum banyak mengalami perkembangan sebagaimana yang diharapkan para pelaku usaha perkebunan, sehingga perlu mendapat perhatian khusus untuk terus dilakukan upaya peningkatan akses permodalan.
- Peningkatan mutu hasil produk perkebunan selama kurun waktu 2008-2012 sudah cukup banyak dilakukan melalui pendekatan berbagai pengembangan teknologi pengolahan hasil, namun demikian masih perlu terus dilakukan pengembangan teknologi pengolahan untuk meningkatkan daya saing produk perkebunan Jawa Barat dalam menghadapi persaingan global.
- Aspek distribusi, promosi dan pemasaran produk perkebunan setiap tahunnya selalu difasilitasi melalui berbagai macam kegiatan, seperti: pameran dalam dan luar negeri, misi dagang, temu usaha maupun kemitraan, namun hasilnya belum terwujud sebagaimana yang diharapkan.
- Kondisi perkembangan teknologi perkebunan di Jawa Barat selama kurun waktu 2008-2012, khususnya pada aspek teknologi budidaya, pembenihan dan pengendalian hama terpadu, secara bertahap terus dikembangkan sejalan dengan peningkatan dukungan sarana-prasarana dan ketersediaan SDM yang handal. Namun demikian perlu dilakukan akselerasi pengembangan teknologi perkebunan sesuai dengan tuntutan peningkatan produksi dan produktivitas.

Meskipun secara teknis usaha pengembangan pembangunan sub sektor perkebunan masih memiliki banyak kendala sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, namun dari aspek nilai ekonomi bahwa pelaksanaan pembangunan sub sektor perkebunan Jawa Barat selama Tahun 2008-2013 telah menunjukkan kontribusi yang cukup baik terhadap kondisi perekonomian regional, khususnya sebagai andalan sumber penghasilan masyarakat, penghasil devisa negara, penyedia bahan baku industri, penyedia lapangan kerja, serta mendukung terjaganya kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup Jawa Barat.

Indikator makro ekonomi sub sektor perkebunan Jawa Barat selama tahun 2008-2013 secara umum menunjukkan kondisi yang positif sebagaimana data berikut ini:

- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sub sektor perkebunan Jawa Barat atas dasar harga berlaku pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 4.338.444,15 juta menjadi sebesar Rp, 6.393.011,00 juta pada tahun 2012.
- Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2008 (adhb) sebesar 11,23, dan (adhk) sebesar 9,45. Sedangkan tahun 2012 menjadi (adhb) sebesar (4,33), dan (adhk) sebesar 4,65.
- Nilai Tukar Petani (NTP) rata-rata Perkebunan Tahun 2008 adalah sebesar 105,73 dan menjadi 117,33 pada tahun 2012, dimana NTP rata-rata perkebunan tersebut selalu lebih tinggi dibandingkan dengan NTP Hortikultura, NTP Tanaman Pangan, NTP Perikanan maupun NTP Peternakan. Hal itu menunjukkan bahwa sub sektor perkebunan memiliki nilai ekonomis yang lebih menguntungkan dibandingkan sub sektor pertanian lainnya.
- Jumlah Total Pekebun Jawa Barat pada tahun 2012 adalah sebesar 1.472.674 KK, sedangkan jumlah serapan Tenaga Kerjanya adalah sebanyak 507.079 Jiwa atau sebesar 12,78% dari total angkatan kerja sektor pertanian atau 2,77% dari total angkatan kerja di Jawa Barat.
- Neraca perdagangan pertanian nasional selama 2013, hingga bulan September, mengalami surplus senilai US\$13,02 miliar, dimana nilai ekspor pertanian Indonesia mencapai US\$422,20 miliar sedangkan impor senilai US\$49,17 miliar. Suprlus neraca perdagangan pertanian tersebut masih didominasi oleh subsektor perkebunan mencapai US\$419,44 miliar. Komoditas utama yang mengalami surplus terbesar yakni minyak sawit dengan nilai devisa US\$412,6 miliar, karet

sebesar US\$45,26 miliar, disusul kopi US\$4917,8 juta, kakao US\$4794,7 juta, kelapa US\$4509,1 juta dan nenas US\$4110,7 juta (Whatindonews.com, 2013).

Upaya pemanfaatan sumber daya perkebunan secara optimal dimasa datang, sekaligus mengurangi berbagai kendala pengembangannya, kiranya perlu dilakukan melalui pendekatan perencanaan yang baik dan komprehensif, serta memiliki pemahaman yang mendalam tentang permasalahan pokok perkebunan itu sendiri.

'Perkebunan' menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Terkait dengan definisi 'Perkebunan' tersebut, maka prinsip-prinsip perencanaan pembangunan perkebunan harus mencakup beberapa aspek sebagai berikut:

- Pembangunan perkebunan harus dilakukan melalui pendekatan agribisnis, yaitu suatu pendekatan usaha yang bersifat kesisteman mulai dari subsistem produksi, subsistem pengolahan, subsistem pemasaran dan subsistem jasa lainnya.
- Pembangunan perkebunan harus diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan; dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan negara, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing, memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri, serta mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan.
- Pembangunan perkebunan berdasarkan aspek ekonomi harus berfungsi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta menguatkan struktur ekonomi wilayah dan nasional;
- Pembangunan perkebunan berdasarkan aspek ekologi harus berfungsi meningkatkan konservasi tanah dan air, berdampak pada penyerapan karbon secara optimal, mampu sebagai penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung, serta secara sosial budaya harus berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Dengan mengacu kepada berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya: UU No. 18 tahun 2004 tentang perkebunan, UU No. 25 tahun 2004 tentang

sistem perencanaan pembangunan nasional, Perpres No. 5/2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014, Peraturan Menteri Pertanian No. 15/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 24 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.22 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perkebunan, maka segala upaya yang tengah dijalankan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat tersebut, untuk selanjutnya perlu dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan perkebunan.

Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2013-2018 ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018, yang disusun melalui mekanisme musyawarah, diskusi, dan pengkajian saran pendapat dari berbagai pihak pemangku kepentingan pembangunan perkebunan Jawa Barat. Disamping itu substansi yang termuat dalam Renstra ini mengakomodir berbagai kebijakan teknis operasional tentang pembangunan sub sektor perkebunan, berdasarkan dokumen perencanaan terkait baik dari pusat (Renstra KL) maupun Kabupaten/Kota. Selanjutnya Renstra ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan perkebunan tahunan Provinsi Jawa Barat selama periode 2013-2018.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, mengacu pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan perkebunan sebagai berikut:

- Perencanaan Perkebunan berdasarkan UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Pasal 6), yaitu dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman serta alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan.
- Perencanaan perkebunan terdiri dari perencanaan nasional, perencanaan provinsi, dan perencanaan kabupaten/kota, yang secara hirarkhis dilakukan oleh

pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

- Perencanaan perkebunan dilakukan berdasarkan: rencana pembangunan nasional; rencana tata ruang wilayah; kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan tanah untuk usaha perkebunan; kinerja pembangunan; perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; sosial budaya; lingkungan hidup; kepentingan masyarakat; pasar; dan aspirasi daerah, dengan tetap menjunjung tinggi keutuhan bangsa dan negara.
- Perencanaan perkebunan mencakup: wilayah; tanaman perkebunan; sumber daya manusia; kelembagaan; keterkaitan dan keterpaduan hulu-hilir; sarana dan prasarana; serta pembiayaan.
- Perencanaan perkebunan harus terukur, dapat dilaksanakan, realistis, dan bermanfaat serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, terbuka dan akuntabel.

Adapun beberapa peraturan per Undang-undangan yang menjadi landasan penyusunan Renstra tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat ;
18. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
19. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perkebunan (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 8 Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 111 Seri D);
23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 111 Tahun 2009 Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 53 Seri D);
25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan perkebunan di Provinsi Jawa Barat secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat ini adalah:

1. Menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan pembangunan perkebunan di Provinsi Jawa Barat selama periode 2013-2018.
2. Menetapkan program, indikasi kegiatan dan indikasi pembiayaan pembangunan perkebunan, serta menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat selama periode 2013-2018.
3. Menyelaraskan perencanaan pembangunan perkebunan yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan perkebunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat tahun 2013 – 2018 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja OPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra OPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD, serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II : GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD

Menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala OPD. Uraian tentang struktur organisasi OPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana OPD (proses, prosedur, mekanisme)

2.2 Sumber Daya OPD

Menjelaskan tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Menjelaskan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Menjelaskan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan renstra OPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Bab III : ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan OPD

Menjelaskan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih

Menjelaskan tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan OPD (Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi OPD), dijelaskan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut (hasil pengisian tabel faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD terhadap pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan OPD.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra k/L ataupun Renstra OPD provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari:

1. gambar pelayanan OPD;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra OPD provinsi/kabupaten/kota
4. implikasi RTRW bagi pelayanan OPD; dan
5. implikasi LKHS bagi pelayanan OPD

Selanjutnya menjelaskan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra OPD tahun rencana.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Jangka Menengah OPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan Visi dan Misi OPD, dimana Visi OPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai OPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi dan Misi OPD harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik OPD baik dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan. Sedangkan misi memperjelas jalan, atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi OPD.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD. Dimana tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu di lakukan

untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat melaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

4.3 Strategi dan Kebijakan OPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Menjelaskan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VI : INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII : PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan, kaidah pelaksanaan kegiatan serta penegasan komitmen OPD terhadap pelaksanaan renstra maupun RPJMD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERKEBUNAN

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, Kewenangan dan Struktur Organisasi OPD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2009, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi

Jawa Barat, bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Daerah bidang perkebunan, berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi:

1. **Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan perkebunan**, meliputi produksi perkebunan, pengembangan SDM kelembagaan dan permodalan, pengembangan dan pengendalian perkebunan, serta pengolahan pemasaran dan usaha perkebunan;
2. **Penyelenggaraan urusan perkebunan**, meliputi produksi perkebunan, pengembangan SDM kelembagaan dan permodalan, pengembangan dan pengendalian perkebunan, serta pengolahan pemasaran dan usaha perkebunan;
3. **Pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas perkebunan**, meliputi produksi perkebunan, pengembangan SDM kelembagaan dan permodalan, pengembangan dan pengendalian perkebunan serta pengolahan pemasaran dan usaha perkebunan.

Kewenangan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan dalam aspek Lahan Perkebunan, yaitu meliputi:
 - a. Bimbingan dan pengawasan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian perkebunan;
 - b. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan;
 - c. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan;
 - d. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah provinsi;
 - e. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah provinsi;
 - f. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah provinsi; dan
 - g. Penetapan sasaran areal tanam wilayah provinsi.
2. Kewenangan dalam aspek Pemanfaatan Air Untuk Perkebunan, yaitu meliputi:
 - a. Bimbingan pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan;

- b. Bimbingan pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan;
 - d. Bimbingan pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan;
 - e. Bimbingan pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan air bertekanan untuk perkebunan; dan
 - f. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan.
3. Kewenangan dalam aspek Pupuk, yaitu meliputi:
- a. Pemantauan dan evaluasi penggunaan pupuk;
 - b. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah provinsi;
 - c. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk; dan
 - d. Pengawasan standar mutu pupuk.
4. Kewenangan dalam aspek Pestisida, yaitu meliputi:
- a. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah provinsi;
 - b. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah provinsi;
 - c. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pestisida; dan
 - d. Pengawasan standar mutu pestisida.
5. Kewenangan dalam aspek Alat dan Mesin Perkebunan, yaitu meliputi:
- a. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah provinsi;
 - b. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah provinsi;
 - c. Penentuan kebutuhan prototipe alat dan mesin perkebunan;
 - d. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan; dan
 - e. Pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin perkebunan wilayah provinsi.
6. Kewenangan dalam aspek Benih Perkebunan, yaitu meliputi:
- a. Pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman perbenihan perkebunan;
 - b. Penyusunan kebijakan benih perkebunan antar lapang (antar kabupaten);
 - c. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal;
 - d. Pemantauan benih impor wilayah provinsi;
 - e. Pengawasan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah provinsi;
 - f. Pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah provinsi;
 - g. Pengawasan dan sertifikasi benih perkebunan; dan
 - h. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah provinsi.

7. Kewenangan dalam aspek Pembiayaan, yaitu meliputi: Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan, non perbankan dan dana yang bersumber dari masyarakat wilayah provinsi.
8. Kewenangan dalam aspek Perlindungan Perkebunan, yaitu meliputi:
 - a. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah provinsi;
 - b. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah provinsi;
 - c. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah provinsi;
 - d. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah provinsi;
 - e. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah provinsi;
 - f. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan ekspansi OPT/fenomena iklim wilayah provinsi;
 - g. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah provinsi; dan
 - h. Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah provinsi.
9. Kewenangan dalam aspek Perizinan Usaha, yaitu meliputi:
 - a. Pemberian izin usaha perkebunan lintas kabupaten/kota; dan
 - b. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan lintas kabupaten/kota.
10. Kewenangan dalam aspek Teknis Budidaya, yaitu meliputi: Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah provinsi.
11. Kewenangan dalam aspek Pembinaan Usaha, yaitu meliputi:
 - a. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah provinsi;
 - b. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah provinsi;
 - c. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah provinsi.
 - d. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah provinsi; dan
 - e. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan wilayah provinsi.

12. Kewenangan dalam aspek Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil, yaitu meliputi:
 - a. Pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah provinsi;
 - b. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah provinsi;
 - c. Bimbingan penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah provinsi;
 - d. Pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah provinsi; dan
 - e. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah provinsi.
13. Kewenangan dalam aspek Pemasaran, yaitu meliputi:
 - a. Pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil perkebunan wilayah provinsi;
 - b. Promosi komoditas perkebunan wilayah provinsi;
 - c. Penyebarluasan informasi pasar wilayah provinsi; dan
 - d. Pemantauan dan evaluasi harga komoditas perkebunan wilayah provinsi.
14. Kewenangan dalam aspek Sarana Usaha, yaitu meliputi:
 - a. Pemantauan dan evaluasi pengembangan sarana usaha wilayah provinsi; dan
 - b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah provinsi.
15. Kewenangan dalam aspek Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan, yaitu meliputi:
 - a. Penyusunan statistik perkebunan wilayah provinsi; dan
 - b. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah provinsi.

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat memiliki susunan organisasi dan struktur organisasi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2009, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

3. Bidang Produksi Perkebunan, membawahkan :
 - a. Seksi Tanaman Tahunan;
 - b. Seksi Tanaman Semusim;
 - c. Seksi Sarana Produksi.
4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan dan Permodalan, membawahkan :
 - a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan;
 - b. Seksi Kelembagaan Perkebunan;
 - c. Seksi Permodalan.
5. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perkebunan, membawahkan :
 - a. Seksi Penataan Lahan Perkebunan;
 - b. Seksi Prasarana Perkebunan;
 - c. Seksi Pengendalian Perkebunan.
6. Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Usaha Perkebunan, membawahkan :
 - a. Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan;
 - b. Seksi Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - c. Seksi Bina Usaha Perkebunan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, terdapat 3 (tiga) UPTD sebagai berikut:

1. Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan (BPBTP), terdiri atas :
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Benih;
 - d. Seksi Pemasaran Benih;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Sub Unit Pelayanan.
2. Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP), terdiri atas :
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu;

- d. Seksi Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Sub Unit Pelayanan.
3. Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan (BP2MBTP), terdiri atas :
- a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengawasan Benih;
 - d. Seksi Pengujian Mutu Benih;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Sub Unit Pelayanan.

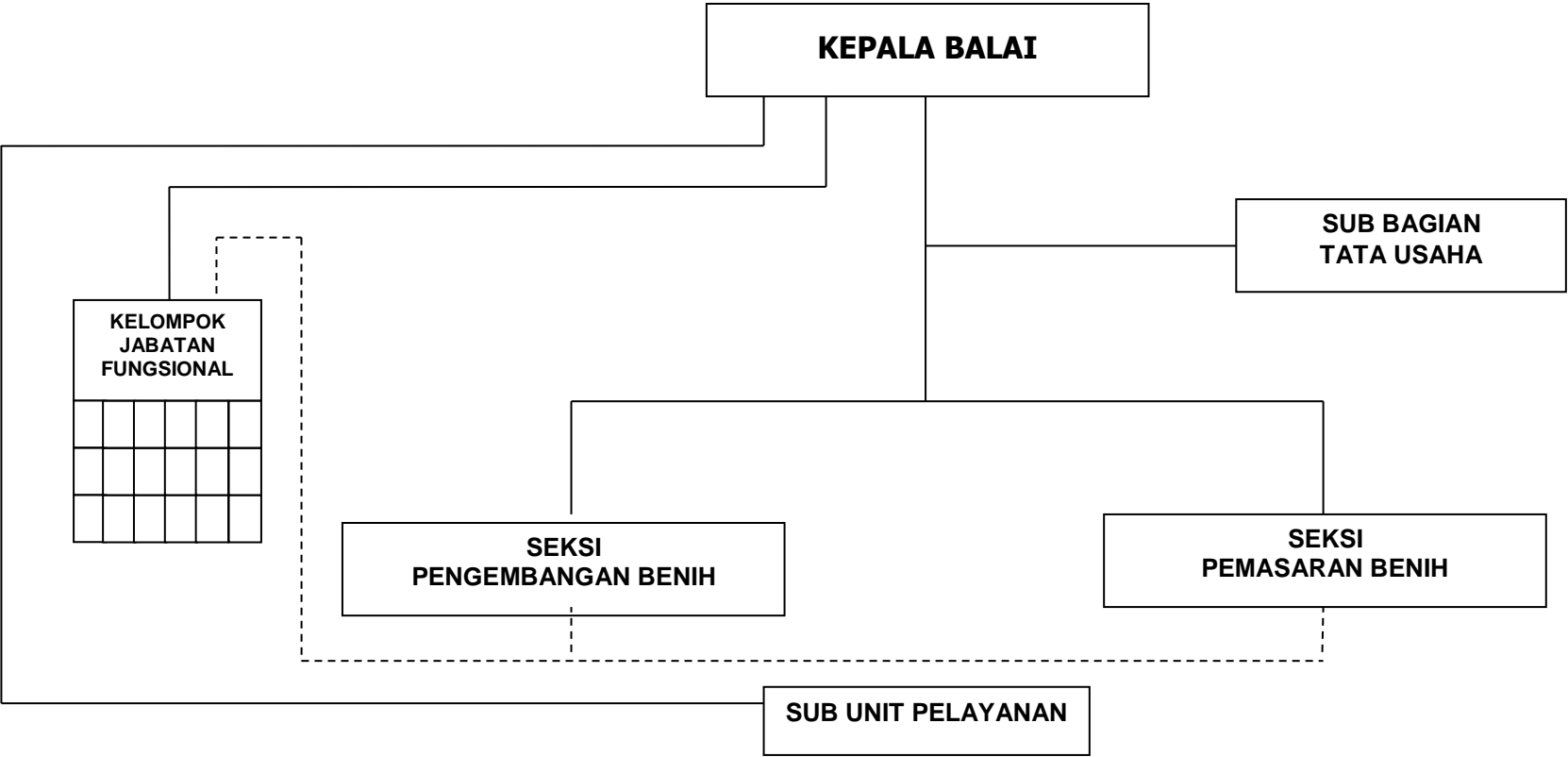
Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dan UPTD Lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, adalah sebagaimana disajikan dalam bagan berikut ini:

GAMBAR 1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI
JAWA BARAT



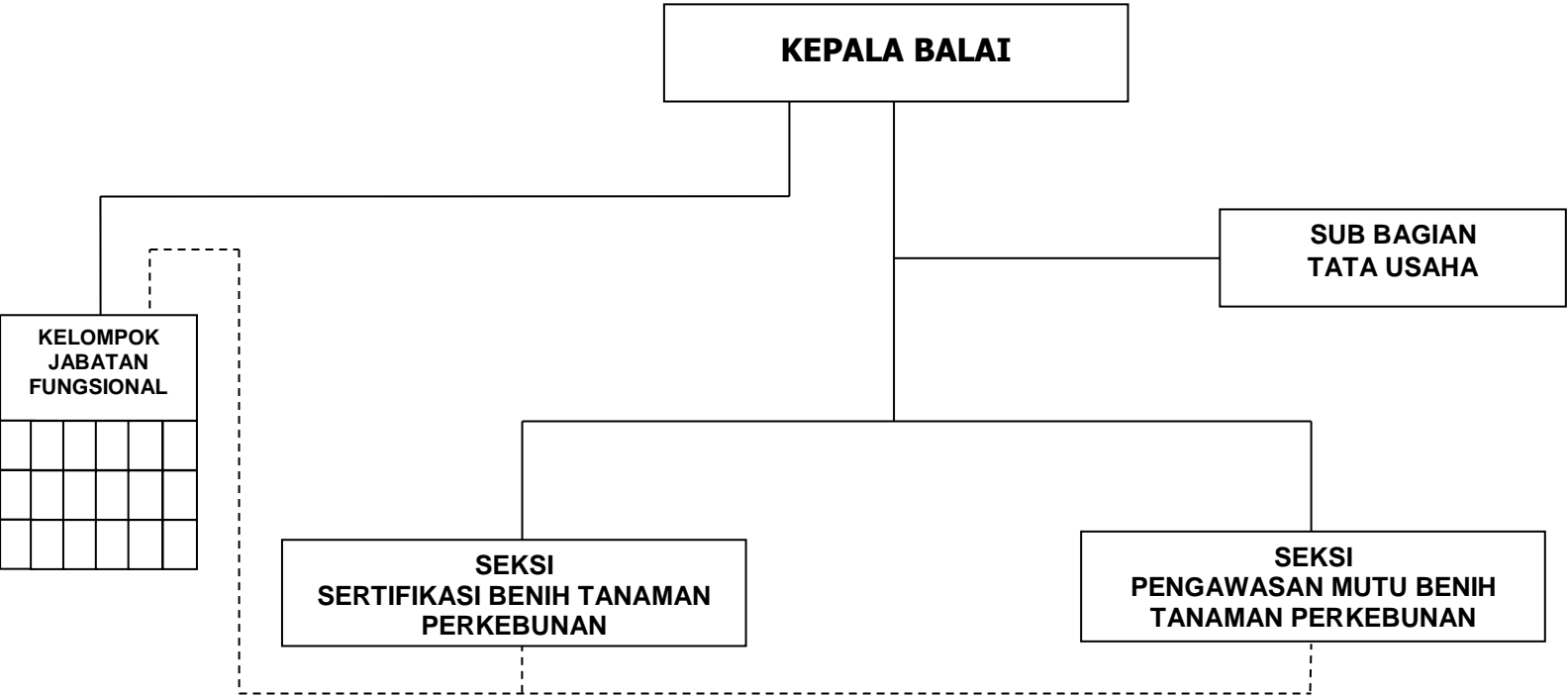
LAMPIRAN XVIII.A : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 59 TAHUN 2014
TANGGAL : 5 AGUSTUS 2014
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGEMBANGAN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN**



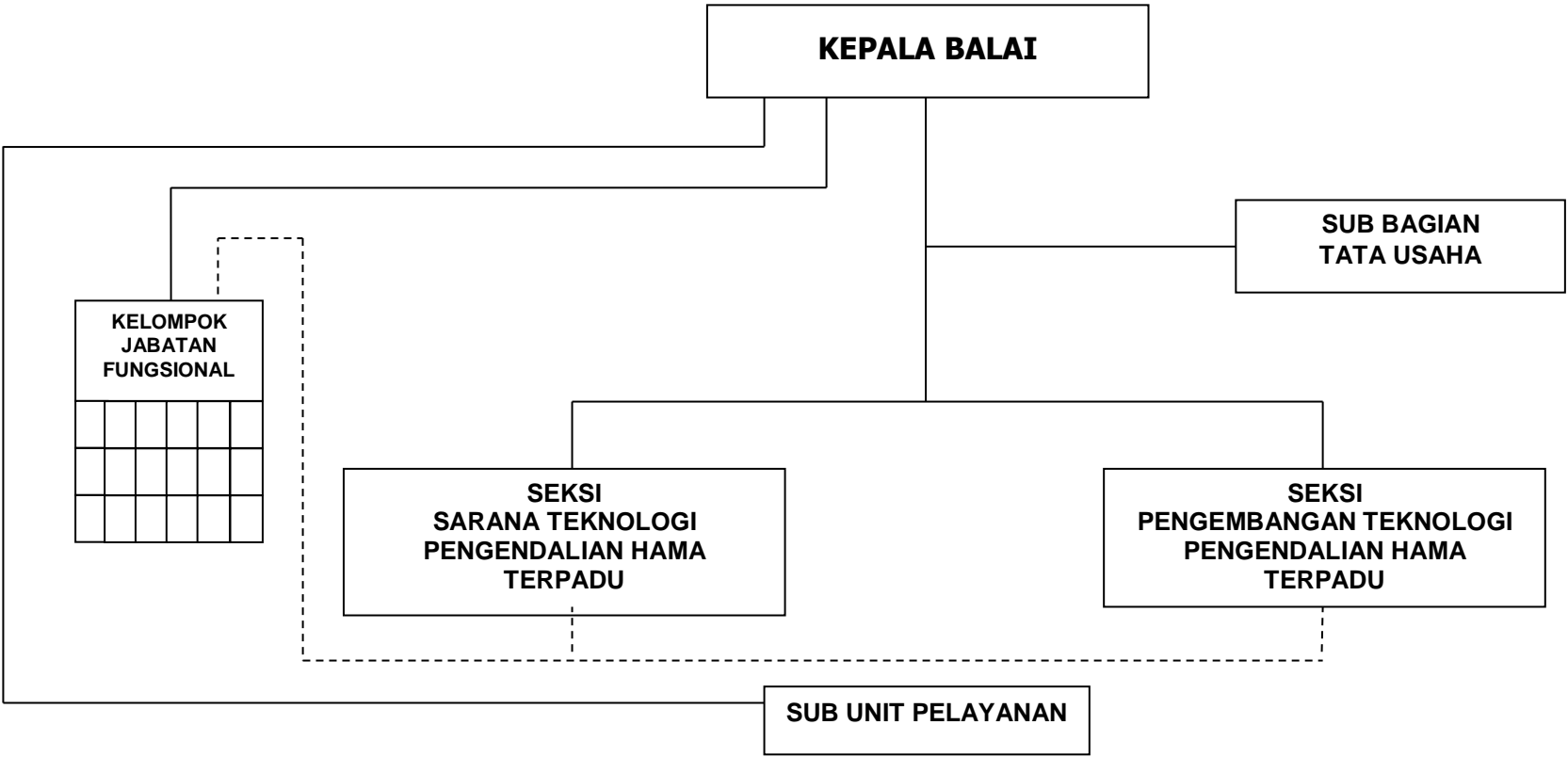
LAMPIRAN XVIII.B : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 59 TAHUN 2014
TANGGAL : 5 AGUSTUS 2014
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI SERTIFIKASI DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERKEBUNAN**



LAMPIRAN XVIII.C : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 59 TAHUN 2014
TANGGAL : 5 AGUSTUS 2014
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN**



Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dan Pergub No. 54 Tahun 2010 tentang tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja unit pelaksana teknis dinas di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, adalah sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Kepala Dinas, memiliki tugas pokok: Merumuskan, menetapkan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Dinas dan UPTD, serta memiliki fungsi:
 - a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis perkebunan yang meliputi produksi perkebunan, pengembangan SDM, kelembagaan dan permodalan, pengembangan dan pengendalian perkebunan serta pengolahan pemasaran dan usaha perkebunan.
 - b. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas perkebunan;
 - c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi dinas;
 - d. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD.

Adapun Rincian Tugas nya adalah:

- a. Menyelenggarakan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas;
- b. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan program kerja, pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, produksi perkebunan, pengembangan sumberdaya manusia kelembagaan dan permodalan, pengembangan dan pengendalian perkebunan serta pengolahan pemasaran dan usaha perkebunan;
- c. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum;
- d. Menyelenggarakan penetapan rencana pembangunan perkebunan;
- e. Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, produksi perkebunan, pengembangan sumberdaya manusia kelembagaan dan permodalan, pengembangan dan

- pengendalian perkebunan serta pengolahan pemasaran dan usaha perkebunan;
- f. Memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur mengenai perkebunan sebagai bahan penetapan kebijakan umum;
 - g. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas;
 - h. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum perkebunan;
 - i. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan rencana strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Dinas;
 - j. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten/Kota;
 - k. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - l. Menyelenggarakan koordinasi dan membina UPTD;
 - m. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Sekretariat, membawahkan:
- a. Subag Perencanaan dan Program
 - b. Subag Kepegawaian dan Umum
 - c. Subag Keuangan
- Tugas Pokok:
- a. Menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Dinas, pengkajian perencanaan dan program,
 - b. pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- Fungsi:
- a. Penyelenggaraan pengkajian dan pengkoordinasian perencanaan dan program kerja Dinas;
 - b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan penyusunan program sekretariat dan Dinas;
 - c. Penyelenggaraan pengkajian dan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.
- Rincian Tugas:
- a. Menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan, program kerja Dinas;
-

- b. Menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
 - c. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program sekretariat;
 - d. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
 - f. Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
 - g. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - h. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - i. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - j. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - k. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas;
 - l. Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional;
 - m. Menyelenggarakan bahan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Dinas;
 - n. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - o. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - p. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Bidang Produksi, membawahkan:
- a. Seksi Tanaman Tahunan;
 - b. Seksi Tanaman Semusim; dan
 - c. Seksi Sarana Produksi.
- Tugas Pokok:
- Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi budidaya tanaman tahunan, budidaya tanaman semusim dan sarana produksi.
- Fungsi :
- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi budidaya tanaman tahunan;
 - b. Penyelenggaraan pengkajian bahan pedoman teknis dan fasilitasi budidaya tanaman semusim;
 - c. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pengelolaan sarana produksi.
- Rincian Tugas:

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang produksi perkebunan;
 - b. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan produksi perkebunan;
 - c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi budidaya tanaman tahunan;
 - d. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi budidaya tanaman semusim;
 - e. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pengelolaan sarana produksi;
 - f. Menyelenggarakan sosialisasi dan fasilitasi bidang produksi perkebunan;
 - g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang produksi perkebunan;
 - i. Menyelenggarakan koordinasi dengan badan koordinasi pemerintahan dan pembangunan wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kab/Kota;
 - j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan dan Permodalan membawahkan :
- a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan
 - b. Seksi Kelembagaan Perkebunan
 - c. Seksi Permodalan
- Tugas Pokok:
- Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi sumberdaya manusia, kelembagaan dan permodalan.
- Fungsi:
- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengembangan sumberdaya manusia, kelembagaan dan permodalan perkebunan;
 - b. Penyelenggaraan fasilitasi pengembangan sumberdaya manusia, kelembagaan dan permodalan perkebunan.
- Rincian Tugas:
- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang pengembangan sumberdaya manusia, kelembagaan dan permodalan;
 - b. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan pengembangan sumberdaya manusia, kelembagaan dan permodalan perkebunan;
 - c. Menyelenggarakan pengkajian pedoman teknis dan fasilitasi pengembangan sumberdaya manusia, kelembagaan dan permodalan perkebunan;

- d. Menyelenggarakan pengkajian pedoman pelatihan teknis dan peningkatan wawasan sumberdaya manusia perkebunan;
 - e. Menyelenggarakan pelatihan teknis perkebunan;
 - f. Menyelenggarakan fasilitasi penguatan kelembagaan petani perkebunan;
 - g. Menyelenggarakan pengkajian pedoman pemanfaatan dan akses permodalan;
 - h. Menyelenggarakan pemanfaatan permodalan usaha perkebunan;
 - i. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang pengembangan sumberdaya manusia, kelembagaan dan permodalan;
 - k. Menyelenggarakan koordinasi dengan badan koordinasi pemerintahan dan pembangunan wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - l. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perkebunan, membawahkan:
- a. Seksi Penataan lahan Perkebunan
 - b. Seksi Prasarana Perkebunan.
 - c. Seksi Pengendalian Perkebunan
- Tugas Pokok:
- Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi, penataan lahan perkebunan, prasarana perkebunan serta pengendalian perkebunan.
- Fungsi:
- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penataan lahan, prasarana dan pengendalian perkebunan;
 - b. Penyelenggaraan fasilitasi penataan lahan, prasarana dan pengendalian perkebunan;
- Rincian Tugas:
- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang pengembangan dan pengendalian perkebunan;
 - b. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan penataan lahan, prasarana dan pengendalian perkebunan;
 - c. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penataan lahan, prasarana dan pengendalian perkebunan;

- d. Menyelenggarakan fasilitasi penataan lahan, prasarana dan pengendalian perkebunan;
 - e. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang pengembangan dan pengendalian perkebunan;
 - g. Menyelenggarakan koordinasi dengan badan koordinasi pemerintahan dan pembangunan wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - h. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
6. Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Usaha Perkebunan, membawahkan:
- a. Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan
 - b. Seksi Pemasaran Hasil Perkebunan
 - c. Seksi Bina Uaha Perkebunan

Tugas Pokok:

Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi, pengolahan, pemasaran dan usahatani perkebunan.

Fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengolahan, pemasaran dan usaha perkebunan;
- b. Penyelenggaraan fasilitasi pengolahan, pemasaran dan usaha perkebunan.

Rincian Tugas:

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang pengolahan, pemasaran dan usaha perkebunan;
- b. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan pengolahan, pemasaran dan usaha perkebunan;
- c. Menyelenggarakan pengkajian bahan pedoman teknis dan fasilitasi pengolahan, pemasaran dan usaha perkebunan;
- d. Menyelenggarakan fasilitasi pengembangan pengolahan, pemasaran dan usaha perkebunan;
- e. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang pengolahan, pemasaran dan usaha perkebunan;

- g. Menyelenggarakan koordinasi dengan badan koordinasi pemerintahan dan pembangunan wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - h. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
7. UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan, dengan susunan organisasi:
- a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu;
 - d. Seksi Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Sub Unit Pelayanan;

Tugas Pokok:

Melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang proteksi tanaman perkebunan

Fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis proteksi tanaman perkebunan; dan
- b. Penyelenggaraan pelayanan perlindungan tanaman perkebunan

Rincian Tugas:

- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Proteksi Tanaman Perkebunan;
- b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Proteksi Tanaman Perkebunan;
- c. menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis di bidang proteksi tanaman perkebunan;
- d. menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis di bidang identifikasi dan pengamatan organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan;
- e. menyelenggarakan pengawasan, pengkajian dan pengujian teknologi pengendalian hama terpadu (PHT) tanaman perkebunan;
- f. menyelenggarakan pengembangan sarana teknologi sistem pengendalian hama terpadu;
- g. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan;
- h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- j. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - k. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
8. UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan, dengan susunan organisasi:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Benih;
 - d. Seksi Pemasaran Benih;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Sub Unit Pelayanan

Tugas Pokok:

Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengembangan benih tanaman perkebunan.

Fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan benih tanaman perkebunan; dan
- b. Penyelenggaraan pengembangan benih tanaman perkebunan.

Rincian Tugas:

- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan;
- b. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan benih tanaman perkebunan;
- c. menyelenggarakan pengembangan benih tanaman perkebunan;
- d. menyelenggarakan penerapan sistem manajemen pemasaran benih perkebunan;
- e. menyelenggarakan pengelolaan kebun Dinas;
- f. menyelenggarakan pelayanan fasilitasi informasi dan pemasaran benih tanaman perkebunan;
- g. menyelenggarakan pengawasan pelestarian plasma nutfah tanaman perkebunan;
- h. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan;

- i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - k. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - l. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
9. UPTD Balai Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan, dengan susunan organisasi:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan;
 - d. Seksi Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;

Tugas Pokok:

Melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang sertifikasi dan pengawasan mutu benih tanaman perkebunan

Fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis sertifikasi dan pengawasan mutu benih tanaman perkebunan; dan
- b. Penyelenggaraan serifikasi dan pengawasan mutu benih tanaman perkebunan

Rincian Tugas:

- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan;
- b. menyelenggarakan penyusunan bahan petunjuk teknis sertifikasi dan pengawasan mutu benih tanaman perkebunan;
- c. menyelenggarakan sertifikasi dan pengawasan mutu benih tanaman perkebunan;
- d. menyelenggarakan pengelolaan laboratorium untuk pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
- e. menyelenggarakan pelayanan fasilitasi pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
- f. menyelenggarakan fasilitasi sertifikasi benih tanaman perkebunan;
- g. menyelenggarakan pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan;

- h. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan;
- i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait;
- k. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
- l. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Dinas Perkebunan

Sumber daya yang dimiliki Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, adalah mencakup sumber daya manusia aparatur, sarana prasarana yang dimiliki, serta asset lainnya sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) perkebunan yang menjalankan pembangunan sub sektor perkebunan di Jawa Barat terdiri dari: Petani Pekebun, Pengusaha Perkebunan, Tenaga Penyuluh, Aparatur Pemerintah, Peneliti serta berbagai pihak pemerhati dunia perkebunan. Semua komponen SDM pembangunan perkebunan Jawa Barat tersebut sejauh ini selalu menjalin kerjasama secara terpadu dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan perkebunan di Jawa Barat sesuai harapan bersama.

Sebagai gambaran, bahwa jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat pada tahun 2012 berjumlah 44 juta jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk 1,6 % per tahun, dari jumlah penduduk tersebut 60% penduduk bermata pencaharian pada bidang pertanian sisanya bergerak pada bidang lainnya. Adapun penduduk Jawa Barat yang bergerak di sub sektor perkebunan sendiri pada Tahun 2012 terdapat 1.454.623 orang pemilik lahan usaha perkebunan, 542.094 org pekerja perkebunan, 45.820 orang pemilik/pengelola serta karyawan Perkebunan Swasta (PBS) dan 37.842 orang pengelola Perkebunan Besar Negara (PBN). Adapun dari 542.094 org pekerja perkebunan tersebut tersebar di areal Perkebunan Rakyat sebanyak 396.408 Jiwa (73,82%), di Perkebunan Besar Swasta sebanyak 52.149 Jiwa (9,71%), dan di Perkebunan Negara sebanyak 88.420 Jiwa (16,47%).

Tabel 2.1
Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja dan Jumlah KK

Subsektor Perkebunan

No	Tahun	Tenaga Kerja	Jumlah KK
1.	2010	531.512	1.594.535
2.	2011	496.174	1.498.360
3.	2012	542.094	1.454.623
4.	2013 *)	-----	1.390.421

*Keterangan : *) Angka Sementara*

SDM aparatur Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan data tahun 2013 adalah sebanyak 140 orang, dengan kualifikasi pendidikan S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 22 orang, S1 sebanyak 41 orang, D3 sebanyak 6 orang, D1 sebanyak 8 orang, SLTA sebanyak 57 orang, SLTP sebanyak 3 orang dan SD sebanyak 3 orang. Dari jumlah SDM aparatur tersebut terdapat tenaga penyuluh 1 org, PPNS 1 org, PBT (Pengawas Benih Tanaman) 3 org, Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) 6 org.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan Alokasi Unit Kerja Tahun 2013

No	Unit Kerja	PNS	TKK	Jumlah
1	Sekretariat	34	8	42
2	Bidang Produksi	13	1	14
3	Bidang Bangdal	11	2	13
4	Bidang PPUP	11	3	14
5	Bidang SDM dan Kelembagaan	11	3	14
6	UPTD BPTP	27	1	28
7	UPTD BPBTP	18	6	24
8	UPTD BP2MB	15	2	17
	JUMLAH	140	26	166

Tabel: 2.3
Jumlah Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Berdasarkan
Tingkat Pendidikan Tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013

No.	Tingkat Pendidikan	2010	2011	2012	2013
1.	S ₃	1	1	1	1
2.	S ₂	19	19	22	24
3.	S ₁	53	51	40	40
4.	D ₃	12	11	10	8
5.	D ₂	1	0	0	0
6.	D ₁	1	5	6	6
7.	SLTA	70	65	61	57
8.	SLTP	6	5	4	3
9.	SD	3	3	3	3
	Jumlah	166	160	147	140

Tabel: 2.4
Jumlah Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan Jabatan Tahun 2013

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
A.	Struktural	
1.	Eselon II.a	1
2.	Eselon III.a	8
3.	Eselon IV.a	24
B.	Fungsional	
1.	Pustakawan	-
2.	Penyuluh Pertanian	1
3.	POPT	9
4.	Pengawas Benih	3
5.	Analisis Kepegawaian	1
C.	Pelaksana	93
Jumlah		140

2. Kelembagaan

Pembangunan Perkebunan Jawa Barat sejauh ini ditangani oleh berbagai kelembagaan formal maupun informal, dengan peran dan fungsinya yang secara umum sudah terbagi secara proposional, meskipun demikian dari aspek teknis dan non teknis pelaksanaan fungsi dan peran kelembagaan tersebut belum dapat terfasilitasi secara optimal.

Aspek kelembagaan menjadi faktor penting dalam keberhasilan penanganan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan perkebunan, terutama sekali jika dikaitkan dengan kelembagaan formal sebagai pengawal kebijakan pembangunan perkebunan.

Dalam penyelenggaraan pembangunan sub sektor perkebunan di Provinsi Jawa Barat disamping secara formal ditangani oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, juga banyak melibatkan peran dari lembaga formal maupun informal lainnya, antara lain:

- a. Lembaga tingkat pusat yang secara langsung maupun tidak langsung ikut berperan dalam proses pembangunan Sub Sektor Perkebunan Jawa Barat, antara lain: Kementerian Pertanian, Direktorat Perkebunan, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian, serta beberapa UPT Pusat yang secara khusus menangani komoditas tanaman perkebunan;
- b. Lembaga Tingkat Provinsi yang terkait dengan kebijakan pembangunan perkebunan di Jawa Barat, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain:

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat berikut UPTD-nya (Balai Proteksi Tanaman Perkebunan, Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan, Balai Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan), Badan Koordinasi Penyuluhan, Biro Bina Produksi, Biro Administrasi Perekonomian, Bappeda, Dinas PSDA, Dinas Bina Marga, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas KUMKM, BPPT, BKPMMD, dan lainnya.

- c. Organisasi/kelembagaan yang terkait dengan pembangunan Perkebunan yang ada di Jawa Barat antara lain adalah: Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Asosiasi Petani Kopi Indonesia (APKI), Asosiasi Petani Kelapa, Asosiasi Petani Cengkeh, Asosiasi Petani Tembakau Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo), Asosiasi Teh Indonesia (ATI), Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO).
- d. Lembaga tingkat Kabupaten/Kota yang menangani kebijakan pembangunan perkebunan se Jawa Barat, memiliki nomen klatur yang beragam, dimana hanya ada 1 (satu) OPD di tingkat Kabupaten/Kota yang secara khusus bernama Dinas Perkebunan, yaitu Dinas Perkebunan Kabupaten Garut. Selebihnya merupakan OPD dengan nomen klatur gabungan, seperti: Dinas Pertanian dan Perkebunan, atau Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dlsb. Kondisi nomen klatur OPD yang demikian tentu saja cukup mempengaruhi terhadap aspek fokus kebijakan pembangunan yang dijalankan oleh masing-masing opd tersebut.

3. Sarana-prasarana

Pembangunan sub sektor perkebunan Jawa Barat sejauh ini juga telah ditunjang oleh keberadaan Sarana-prasarana usaha perkebunan yang tersebar di seluruh bagian wilayah Jawa Barat, antara lain berupa: benih unggul, pupuk, berbagai alat pengolahan (traktor, Alat Pembuatan Pupuk Organik (APPO), alat/mesin pengolah hasil perkebunan), prasarana budidaya (saluran irigasi, embung, pompa air, jalan produksi).

Upaya penyediaan sarana prasarana perkebunan tersebut telah dilakukan melalui dukungan anggaran APBD maupun APBN yang bersifat stimulant untuk mendorong masyarakat/petani dalam memfasilitasi kebutuhannya secara swadaya. Disamping itu dalam rangka menunjang pencapaian target kinerja secara optimal, maka Dinas Perkebunan juga dilengkapi dengan sarana-prasarana aparatur, seperti

unit pembenihan, unit laboratorium, peralatan pengendalian hama penyakit, termasuk keberadaan UPTD dan instalasinya sebagai unit kerja yang menangani hal-hal yang bersifat teknis.

Beberapa sarana prasarana perkebunan yang dibangun melalui dana APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN melalui Kementerian Pertanian, hingga saat ini tersebar di beberapa Kabupaten/Kota, antara lain:

- a. Embung sebanyak 75 unit tersebar di 12 Kabupaten (yaitu: Bandung, Cianjur, Sumedang, Sukabumi, Kuningan, Ciamis, Tasikmalaya, Purwakarta, Bandung Barat, Bogor, Garut, Majalengka), dengan kondisi fisik 53 unit baik, 18 unit cukup baik dan 4 unit kurang baik;
- b. Cekdam hanya terdapat 1 unit yaitu di kabupaten Ciamis dengan kondisi baik;
- c. Rumah Kompos atau UPPO sebanyak 18 unit tersebar di 7 Kabupaten (yaitu: Cianjur, Sumedang, Sukabumi, Cirebon, Garut, Majalengka dan Bandung), dengan kondisi 10 baik dan 8 cukup baik;
- d. Jalan Produksi sepanjang 128,137 Km tersebar di 12 Kabupaten/kota (yaitu: Cianjur, Sumedang, Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kab Cirebon, Ciamis, Tasikmalaya, Purwakarta, Bandung Barat, Subang, Garut, Bandung), dengan kondisi 67,38 Km baik, 55,757 Km cukup baik, dan 5 Km Kurang Baik;
- e. Sumur resapan sebanyak 51 bh tersebar di 6 Kabupaten (Sumedang, Cirebon, Ciamis, Tasikmalaya, Purwakarta, Garut) dengan kondisi 20bh baik, 22 bh cukup baik, dan 9 bh kurang baik;
- f. Irigasi air tanah dalam sebanyak 4 unit hanya terdapat di Kabupaten Subang dengan kondisi semuanya kurang baik;
- g. Irigasi air tanah dangkal sebanyak 7 unit tersebar di 3 kabupaten (yaitu Sukabumi, Garut dan Ciamis) dengan kondisi semuanya baik;
- h. Pengembangan Sumber Air (PSA) sebanyak 3 unit, hanya terdapat di kabupaten Tasikmalaya dengan kondisi baik;
- i. Pompa Air sebanyak 9 unit terdapat di 2 Kabupaten (yaitu: Cianjur dan Cirebon) dengan kondisi baik;
- j. Hand Traktor sebanyak 1 unit terdapat di Kabupaten Cirebon dengan kondisi baik;
- k. Irigasi Desa sepanjang 1,500 Km terdapat di Kabupaten Cirebon dengan kondisi cukup baik;
- l. Jitut sebanyak 1 unit terdapat di Kabupaten Cirebon dengan kondisi cukup baik;

- m. UPH Kakao terdapat di Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar, yaitu berupa: bangunan pengolahan kakao 2 unit, Peti Permentasi 80 Unit, Dryer Box 2 Unit, Moisture Tester 3 Unit, Timbangan Digital 3 Unit, Choper 1 Unit, Pencuci Lendir Kakao 4 Unit, Penepung Kakao 2 Unit, Generator Listrik 1 Unit, Mesin Pengupas Kakao 1 Unit, Mesin Sortasi 1 unit, Pengukur Kadar Air 1 Unit, semuanya dalam kondisi cukup baik.
- n. UPH Kelapa terdapat di 3 Kabupaten Kota (yaitu: Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya dan Kab. Sukabumi), dengan jenis perlengkapannya: Pamarut Kelapa 4 Bh, Pres Santan/Sari 2 Bh, Oil Pres 1 Bh, Mesin Nata De Coco 2 Bh, Cup Seler 1 Bh, Seler 2 Bh, Timbangan Portable 1 Bh, Timbangan Elektronik 1 Bh, Oil Filter 1 Bh, Ember Plastik 10 Bh, Baskom Stainles Steel 10 Bh, Ayakan Besar 15 Bh, Wajan Besar 33 Bh, Susuk Stailless Steel 15 Bh, Gayung Plastik 10 Bh, Jolang 10 Bh, Tabung Gas 5 Bh, Kompor Gas 5 Bh, Slang Gas Karet 5 Bh.
- o. UPH Kopi terdapat di 7 Kabupaten (yaitu: Bogor, Sumedang, Ciamis, Garut, Majalengka, Kuningan dan Bandung) dilengkapi dengan sejumlah peralatan yaitu: Pengupas Kulit Buah Kopi 120 unit, Pencuci Kopi 10 unit, Pemecah Kulit Tanduk Kopi 23 unit, Sortasi (Grader) 7 unit, Baki Penjemuran 4 unit, Terpal 4 bh, Pengering Dryer 3 unit, Penyangray Kopi 14 unit, Penggiling Kopi 15 unit, Hand Mangel 1 unit, Timbangan Duduk 3 unit, Alat Pengukur Kadar Air 9 bh, Pakaging 4 unit, Sealer 1 bh, Alat Kristalisator 1 bh, Tabung Gas 1 bh, dan Generator Listrik 1 bh.
- p. UPH Karet terdapat di 4 kabupaten (yaitu: Sukabumi, Garut, Cianjur dan Tasikmalaya) dilengkapi peralatan berupa: Hand mangel pengasapan 29 unit, bangunan boker 7 unit, dan rumah asap 5 unit.
- q. UPH Tebu ada 5 unit di Cikelet Garut.
- r. UPH Cengkeh terdapat di Kabupaten Sukabumi dan Kuningan, dengan dilengkapi Penyulingan cengkeh 9 unit dalam kondisi cukup baik;
- s. UPH Nilam terdapat di 4 Kabupaten (yaitu: Kuningan, Sukabumi, Sumedang dan Tasikmalaya) dilengkapi alat penyulingan nilam 23 unit
- t. UPH Akar Wangi terdapat di Kabupaten Garut sebanyak 1 unit dengan kondisi cukup baik;
- u. UPH Aren terdapat di Kabupaten Garut sebanyak 1 unit dengan kondisi cukup baik;

- v. UPH Pala terdapat di Kabupaten Perwakarta sebanyak 1 unit dengan kondisi cukup baik;
- w. UPH Teh terdapat di 3 kabupaten (yaitu Purwakarta, Sukabumi, Tasikmalaya) sebanyak 10 unit dalam kondisi cukup baik;
- x. UPH Tembakau terdapat di Kabupaten Sumedang dan Kuningan, dengan perlengkapan: Mesin Pengrajang Tembakau 48 unit, Oven Tembakau 5 unit, dan bangunan UPH 1 unit dengan kondisi cukup baik;
- y. Sarana prasarana perlindungan tanaman; 1 unit laboratorium dan Sub Unit (UPPT) proteksi tanaman di 10 Kabupaten
- z. Sarana prasarana pembenihan: Tersedianya dukungan sumber benih, antara lain 13 Kebun Dinas di 9 Kabupaten/Kota dan 1 unit laboratorium Benih, 1 (Satu) unit laboratorium pengawasan dan pengujian mutu benih.

Tabel: 2.5
Sebaran Kebun Dinas UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman
Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

No	KEBUN DINAS	ALAMAT	LUAS (Ha)	KOMODITAS POKOK
1	Sindanglaya	Jl. Arcamanik 106 Sindanglaya Kota Bandung	1,80	Melinjo, Kopi Arabika, Cengkeh
2	Sukajadi	Wado – Sumedang	8,50	Teh, Kopi Arabika
3	Cimungkal	Wado – Sumedang	7,80	Teh, Kopi Arabika
4	Sukahurip	Jl. Rancah Cisaga Kampung Cibeuri Desa Sukahurip Kec. Cisaga Kab. Ciamis	7,40	Kelapa, Kakao, Melinjo, Cengkeh, Kopi
5	Citiis	Sukanagara – Cianjur	15,64	Teh, Kopi
6	Gekbrong	Jl. Satria Ginanjung RT.01/RW.02 Blok Tiwati Desa Gekbrong Kecamatan Gekbrong Kab. Cianjur	7,00	Teh
7	Lengkong	Surade – Sukabumi	36,46	Teh, Melinjo, Kelapa, Karet
8	Cipeo	Jl. Raya Dangdeur Desa Dangdeur Kec. Subang Kota Kab. Subang	11,75	Kopi, Melinjo, Tebu

No	KEBUN DINAS	ALAMAT	LUAS (Ha)	KOMODITAS POKOK
9	Tegal Harendong	Tegal Harendong – Purwakarta	8,19	Melinjo, Kelapa, Kemiri Sunan
10	Cisarunga	Cikajang – Garut	6,40	Teh, Kopi Robusta
11	Ciheulang	Cikelet – Garut	17,54	Kelapa, Karet
12	Pangkalan	Pangkalan – Karawang	100,00	Kelapa, Melinjo, Kemiri Sunan
13	Sadeng	Leuwiliang – Bogor	6,03	Kemiri Sunan

Beberapa sarana prasarana penunjang pelaksanaan kebijakan pembangunan sub sektor perkebunan di Jawa Barat, antara lain:

- a. Tersedia Website Dinas Perkebunan Jawa Barat www.disbun.jabarprov.go.id;
- b. Tersedia Twitter Dinas Perkebunan Jawa Barat @PerkebunanJabar;
- c. Tersedia Sistem Perencanaan On line APBD RKPD ON LINE;
- d. Tersedia Sistem Perencanaan APBN e-proposal;
- e. Tersedia perangkat Sistem Akutansi Instansi (SAI);
- f. Tersedia perangkat Sistem Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV);
- g. Tersedia komputer untuk pengumpulan dan pengolahan data;
- h. Tersedia sistem e-form untuk akses data dan informasi;
- i. Tersedia perangkat Sistem Geographic Information System (GIS);
- j. Tersedia data dan informasi teknologi komoditas perkebunan;
- k. Tersedia buku data/statistik perkebunan tahunan.

Adapun sarana-prasarana aparatur sebagai pendukung aktivitas pokok, dan secara langsung dikelola oleh Dinas Perkebunan, serta merupakan aset dinas, adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

TABEL 2.6
ASSET DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2013

No Urut	Kode Barang		Nama Bidang Barang	Keadaan per 31 DESEMBER 2012		Mutasi Perubahan Selama 1 Januari 2013 s/d 30 Juni 2013				Keadaan per 30 JUNI 2013		Keterangan
	Gol.	Bid.		Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)	Berkurang		Bertambah		Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)	
						Jmh Barang	Harga (Rp.)	Jmh Barang	Harga (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1		GOLONGAN TANAH	13	24.835.599.000	0	-	0	0	13	24.835.599.000	
2	1	1	TANAH	13	24.835.599.000	0	-	0	0,00	13	24.835.599.000	
3	2		GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN	792	7.320.981.661	0	-	45	1.096.779.500	837	8.417.761.161	
4	2	2	ALAT - ALAT BESAR	8	19.450.000,00	0	-	6	2.938.000	14	22.388.000	
5	2	3	ALAT- ALAT ANGKUTAN	7	829.973.898	0	-	22	1.047.400.000	29	1.877.373.898	
6	2	4	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	16	39.974.000	0	-	0	-	16	39.974.000	
7	2	5	ALAT PERTANIAN	15	36.736.300	0	-	0	-	15	36.736.300	
8	2	6	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1,494	5.047.027.940	0	-	17	46.441.500,00	18,494	5.093.469.440	
9	2	7	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	59	519.014.501	0	-	0	0	59	519.014.501	
10	2	8	ALAT-ALAT KEDOKTERAN	12	8.989.200	0	-	0	0	12	8.989.200	
11	2	9	ALAT LABORATORIM	672	812.225.822	0	-	0	0	672	812.225.822	
12	2	10	ALAT-ALAT PERSENJATAAN/KEAMANAN	2	7.590.000	0	-	0	0	2	7.590.000	
13	3		GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN	31	4.726.051.738	0	-	0	0	31	4.726.051.738	
14	3	11	BANGUNAN GEDUNG	22	4.532.176.918	0	-	0	0	22	4.532.176.918	
15	3	12	MONUMEN	9	193.874.820	0	-	0	0	9	193.874.820	
16	4		GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	10	213.334.300	0	-	0	0	10	213.334.300	
17	4	13	JALAN DAN JEMBATAN	1	39.784.149	0	-	0	0	1	39.784.149	

*Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018*

No Urut	Kode Barang		Nama Bidang Barang	Keadaan per 31 DESEMBER 2012		Mutasi Perubahan Selama 1 Januari 2013 s/d 30 Juni 2013				Keadaan per 30 JUNI 2013		Keterangan
	Gol.	Bid.		Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)	Berkurang		Bertambah		Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)	
						Jmh Barang	Harga (Rp.)	Jmh Barang	Harga (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	4	14	BANGUNAN AIR/IRIGASI	1	15.149.495	0	-	0	0	1	15.149.495	
19	4	15	INSTALASI	7	138.400.656	0	-	0	0	7	138.400.656	
20	4	16	JARINGAN	1	20.000.000	0	-	0	0	1	20.000.000	
21	5		ASSET TETAP LAINNYA	437	414.795.900	0	-	0	0	437	414.795.900	
22	5	17	BUKU DAN PERPUSTAKAAN	418	375.864.900	0	-	0	0	418	375.864.900	
23	5	18	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN	19	38.931.000	0	-	0	0	19	38.931.000	
24	5	19	HEWAN DAN TERNAK SERTA TANAMAN	0	0	0	-	0	0	0	-	
25	6		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0	0	-	0	0	0	-	
26	6	20	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0	0	-	0	0	0	-	
TOTAL				1.283	37.510.762.599	0	0	45	1.096.779.500	1.328	38.607.542.099	

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat setiap tahun terus berupaya untuk meningkatkan kinerja pelayanan sebagai penjabaran dari tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, dengan mengandalkan segenap kemampuan sumber daya yang dimiliki, serta dukungan penganggaran baik dari APBD maupun APBN. Adapun beberapa hasil kinerja pelayanan tersebut adalah sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Pelayanan aspek Pengelolaan Lahan Perkebunan, yaitu berupa: Bimbingan teknis pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan; pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah provinsi; Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah provinsi; serta Penetapan sasaran areal tanam wilayah provinsi.
2. Pelayanan aspek Pemanfaatan Air Untuk Perkebunan, yaitu berupa: Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber air, air permukaan dan air tanah untuk perkebunan; Bimbingan pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan air bertekanan untuk perkebunan; serta Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan.
3. Pelayanan aspek Pengelolaan Pupuk, pestisida dan Alat dan Mesin Perkebunan, yaitu berupa: Pemantauan dan evaluasi penggunaan pupuk, pestisida, alat dan Mesin Perkebunan; Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk, pestisida, Alat dan Mesin Perkebunan wilayah provinsi; Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk Alat dan Mesin Perkebunan; Pengawasan standar mutu pupuk, pestisida, Alat dan Mesin Perkebunan; Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah provinsi serta Penentuan kebutuhan prototipe alat dan mesin perkebunan.
4. Pelayanan aspek Perbenihan, yaitu berupa: Pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman perbenihan perkebunan; Penyusunan kebijakan benih perkebunan antar lapang (antar kabupaten); Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal; Pemantauan benih impor wilayah provinsi. Pengawasan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah provinsi. Pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah provinsi; Pengawasan dan sertifikasi benih perkebunan; serta Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah provinsi.

5. Fasilitasi akses pembiayaan, yaitu berupa: Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan, non perbankan dan dana yang bersumber dari masyarakat wilayah provinsi.
6. Perlindungan Perkebunan, yaitu berupa: Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah provinsi; Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah provinsi; Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah provinsi; Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah provinsi; Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah provinsi; Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah provinsi. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah provinsi; serta Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah provinsi.
7. Pelayanan Perizinan Usaha, yaitu berupa: fasilitasi proses pemberian izin usaha perkebunan lintas kabupaten/kota, serta pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan lintas kabupaten/kota.
8. Pelayanan aspek Teknis Budidaya, yaitu berupa: Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah provinsi.
9. Pelayanan aspek Pembinaan Usaha, Panen, Pasca Panen, Pengolahan Hasil dan pemasaran, yaitu berupa: Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah provinsi; Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan *hygiene* dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah provinsi; Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan wilayah provinsi; Pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah provinsi; Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah provinsi; Pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah provinsi; Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah provinsi; Pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil perkebunan wilayah provinsi; Promosi komoditas perkebunan wilayah provinsi; Penyebarluasan informasi

pasar wilayah provinsi. Pemantauan dan evaluasi harga komoditas perkebunan wilayah provinsi.

10. Pelayanan aspek Sarana Usaha, yaitu berupa: Pemantauan dan evaluasi pengembangan sarana usaha wilayah provinsi; Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah provinsi.
11. Pelayanan informasi pembangunan perkebunan, yaitu berupa: Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan, Penyusunan statistik perkebunan wilayah provinsi; Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah provinsi; serta pelayanan informasi melalui media elektronik (Website dan Tweeter), buku, leaflet, booklet, spanduk, balogo, poster, papan informasi, pameran, wawancara via Radio/Televisi dan pelayanan perpustakaan.

Indikator makro ekonomi sub sektor perkebunan Jawa Barat selama tahun 2008-2013 secara umum menunjukkan kondisi yang positif sebagaimana ditunjukkan data berikut ini:

Tabel: 2.7
Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 – 2012

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PERTANIAN	85,149,263	97,194,393	103,131,444	109,094,870
a. Tanaman Bahan Makanan	60,571,646	71,150,089	75,707,280	79,604,929
b. Tanaman Perkebunan	4,338,444	5,725,375	6,127,547	6,393,011
c. Peternakan	11,902,686	11,985,226	12,130,634	13,073,930
d. Kehutanan	798,531	921,610	944,341	979,709
e. Perikanan	6,934,102	7,412,093	8,221,642	9,043,291

Sumber: BPS Jawa Barat tahun 2013

Tabel: 2.8
Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 – 2012

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PERTANIAN	41,722,076	42,137,486	42,101,054	41,801,727
a. Tanaman Bahan Makanan	31,607,820	31,947,247	31,764,028	31,175,920
b. Tanaman Perkebunan	2,258,606	2,163,253	2,255,301	2,360,133
c. Peternakan	5,457,797	5,555,841	5,532,920	5,607,607
d. Kehutanan	359,747	377,535	364,606	360,231
e. Perikanan	2,038,104	2,093,610	2,184,199	2,297,836

Sumber: BPS Jawa Barat tahun 2013

Tabel: 2.9
Indeks Harga Yang Diterima, Indeks Harga Yang Dibayar dan Nilai Tukar
Petani (NTP) Menurut Sub Sektor Di Jawa Barat
Tahun 2008 – 2012

No	Tahun/ Kelompok	Sub Sektor					RATA-RATA
		Tanaman Pangan	Tanaman Hortikultura	Tanaman Perkebunan Rakyat	Peternakan	Perikanan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Harga yang diterima Petani						
	Tahun 2008, rata-rata	105.06	110.73	119.36	108.83	114.54	108.37
	Tahun 2009, rata-rata	112.55	124.71	132.19	121.82	132.05	119.17
	Tahun 2010, rata-rata	121.10	144.70	147.64	129.06	139.33	129.77
	Tahun 2011, rata-rata	139.61	154.26	161.98	132.73	150.54	144.18
	Tahun 2012, rata-rata	154.72	166.96	169.55	138.50	153.71	156.01
	Rata-rata (2008-2012)	126.61	140.27	146.14	126.19	138.03	131.50
2	Indeks Harga yang dibayar Petani						
	Tahun 2008, rata-rata	113.27	112.59	112.81	111.94	111.25	112.72
	Tahun 2009, rata-rata	123.32	122.20	122.66	122.35	120.36	122.58
	Tahun 2010, rata-rata	131.87	130.27	131.54	129.89	126.78	130.67
	Tahun 2011, rata-rata	139.18	136.80	138.87	135.80	132.03	137.42
	Tahun 2012, rata-rata	145.41	142.50	144.50	140.95	136.63	143.20
	Rata-rata (2008-2012)	130.61	128.87	130.08	128.19	125.41	129.32
3	Nilai Tukar Petani						
	Tahun 2008, rata-rata	92.76	98.40	105.73	97.16	102.86	96.14
	Tahun 2009, rata-rata	91.27	102.01	107.73	99.55	109.71	97.21
	Tahun 2010, rata-rata	91.79	111.04	112.24	99.37	109.88	99.28
	Tahun 2011, rata-rata	100.29	112.76	116.63	97.74	114.02	104.90
	Tahun 2012, rata-rata	106.38	117.15	117.33	98.26	112.50	108.93
	Rata-rata (2008-2012)	96.50	108.27	111.93	98.42	109.79	101.29

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013.

Gambaran tingkat capaian kinerja Dinas Perkebunan berdasarkan sasaran Rencana Strategis Dinas Perkebunan periode 2008-2013 adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 2.12 berikut ini:

Tabel 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi		Realisasi s/d Tahun 2013	Target RPJMD	% Capaian Kinerja Tahun 2013 terhadap RPJMD
			sd Tahun 2012	Tahun 2013			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya jumlah benih tanaman perkebunan yang dapat disediakan	1) Jumlah penggunaan benih unggul tanaman perkebunan (pohon/batang);	65.110	746.900	812.010	392.860	206,69
2	Meningkatnya pengawasan dan pengujian benih tanaman perkebunan	2) Jumlah benih bermutu dan tersertifikasi (pohon)	188.085.398	62.316.268	250.401.666	140.000.000	178,86
3	Meningkatnya pembinaan agribisnis dan produksi komoditi unggulan perkebunan	3) Luas areal (Ha) pembinaan dan pengembangan tanaman perkebunan:	6.582	1.090	7.672	6.900	111,19
		4) Jumlah bintek dan pembinaan budidaya	500	105	605	460	131,52
		5) Pelayanan Pengawasan dan Pembinaan Usaha Agribisnis perkebunan di Kab/Kota	14	17	31	16	193,75
		6) Pengembangan Multiaktivitas Agribisnis Perkebunan (Lokasi)	15	-	15	15	100,00
4	Meningkatnya penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan	7) Jumlah lokasi penanganan Serangan OPT (Kab/Kota)	17	15	32	22	145,45
		8) Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan (paket)	5	6	11	5	220,00
		9) Jumlah Kelembagaan Perlindungan Tanaman (SL-PHT)	240	-	240	240	100,00
5	Menurunnya kerugian akibat gangguan usaha perkebunan	10) Lokasi Pencegahan kerugian akibat gangguan usaha perkebunan (kab/Kota)	40	3	43	20	215,00
6	Penggunaan UPH sesuai Standar Teknis	11) Fasilitas Penggunaan UPH perkebunan yang memenuhi standar teknis (komoditi)	13	5	18	18	100,00
7	Meningkatnya fasilitasi pengolahan dan mutu hasil olahan tembakau	12) Pengolahan Tembakau (komoditi)	4	1	5	5	100,00
8	Meningkatnya Fasilitas promosi, pemasaran dan kemitraan usaha produk unggulan perkebunan	13) Jumlah promosi pengembangan, pemasaran dan pola kemitraan (kali)	28	11	39	29	134,48
9		14) Jumlah SDM perkebunan dan pelaku usaha perkebunan yang berkualitas (org)	4.160	2.474	6.634	4.970	133,48

*Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018*

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi		Realisasi s/d Tahun 2013	Target RPJMD	% Capaian Kinerja Tahun 2013 terhadap RPJMD
			sd Tahun 2012	Tahun 2013			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM perkebunan dan pelaku usaha perkebunan	15) Jumlah SDM perkebunan dan pelaku usaha perkebunan yang memahami rendemen tebu meningkat (org)	24	-	24	90	26,67
10	Tercapainya peningkatan kelembagaan petani dan kemampuan pengelolaan permodalan perkebunan	16) Kelompok Tani/Asosiasi petani perkebunan meningkat (lembaga)	71	10	81	70	115,71
11	Tertatanya lahan potensial untuk pengembangan komoditi perkebunan	17) Lahan potensial untuk komoditi perkebunan (Kab/Kota)	45	5	50	18	277,78
Rata-rata							146,51

Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perkebunan
Provinsi Jawa Barat

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDAPATAN DAERAH	125.731.500	126.900.000	173.653.000	208.383.600	250.060.320	130.738.220	134.197.586	135.653.000	138.103.000	164.302.000	104,0	105,8	78,1	66,3	65,7	19,4	6,1
Pendapatan Asli Daerah	125.731.500	126.900.000	173.653.000	208.383.600	250.060.320	130.738.220	134.197.586	135.653.000	138.103.000	164.302.000	104,0	105,8	78,1	66,3	65,7	19,4	6,1
Retribusi Penjualan Produk Usaha Kebun Dinas	69.731.500	71.200.000	92.713.000	111.255.600	133.506.720	71.181.700	71.950.000	81.391.800	82.841.800	98.581.200	102,1	101,1	87,8	74,5	73,8	18,1	8,7
Retribusi Penjualan Produk Dinas	56.000.000	55.700.000	80.940.000	97.128.000	116.553.600	59.556.520	62.247.586	54.261.200	55.261.200	65.720.800	106,4	111,8	67,0	56,9	56,4	21,2	3,1
BELANJA DAERAH	30.673.299.379	26.080.570.982	36.547.994.731	42.291.776.821	55.673.310.279	27.455.430.816	23.788.490.703	33.310.222.463	38.145.344.786	50.272.494.377	89,5	91,2	91,1	90,2	90,3	18,1	18,2
Belanja tidak langsung	9.098.201.379	14.581.491.270	15.544.686.231	15.810.941.886	16.587.167.944	8.975.709.317	14.122.166.506	14.892.432.609	15.065.709.877	15.008.795.506	98,7	96,8	95,8	95,3	90,5	18,4	15,9
Belanja langsung	21.575.098.000	11.499.079.712	21.003.308.500	26.480.834.935	39.086.142.335	18.479.721.499	9.666.324.197	18.417.789.854	23.079.634.909	35.263.698.871	85,7	92,1	87,6	87,2	90,2	27,4	30,2

Untuk melihat keberhasilan tingkat capaian indikator kinerja pembangunan sub sektor perkebunan Jawa Barat selama kurun waktu 2008-2013 secara kumulatif, kiranya perlu ditinjau keterkaitannya terhadap indikator Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) serta indikator kinerja Renstra Kabupaten/Kota se Jawa Barat. Disamping itu capaian indikator kinerja Hasil pembangunan sub sektor perkebunan Jawa Barat selama kurun waktu 2008-2013 juga perlu dikaitkan dengan kebijakan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Pola Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, serta dikaitkan pula terhadap Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Provinsi Jawa Barat, sebagaimana yang disajikan dalam beberapa tabel dibawah.

Dalam kaitannya dengan capaian indikator kinerja Renstra K/L, bahwa beberapa jenis komoditas perkebunan Jawa Barat sejauh ini telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam mendukung ketersediaan produk perkebunan nasional di pasar dunia serta berdampak positif terhadap perolehan devisa negara, seperti komoditas: Teh, Karet, Kina, Kopi, Kakao dan minyak Atsiri. Disamping itu keragaman komoditas perkebunan Jawa Barat yang tersebar diberbagai wilayah Kabupaten/Kota juga telah memberikan manfaat yang cukup besar bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai peloksok wilayah Jawa Barat.

Tabel 2.12
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
terhadap Sasaran Renstra K/L dan Renstra OPD Kabupaten/Kota

NO	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Disbun Provinsi	Sasaran Pada Renstra OPD Kabupaten/Kota*)	Sasaran Pada Renstra K/L
1	2	3	4	5
1	Jumlah penggunaan benih unggul tanaman perkebunan (pohon)			80%
	a. Aren	30,400	30,400	-
	b. Kemiri sunan	51,724	51,724	-
	c. Kakao	52,000	52,000	-
	d. Kopi	109,000	109,000	-
	e. Karet	17,000	17,000	-
	f. Kelapa	56,000	56,000	-
	g. Pala	17,000	17,000	-
	h. Cengkeh	59,736	59,736	-
2	Jumlah benih bermutu dan tersertifikasi	169,680,000	169,680,000	60%
3	Luas areal (Ha) pembinaan dan pengembangan tanaman perkebunan melalui:			
	Intensifikasi tanaman:			
	1. Kakao	400	400	2,020,000
	2. Kelapa	500	500	3,833,000
	3. Kopi	250	250	1,354,000
	4. Teh	250	250	13,039,000
	Rehabilitasi tanaman:			
	1. Kakao	475	475	-
	2. Kelapa	700	700	-
	Diversifikasi tanaman jarak	150	150	21,220
	Perluasan/Peremajaan:			4.050 Ha
	1. Kopi	1,750	1,750	-
	2. Karet	2,000	2,000	-
	3. Tebu	320	320	-
	Demplot kebun bibit tebu	25	25	-

*Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018*

4	Jumlah bintek dan pembinaan budidaya	460	460	-
5	Pelayanan, pengawasan dan pembinaan usaha agribisnis perkebunan di kab/kota	16	16	-
6	Pengembangan multi aktivitas agribisnis perkebunan	15	15	-
7	Jumlah Lokasi penanganan serangan OPT	22	22	53.141 Ha
8	Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan (paket)	1	1	-
9	Jumlah kelembagaan perlindungan tanaman (SL-PHT)	240	240	-
10	Lokasi pencegahan kerugian akibat gangguan usaha perkebunan	20	20	44 Ha
11	Fasilitasi Penggunaan UPH perkebunan yang memenuhi standar teknis	5	5	-
12	Pengolahan Tembakau	1	1	-
13	Jumlah promosi, pengembangan pemasaran dan pola kemitraan	20	20	-
14	Jumlah SDM perkebunan dan pelaku usaha perkebunan yang berkualitas	4970	4970	-
15	Jumlah SDM perkebunan dan pelaku usaha perkebunan yang memahami rendemen tebu meningkat	90	90	-
16	Kelompok Tani/Asosiasi petani perkebunan meningkat	270	270	-
17	Lahan potensial untuk komoditi perkebunan	7	7	-

*) Rata-rata Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi

Tabel 2.13
Komparasi Capaian Sasaran Renstra OPD Kabupaten/Kota terhadap Sasaran Renstra Dinas Perkebunan Provinsi dan Renstra K/L

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra OPD Kab./Kota	Sasaran Pada Renstra OPD Provinsi	Sasaran Pada Renstra K/L
1	2	3	4	5
1	Jumlah kelompok tani yang terbina	100	14	-
2	Luas (ha) penanaman lahan tidur dengan pola konservasi	1,250	-	-
3	Peningkatan produksi (ton) komoditas unggulan:			
	a. Atsiri	370	-	-
	b. Kopi	5,340	-	698,000
	c. Teh	20,250	-	162,610
	d. Tembakau	21,215	-	176,940
	e. Tebu	4,400	-	2,624,070
	f. Karet		-	2,594,460
	g. kakao	160	-	933,870
	h. kelapa	170	-	3,247,380
	i. Pala	-	-	-
	j. Cengkeh	-	-	75,540
	k. Kemiri sunan	-	-	4,800
	l. Aren	-	-	-
	m. lada	27	-	81,660

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra OPD Kab./Kota	Sasaran Pada Renstra OPD Provinsi	Sasaran Pada Renstra K/L
1	2	3	4	5
4	Peningkatan produktivitas (ton/ha) komoditas unggulan:			
	a. Atsiri	0.15	-	-
	b. Kopi	4.00	-	0.73
	c. Teh	4.00	-	1.43
	d. Tembakau	12.75	-	0.88
	e. Tebu	23.00	-	6.21
	f. Karet	-	-	0.84
	g. kakao	-	-	0.82
	h. kelapa	-	-	1.04
	i. Pala	-	-	-
	j. Cengkeh	-	-	0.26
	k. Kemiri sunan	-	-	16.00
	l. Aren	-	-	-
5	Luas (ha) demplot akarwangi berbasis konservasi	25	-	-
6	Kebutuhan pupuk (jenis)	2	-	
7	Jumlah komoditi yang menggunakan bibit unggul	6	392,860	0.43
8	Prosentase penyerapan tenaga kerja	10	-	-
9	Jumlah promosi produk perkebunan	10	-	-
10	Jumlah lelang agro dan pameran produk perkebunan	10	-	-

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra OPD Kab./Kota	Sasaran Pada Renstra OPD Provinsi	Sasaran Pada Renstra K/L
1	2	3	4	5
11	Jumlah studi banding pemasaran produk perkebunan	10	-	-
12	Kemitraan pemasaran hasil perkebunan (jenis)	5	-	-
13	Jumlah produk (komoditas) yang memenuhi standar mutu	6	-	-
14	Jumlah (unit) alat pengolahan hasil tanaman perkebunan	15	-	-
15	Jumlah kelompok sasaran Bintek dan Sosialisasi pengoperasian alat pengolah hasil	25	-	-
16	Prosentase peningkatan kualitas hasil produk perkebunan	5	-	-
17	Jumlah (KK) penyerapan tenaga kerja sekitar kebun	500	-	-
18	Jumlah komoditas inti plasma sektor perkebunan	5	-	-
19	Luas (ha) agrobisnis tanaman rami	45	-	-
20	Luas (ha) pengendalian serangan hama dan penyakit	75	15 Kab/Kota	0.32

Tabel 2.14
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Barat

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
1	2	3	4	5	6
1	Pusat Kegiatan Nasional (PKN) PKN Jabodetabek, meliputi: Provinsi Jawa Barat, DKI, Provinsi Banten PKN Bandung Raya, PKN Cirebon	Merupakan wilayah perkotaan yang kurang dominan kawasan perkebunannya	Di wilayah ini kurang terjadi persingungan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan perkebunan, kecuali pada aspek distribusi produk perkebunan	Di wilayah ini tidak terlalu berpengaruh kepada perubahan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	Mempertahankan luas lahan exsting perkebunan
2	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW): PKW Sukabumi, PKW Pelabuhanratu, PKW Cikampek-Cikopo, PKW Kadipaten, PKW Pangandaran, PKW Indramayu, PKW Tasikmalaya	Di wilayah ini masih dominan keberadaan lahan perkebunan	Akan terjadi alih fungsi lahan perkebunan	Terjadinya penurunan produksi dan produktivitas tan perkebunan	Mempertahankan luas lahan exsting perkebunan
3	Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Cibadak (Jampang kulon, Sagaranten, Jampang Tengah); Cianjur, Sindang Barang (Sukanagara); Puwakarta (Wanayasa, Plered); Karawang (Rengasdengklok, Cilamaya); Sumedang (Wado, Tomo, Conggeang); Pamanukan, Subang, Jalan Jagak (Ciasem, Pagaden, Kalijati, Pusakanagara); Jatibarang (Karangampel, kandanghaur, Patrol, Gantar); Majalengka (Kertajati, Jatiwangi, Rajagaluh, Cikijing, Talaga); Kuningan (Cilimus, Ciawigebang, Luragung, Kadugede); Garut, Pameungpeuk (Cikajang, Bungbulang)	Di wilayah ini masih dominan keberadaan lahan perkebunan	Akan terjadi alih fungsi lahan perkebunan	Terjadinya penurunan produksi dan produktivitas tan perkebunan	Mempertahankan luas lahan exsting perkebunan

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
1	2	3	4	5	6
	Singaparna (Karangnunggal); Ciamis, banjarsari, Parigi (Kawali, Cijeungjing, Cikoneng, Rancah, Panjalu, Pamarican Cijulang); Banjar				
4	Rencana Bandara Kabupaten Majalengka (Kertajati) Kabupaten Sukabumi (Citarate)	Di wilayah ini masih dominan keberadaan lahan perkebunan	Akan terjadi alih fungsi lahan perkebunan	Terjadinya penurunan produksi dan produktivitas tan perkebunan	Mempertahankan luas lahan exsting perkebunan
5	Rencana Pelabuhan Laut Kabupaten Bekasi Karawang (Cilamaya)		Diwilayah ini kurang terjadi persinggungan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan perkebunan, kecuali pada aspek distribusi produk perkebunan	Di wilayah ini tidak terlalu berpengaruh kepada perubahan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	Mempertahankan luas lahan exsting perkebunan
6	Rencana Pelabuhan Penyeberangan	-	Diwilayah ini kurang terjadi persinggungan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan perkebunan, kecuali pada aspek distribusi produk perkebunan	Di wilayah ini tidak terlalu berpengaruh kepada perubahan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	Mempertahankan luas lahan exsting perkebunan
7	Rencana Terminal Kota Bogor, Kabupaten Bekasi Kota Depok, Karawang, Kota Cirebon Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kota Taskmalaya, Kota Sukabumi, Pelabuhan Ratu, Kota Bandung Kabupaten Bandung.	Merupakan wilayah perkotaan yang kurang dominan kawasan perkebunannya	Diwilayah ini kurang terjadi persinggungan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan perkebunan, kecuali pada aspek distribusi produk perkebunan	Di wilayah ini tidak terlalu berpengaruh kepada perubahan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	Mempertahankan luas lahan exsting perkebunan
8	Rencana Stasiun Kereta	Merupakan wilayah perkotaan yang kurang dominan kawasan perkebunannya	Diwilayah ini kurang terjadi persinggungan pelaksanaan program/kegiatan	Di wilayah ini tidak terlalu berpengaruh kepada perubahan	Mempertahankan luas lahan exsting perkebunan

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
1	2	3	4	5	6
			pembangunan perkebunan, kecuali pada aspek distribusi produk perkebunan	produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	
9	Jaringan jalan Primer/Sekunder WP Bodebekpunjur WP Purwasuka WP KK Cekungan Bandung WP Ciayumajakuning WP Priatim-Pangandaran WP Sukabumi dsk	Di wilayah ini masih dominan keberadaan lahan perkebunan	Akan terjadi alih fungsi lahan perkebunan untuk kebutuhan jaringan jalan primer/sekunder	Terjadinya penurunan produksi dan produktivitas tan perkebunan	Mempertahankan luas lahan exsting perkebunan
10	Jaringan prasarana sumber daya air <i>Kabupaten Sukabumi:</i> Waduk Citepus Waduk Ciletuh Waduk Cikarang Waduk Cikaso Waduk Warungkiara Waduk Cibareno <i>Kabupaten Cianjur:</i> Waduk Cibuni Waduk Cimaskara <i>Kabupaten Bandung:</i> Waduk Sukawana Waduk Santosa Waduk Ciwidey Waduk Cimeta Waduk Cikapundung Waduk Citarik Waduk Tegalluar	Di wilayah ini masih dominan keberadaan lahan perkebunan	Akan terjadi sinergitas program kegiatan dalam pengembangan agribisnis perkebunan dan pertanian pada umumnya	Akan terjadinya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan akibat adanya sinergitas program/kegiatan yang saling menunjang	Pengembangan teknologi budidaya dan pengembangan agroindustri perkebunan
	Jaringan prasarana energi/listrik				

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
1	2	3	4	5	6
11	WP Bodebekpunjur WP Purwasuka WP KK Cekungan Bandung WP Ciayumajakuning WP Priatim-Pangandaran WP Sukabumi dsk	Di wilayah ini masih dominan keberadaan lahan perkebunan	Akan terjadi sinergitas program kegiatan dalam pengembangan agribisnis perkebunan dan pertanian pada umumnya	Akan terjadinya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan akibat adanya sinergitas program/kegiatan yang saling menunjang	Pengembangan teknologi budidaya dan pengembangan agroindustri perkebunan
12	Jaringan prasarana telekomunikasi WP Bodebekpunjur WP Purwasuka WP KK Cekungan Bandung WP Ciayumajakuning WP Priatim-Pangandaran WP Sukabumi dsk	Di wilayah ini masih dominan keberadaan lahan perkebunan	Akan terjadi sinergitas program kegiatan dalam pengembangan agribisnis perkebunan dan pertanian pada umumnya	Akan terjadinya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan akibat adanya sinergitas program/kegiatan yang saling menunjang	Pengembangan teknologi budidaya dan pengembangan agroindustri perkebunan

Tabel 2.15
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
1	2	3	4	5	6
1	WKPP-I Kab. Bogor, Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi, Kota Bogor, Kota Sukabumi dan Kota Depok	WKPP-I merupakan wilayah pengembangan aneka komoditas perkebunan yang cukup luas dan merata, yaitu Teh, Kopi, Karet, Kelapa Dalam, Kelapa Sawit, Pala, Kakao, dlsb. Di wilayah ini juga banyak terdapat industri pengolahan hasil pertanian/perkebunan	<ul style="list-style-type: none">• Program Peningkatan Produksi• Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan• Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian• Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan	WKPP-I perlu dipertahankan sebagai wilayah pengembangan perkebunan produktif dengan berbagai jenis komoditas unggulan di pasar nasional maupun internasional. Sarana-prasarana budidaya perkebunan perlu ditingkatkan (Embung, Irigasi, Jalan Produksi dan UPH)	WKPP-I perlu dipertahankan sebagai wilayah pengembangan perkebunan produktif dengan berbagai jenis komoditas unggulan di pasar nasional maupun internasional. Sarana-prasarana budidaya perkebunan perlu ditingkatkan (Embung, Irigasi, Jalan Produksi dan UPH)
2	WKPP-II Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta dan Kab. Subang	WKPP-II merupakan wilayah perkebunan Teh, Tebu, Karet, Kelapa Dalam, Cengkih, Kakao, Kopi, dlsb. Di wilayah ini juga banyak terdapat industri pengolahan hasil pertanian/perkebunan	<ul style="list-style-type: none">• Program Peningkatan Produksi• Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan• Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian• Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan	WKPP-II perlu dipertahankan sebagai wilayah pengembangan perkebunan produktif dengan berbagai jenis komoditas unggulan di pasar nasional maupun internasional. Sarana-prasarana budidaya perkebunan perlu ditingkatkan (Embung, Irigasi, Jalan Produksi dan UPH)	Perlu mempertahankan luas lahan existing perkebunan dari desakan alih fungsi lahan, meningkatkan pengembangan agroindustri berdasarkan potensi setempat.
3	WKPP-III	Di WKPP-III terdapat lahan perkebunan tebu yang cukup luas, disamping lahan	<ul style="list-style-type: none">• Program Peningkatan Produksi	WKPP-III akan berkembang sebagai kawasan industri berbasis pertanian sejalan	Perlu mempertahankan luas lahan existing perkebunan dari desakan alih fungsi lahan, meningkatkan

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
1	2	3	4	5	6
	Kab. Cirebon, Kota Cirebon, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan dan Kab. Indramayu	perkebunan kelapa, cengkih, Teh, Kopi, Aren, Kapok, dlsb. Juga terdapat industri gula dan agroindustri lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan • Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian • Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan 	dengan berkembangnya pembangunan bandara Kertajati, yg akan berdampak pada alih fungsi lahan perkebunan menjadi lahan industri maupun jasa lainnya, sehingga produksi unggulan WKPP III yaitu Tebu, Tembakau, Cengkeh dan Kapok akan mengalami penurunan	pengembangan agroindustri berdasarkan potensi setempat.
4	WKPP IV Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Sumedang, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kota Banjar dan Kab. Pangandaran	WKPP-IV wilayah Barat lebih didominasi kawasan perkotaan, perindustrian dan pemukiman. Sedangkan wilayah Timur masih didominasi lahan pertanian/perkebunan dengan aneka komoditas yang laku dipasaran ekspor.	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Produksi • Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan • Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian • Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan 	WKPP-IV Timur diperkirakan akan bisa mempertahankan kondisi lahan exsting perkebunan, tetapi di wilayah Barat akan mengalami desakan alih fungsi lahan karena perkembangan pemukiman, perindustrian dan perkotaan	Perlunya upaya-upaya yang kuat dalam mempertahankan kondisi luas lahan exsting perkebunan. Serta mendorong pengembangan agribisnis dan agroindustri non polutif sebagai bagian dari PKN Bandung Raya Pengembangan Desa Mandiri Energi (DME) Pengembangan PKWp Rancabuaya Pengembangan agribisnis dan agroindustri dalam mendukung PKW Pangandaran dan pengembangan PKNp Pangandaran

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota

Tabel 2.16
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS
Provinsi Jawa Barat terkait Pembangunan Sub Sektor Perkebunan

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan OPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan OPD
1	2	3	4	5
1.	Kapasitas daya dukung dan tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang nasional di P. Jawa akan ditekankan pada pengembangan jaringan jalan bebas hambatan, pengembangan jaringan jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, serta pengembangan jaringan jalan pengumpan yang meningkatkan keterkaitan antara kawasan di Pantai Selatan dengan kawasan atau perkotaan di Bagian Tengah dan Pantai Utara Pulau Jawa	Meningkatnya ancaman penyusutan lahan-lahan budidaya tanaman perkebunan sebagai dampak peningkatan aksesibilitas lahan di berbagai sudut ruang wilayah.	Meningkatkan upaya pengendalian luas lahan eksisting perkebunan melalui pengaturan kesesuaian lahan untuk komoditas perkebunan
2.	Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup	Kebijakan struktur dan pola ruang RTR P. Jawa-Bali harus memberi perhatian yang seimbang pada kepentingan non-ekonomi, yakni kepentingan sosial dan kepentingan lingkungan hidup	Meningkatnya pemahaman akan pentingnya sub sektor perkebunan sebagai salah satu sub sistem pelestarian lingkungan atau sebagai kawasan hidroorologis, sekaligus berfungsi sosial sebagai cadangan lapangan pekerjaan dan pencegahan urbanisasi	Meningkatkan produksi dan produktivitas yang bernilai tambah untuk menjamin ketersediaan pendapatan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan
3.	Kinerja layanan /jasa ekosistem	terjadinya pencemaran sungai di beberapa Sungai di Jawa Barat seperti Sungai Cikapundung di Kota Bandung, Sungai Bekasi di Kota Bekasi, Sungai Ciliwung di Kabupaten Bogor dan Kota Depok.	Semakin terbatasnya ketersediaan suply air baku yang layak untuk kebutuhan budidaya tanaman perkebunan	Perlunya pengembangan teknologi eksplorasi sumber air yang layak dan berwawasan lingkungan untuk kebutuhan budidaya tanaman perkebunan
4.	Efisiensi pemamfaatan sumber daya alam	Deforestasi intensitas tinggi berlangsung di areal penggunaan lain (APL), hutan produksi (HP), hutan produksi terbatas (HPT), hutan lindung (HL), dan hutan konservasi (HK).	Meningkatnya ancaman penyusutan lahan-lahan budidaya tanaman perkebunan akibat deforestasi dan okuvasi lahan HGU	Meningkatkan kemitraan pemanfaatan lahan-lahan marginal dan lahan perhutani melalui pola PHBM untuk pengembangan komoditas perkebunan
5.				

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan OPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan OPD
1	2	3	4	5
	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;	Menurunnya produksi dan produktivitas, serta meningkatnya emisi gas rumah kaca akibat metoda budidaya tanaman perkebunan yang kurang memperhatikan sistem budidaya ramah lingkungan	Meningkatkan pemahaman budidaya tanaman perkebunan yang memperhatikan efek gas rumah kaca
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	di dalam RaperPres RTR P. Jawa-Bali perhatian justru dicurahkan pada kawasan hutan konservasi (Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Margasatwa) dan kawasan hutan lindung. Deforestasi yang berlangsung di Areal Penggunaan Lain (APL), Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) justru luput dari perhatian.	Meningkatnya ancaman penyusutan plasma nutfah komoditas perkebunan	Meningkatkan pengelolaan potensi sumber daya perkebunan secara berkualitas dan berkesinambungan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perkebunan

Dalam pelaksanaan pembangunan Sub Sektor Perkebunan Provinsi Jawa Barat periode 2008-2013 masih terdapat beberapa hambatan dan permasalahan, sebagai berikut:

- Dalam aspek ketersediaan dan pemanfaatan SDA perkebunan, antara lain: (1) masih banyak pemanfaatan lahan untuk beberapa jenis komoditas perkebunan yang kurang sesuai dengan karakteristik topografi, jenis tanah, kondisi iklim dan sumberdaya pendukung sekitarnya, sehingga produktivitasnya tidak optimal serta sering terjadi gangguan usaha (longsor, banjir, kebakaran, serangan OPT dan okuvasi lahan); (2) Meningkatnya alih fungsi lahan dan alih komoditas ke non perkebunan; (3) Ketersedian kebun sumber benih bina dan non bina bina masih terbatas di Jawa Barat;
- Dalam aspek SDM, antara lain: (1) kompetensi dan keterampilan pelaku usaha perkebunan masih terbatas; (2) kurangnya tenaga teknis lapangan yang trampil; (3) Jumlah petugas fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Pengawas OPT masih kurang, sehingga berdampak terhadap lemahnya pengawasan kualitas benih dan penerapan Pengendalian Hama Terpadu;
- Dalam aspek Kebijakan, antara lain: (1) Masih banyak peraturan perundang-undangan yang terkait pembangunan sub sektor perkebunan belum dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya; (2) Pemanfaatan lahan HGU di Jawa Barat belum teratasi secara optimal disebabkan adanya regulasi pada pertanahan yang kurang mendukung untuk melaksanakan optimalisasi lahan HGU dengan komoditi yang prospektif selain tanaman yang disesuaikan dengan peruntukan haknya.
- Dalam aspek Sarana-prasarana, antara lain: Kuantitas serta kualitas ketersediaan sarana-prasarana teknis budidaya dan pengolahan hasil perkebunan masih belum seimbang dengan kebutuhan di lapangan;
- Dalam aspek teknologi, antara lain: pengembangan teknologi budidaya, teknologi pembenihan dan teknologi pengolahan hasil masih belum optimal dikembangkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan;
- Dalam aspek kelembagaan, antara lain: Sebagian besar kelembagaan petani baik poktan, gapoktan, maupun asosiasi, belum tertata dengan baik dari segi tatus kelembagaannya, manajemennya, sarana-prasarananya, permodalannya maupun penatausahaannya;

- Dalam aspek administrasi, antara lain: masih perlu ditingkatkannya mekanisme pengelolaan kegiatan agar mencapai target kinerja secara optimal, efektif dan efisien.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan terkini atau penyelesaian program pembangunan dari periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Karakteristik pembangunan perkebunan yang merupakan program pembangunan berkelanjutan yang harus dilaksanakan simultan setiap tahunnya, sehingga pelaksanaan program kegiatan merupakan juga upaya mempertahankan keberhasilan yang telah diperoleh dari tahun-tahun sebelumnya.

Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mengarah pada isu-isu strategis dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Perkebunan di Jawa Barat digunakan analisis SWOT. Penelitian menunjukkan bahwa kinerja suatu lembaga dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Analisis SWOT membandingkan antara faktor internal berupa *Kekuatan* (***Strengths***) dan *Kelemahan* (***Weaknesses***) dengan faktor eksternal *Peluang* (***Opportunities***) dan *Ancaman* (***Threats***). Analisis ini didasarkan pada logika bahwa, untuk dapat memaksimalkan *Kekuatan* dan *Peluang*, maka dalam waktu yang bersamaan harus dapat meminimalkan *Kelemahan* dan *Ancaman*, sehingga dengan teridentifikasinya faktor lingkungan tersebut penyusunan program kegiatan pembangunan perkebunan pada lima tahun kedepan dapat direncanakan secara lebih cermat dan realistis sesuai dengan faktor-faktor strategis yang ada di lingkungan kita.

Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil kajian terhadap capaian/kondisi saat ini dibandingkan dengan standar yang digunakan baik faktor yang mempengaruhi kewenangan Dinas maupun faktor yang mempengaruhi di luar

kewenangan Dinas yang diperkirakan akan menjadi permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Perkebunan, seperti yang digambarkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
1	2	3	4	5	6
Gambaran Pelayanan Disbun	Pembinaan, pengawasan dan pelayanan terhadap potensi areal eksisting perkebunan Jawa Barat seluas 510.570 Ha (Statistik 2012) dengan jumlah petani yang terlibat 1.472.674 KK.	Renstra Dinas Perkebunan 2013 – 2018	Sumber Daya Manusia (SDM) aparaturnya yang tersedia	Pengembangan sentra agribisnis di daerah dan revitalisasi tanaman	penguasaan konsep agribisnis masih rendah
	Pengembangan potensi lahan yang sesuai untuk pengembangan komoditi perkebunan masih cukup luas	Renstra Dinas Perkebunan 2013 – 2018	Road map komoditas utama Perkebunan, Standar teknis komoditi Perkebunan,	Aspek fisik (konservasi lahan dan air), aspek sosial ekonomi (peran lembaga sosial dan ekonomi pedesaan)	alih fungsi lahan pertanaman menjadi lahan non pertanian.
	Pembinaan, peningkatan SDM petani perkebunan serta kelembagaan petani Perkebunan Provinsi Jawa Barat terdiri Kelompok Tani Koperasi Petani Perkebunan dan Asosiasi Petani Komoditi Perkebunan	Renstra Dinas Perkebunan 2013 – 2018	Pedoman Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan	telah terbentuk asosiasi petani beberapa komoditi perkebunan	kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaku agribisnis Perkebunan masih rendah
	Pengembangan potensi komoditas perkebunan yang bernilai ekonomis (binaan komoditi perkebunan meliputi 127 komoditi dengan fokus Komoditi Unggulan 10 jenis, Komoditas Prospektif 11 jenis dan Komoditas Rintisan 9 jenis)	Renstra Dinas Perkebunan 2013 – 2018	Pedoman Pelaksanaan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK)	Jenis produk dan turunannya banyak serta pasar ekspor masih terbuka	Umumnya komoditas perkebunan sudah tua dan banyak yang rusak

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
1	2	3	4	5	6
	Pembinaan, pengawasan dan pelayanan terhadap usaha perkebunan besar (Perkebunan Besar Negara dan Perkebunan Besar Swasta) yang berjumlah 197 Perkebunan dengan luas 121.108 Ha	Renstra Dinas Perkebunan 2013 – 2018	UU No. 18 tahun 2004 tentang perkebunan BAB IX Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan pasal 44	keterkaitan antara lokal dan global, keterkaitan antar sektor, antar daerah	Manajemen internal PBN dan PBS yang secara tidak langsung membatasi kewenangan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan
	Pengembangan aset perkebunan di daerah yang masih dapat ditingkatkan fungsinya antara lain Kebun Induk Dinas Perkebunan (10 Lokasi)	Renstra Dinas Perkebunan 2013 – 2018	Fasilitasi dan pengelolaan Kebun Induk	Keterkaitan dengan instansi lain dan atau pemerintah setempat	Keterbatasan alokasi anggaran untuk pengembangan aset
	Peningkatan kerja sama dan peran lembaga perguruan tinggi, riset dan asosiasi komoditas sebagai fasilitator yang dapat difungsikan	Renstra Dinas Perkebunan 2013 – 2018	koordinasi antar stakeholder terkait	Ketersediaan dan kesiapan Lembaga/instansi terkait	Perbedaan orientasi pemikiran dan hasil
	Penyediaan, pengawasan peredaran serta peningkatan penggunaan bibit unggul perkebunan	Renstra Dinas Perkebunan 2013 – 2018	Permentan 39 tahun 2006 tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih bina	Tuntutan ketersediaan bibit unggul oleh petani	Keterbatasan SDM untuk melaksanakan fungsi pelayanan, banyaknya penangkar/ pengguna benih lokal yang tidak memenuhi standar mutu
	Penyediaan, pengawasan peredaran serta peningkatan penggunaan teknologi budidaya, pengolahan dan pemasaran komoditi perkebunan	Renstra Dinas Perkebunan 2013 – 2018	Bintek agribisnis dan pemasaran produk komoditi perkebunan	Adopsi teknologi , peran serta kelembagaan petani, inisiatif petani/pekebun	Terbatasnya SDM, fasilitas/ sarana prasarana pendukung

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
1	2	3	4	5	6
	Pengawasan peredaran sarana produksi terutama pupuk dan pestisida	Renstra Dinas Perkebunan 2013 – 2018	Pedoman Revitalisasi Perkebunan	Peranan pelaku usaha agribisnis (industri Pestisida/ Pupuk),	Ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk anorganik dan pestisida kimia serta banyaknya beredar pestisida palsu
	Peningkatan penyerapan dan kemampuan pengelolaan permodalan bagi usaha perkebunan	Renstra Dinas Perkebunan 2013 – 2018	Pedoman pengembalian kredit Pola UPP Perkebunan	Kebijakan Perbankan dan atau Lembaga keuangan resmi lainnya, Orientasi usaha tani/perkebunan	Keterbatasan fasilitas dan anggaran,
Kajian terhadap renstra Disbun	Penyediaan benih tanaman perkebunan sebanyak 70.000 pohon	Renstra Dinas Perkebunan 2013 – 2018	Fasilitasi pengawasan dan penyediaan benih unggul	Peredaran benih asalan, peran serta penangkar benih	Terbatasnya ketersediaan benih unggul, belum optimalnya penggunaan benih unggul, keterbatasan penyediaan sarana produksi lainnya
	Pengawasan dan pengujian benih tanaman perkebunan sebanyak 35.000.000 pohon	Renstra Dinas Perkebunan 2013 – 2018	Anjuran harus menggunakan benih unggul bermutu	Beredarnya penggunaan benih asalan, tidak bermutu	pengetahuan petani terhadap konsep agribisnis masih rendah

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
1	2	3	4	5	6
	Pembinaan agribisnis dan produksi komoditi unggulan perkebunan melalui intensifikasi 250 Ha, rehabilitasi 100 Ha, diversifikasi 100 Ha, perluasan/peremajaan 100 Ha.	Renstra Dinas Perkebunan 2013 – 2018	Pencanangan Program Kegiatan intensifikasi, Rehabilitasi dan diversifikasi komoditas Perkebunan	Dukungan dan Fasilitas dari Pemerintah Kabupaten	sumber daya (SDM, teknologi, sarana dan prasarana serta dana) yang jumlahnya terbatas
	Penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan di 15 Kab/Kota	Renstra Dinas Perkebunan 2013 – 2018	Tupoksi BPTP	Teknologi tepat guna dan Litbang telah tersedia	Pemahaman dan penyerapan teknologi proteksi (perlindungan tanaman perkebunan) oleh petani
	Menurunnya kerugian akibat gangguan usaha perkebunan di 18 Kab/Kota	Renstra Dinas Perkebunan 2013 – 2018	Kinerja Pelaksanaan Tupoksi Petugas, Program SL-PHT	Kapabilitas pelaku usaha perkebunan, adopsi teknologi pengendalian, Kondisi alam (perubahan iklim/cuaca), tingkat serangan OPT	Upaya dan analisis yang belum komprehensif karena terdapat banyak faktor pembatas
	Jumlah komoditi yang menggunakan UPH sesuai standar teknis sebanyak 4 komoditi	Renstra Dinas Perkebunan 2013 – 2018	Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang terutama untuk budidaya dan pasca panen	Peran serta pelaku usaha perkebunan	Standar pengolahan hasil, teknologi pengolahan hasil yang masih relatif sederhana
	Fasilitasi 1 komoditi pengolahan dan mutu hasil olahan tembakau	Renstra Dinas Perkebunan 2013 – 2018	Input Anggaran dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT)	Kerjasama dengan mitra usaha, Penentuan standar mutu oleh pihak lain (mitra usaha, pabrik)	Orientasi hasil petani tembakau, Keterlibatan banyak pihak dalam usaha tani tembakau
	Promosi, pemasaran dan kemitraan usaha produk unggulan perkebunan sebanyak 7 kali	Renstra Dinas Perkebunan 2013 – 2018	Membangun kekuatan antar subsistem agribisnis	Membentuk lembaga petani yang dapat mendukung posisi tawar menawar	Meningkatkan dan mengembangkan pemasaran produk yang dihasilkan

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
1	2	3	4	5	6
	SDM perkebunan dan pelaku usaha perkebunan yang berkualitas bertambah sebanyak 1.475 orang	Renstra Dinas Perkebunan 2013 – 2018	Fasilitasi, Pembinaan, pendampingan dan pelatihan terhadap pelaku usaha perkebunan	Motivasi dari para pelaku usaha perkebunan, Kegiatan Pengembangan SDM (Diklat) yang diselenggarakan pihak perusahaan	Keterbatasan jumlah dan kompetensi petugas (SDM)
	Peningkatan kelembagaan petani sebanyak 14 kelompok	Renstra Dinas Perkebunan 2013 – 2018	Menata dan mengembangkan kelembagaan petani terutama dalam pemasaran produk	telah terbentuk asosiasi petani beberapa komoditi perkebunan	Peran kelembagaan petani belum optimal, Keterbatasan jumlah dan kompetensi petugas (SDM)
	Tertata Lahan potensial untuk pengembangan komoditi perkebunan di 18 Kab/Kota	Renstra Dinas Perkebunan 2013 – 2018	Menata kesesuaian lahan dengan kesesuaian komoditi	Aspek fisik (konservasi lahan, air dan iklim), aspek sosial ekonomi (peran lembaga sosial dan ekonomi pedesaan)	sumber daya (SDM, teknologi, sarana dan prasarana serta dana) yang jumlahnya terbatas, Perubahan Iklim global
Kajian terhadap renstra K/L	Luas areal komoditas unggulan nasional baru tercapai 20.394.34 ha	Renstra K/L	Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel)	Aspek fisik (konservasi lahan, air dan iklim), aspek sosial ekonomi (peran lembaga sosial dan ekonomi pedesaan)	Keterbatasan SDM, ketersediaan lahan untuk perluasan perkebunan, sertifikasi lahan belum berjalan dengan baik, keterbatasan dana,
	Produksi komoditas unggulan nasional baru tercapai 34.620,47 ton	Renstra K/L	Program Revitalisasi, Gerakan Nasional dan Program Pengembangan Komoditas Perkebunan	kondisi alam (lahan, iklim/cuaca, bencana alam), Adopsi teknologi budidaya, Explosi OPT	Keterbatasan SDM, ketersediaan lahan , dana, infrastruktur yang tdk memadai, belum optimalnya penggunaan benih unggul, serangan OPT, dominasi tan rusak

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
1	2	3	4	5	6
	Produktivitas komoditas unggulan nasional baru tercapai 16.000 kg/ha	Renstra K/L	Penetapan Fokus kegiatan pembangunan Perkebunan	kondisi alam (lahan, iklim/cuaca, bencana alam), Adopsi teknologi budidaya, Explosi OPT	Keterbatasan SDM, ketersediaan lahan , dana, infrastruktur yang tdk memadai, belum optimalnya penggunaan benih unggul, serangan OPT, dominasi tan rusak
	Rata-rata capaian jumlah populasi tanaman 76 %	Renstra K/L	Program Revitalisasi, Gerakan Nasional dan Program Pengembangan Komoditas Perkebunan	kondisi alam (lahan, iklim/cuaca, bencana alam), Adopsi teknologi budidaya, Explosi OPT	sumber daya (SDM, teknologi, sarana dan prasarana serta dana) yang jumlahnya terbatas
	Rata-rata capaian luas penanggulangan serangan OPT 32 %	Renstra K/L	Kajian/Kegiatan ujicoba/pengendalian OPT, Program SL-PHT	Fenomena perubahan iklim, terjadinya migrasi atau muncul OPT baru	Pemahaman pelaksanaan dan adopsi teknologi Pengendalian OPT oleh Petani masih rendah, teknologi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim bagi sub sektor perkebunan belum begitu berkembang
	Rata-rata capaian penggunaan benih unggul bermutu/bersertifikat 45 %	Renstra K/L	Permentan 39 tahun 2006 tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih bina	Peredaran dan penggunaan benih tidak bersertifikat	Pemahaman dan penggunaan benih bersertifikat yang masih kurang, ketersediaan benih unggul masih terbatas
	Peningkatan produksi kakao fermentasi bermutu tinggi sebesar 20 %	Renstra K/L	Gerakan Nasional Kakao	Penetapan Bea Keluar Ekspor Kakao	Masih rendahnya mutu kakao

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
1	2	3	4	5	6
	Peningkatan prosentase karet (bokar) yang sesuai SNI sebesar 30 %	Renstra K/L	Peraturan Menteri Pertanian No 38/2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (BOKAR).	Standarisasi Bokar, Sarana Prasarana pasca panen, Kontribusi Kelembagaan petani (Asosiasi Pedagang Bokar)	Produksi dan kualitas karet yang masih relatif rendah, pencemaran karet Vulkanisat
	Peningkatan CPO yang diolah menjadi produk turunannya sebesar 20 %	Renstra K/L	Program diversifikasi produk hilir berbasis minyak sawit mentah (CPO)	Investasi industri hilir CPO, fluktuasi harga CPO di luar negeri, Liberalisasi Pasar Global	masih minimnya Teknologi pengolahan CPO
	Pertumbuhan ekspor kakao 10,66% per tahun	Renstra K/L	Regulasi terkait ekspor Kakao	Perubahan orientasi ekspor, Daya beli konsumen, Aturan impor kakao yang ditetapkan Uni Eropa, Liberalisasi Pasar Global	Produtivitas dan kualitas kakao masih relatif rendah
	Pertumbuhan ekspor karet 5,16% per tahun	Renstra K/L	Regulasi terkait ekspor Kakao	Adanya penentuan standar mutu karet ekspor, Harga karet Dunia, Kondisi alam (cuaca, lahan) yang mempengaruhi produksi karet, Liberalisasi Pasar Global	Produtivitas dan kualitas karet masih relatif rendah, keterbatasan jenis dan produk olahan karet
	Pertumbuhan ekspor kopi 11,48% per tahun	Renstra K/L	Regulasi terkait ekspor Kakao	Kondisi (sosial, ekonomi) dan Stabilitas negara importir, peranan kelembagaan (Asosiasi eksportir kopi), Faktor alam (iklim/cuaca) terkait perubahan pola tanam dan panen	Produtivitas dan kualitas kopi masih relatif rendah
	Capaian peningkatan Jalan Usahatani (JUT) pada kawasan tanaman pangan dan hortikultura dan jalan produksi pada tanaman perkebunan dan peternakan 3.165 km	Renstra K/L	Revitalisasi infrastruktur dan sarana	Kontribusi masyarakat/petani (dana swadaya, tenaga kerja), pemanfaatan Jalan Usaha Tani (JUT)	Keterbatasan dana pengembangan dan pemeliharaan

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
1	2	3	4	5	6
	Capaian perkembangan sumber air alternatif skala kecil untuk komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan 877 unit	Renstra K/L	Revitalisasi infrastruktur dan sarana	Budaya baik Pekebun (ketergantungan terhadap anggaran dari pemerintah	Keterbatasan Anggaran/Dana
	Capaian optimalisasi pemanfaatan air irigasi 118 ha	Renstra K/L	Revitalisasi infrastruktur dan sarana	Budaya Pekebun dan petugas sebagai pembina	Keterbatasan Anggaran/Dana
	Capaian sarana dan prasarana konservasi air 62 unit	Renstra K/L	Revitalisasi infrastruktur dan sarana	Peran serta masyarakat, faktor fisik (ketersediaan sumber air)	Keterbatasan Anggaran/Dana, infrastruktur yang belum memadai
	Capaian pengembangan pengelolaan irigasi partisipatif 9 paket	Renstra K/L	Revitalisasi infrastruktur dan sarana	Partisipasi masyarakat/pekebun/ pelaku usaha perkebunan	Keterbatasan Anggaran/Dana
	Capaian pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan petani pengelola air sebanyak 115 orang	Renstra K/L	Revitalisasi kelembagaan petani	Budaya Pekebun dan petugas sebagai pembina	Ketergantungan kelembagaan petani/pekebun thdp pemerintah yang masih tinggi, terbatasnya jumlah dan kapasitas petugas

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
1	2	3	4	5	6
Kajian terhadap RTRW	Kondisi saat ini yang termasuk kedalam Kawasan Budidaya tanaman perkebunan berada pada 26 Kab/Kota (Kab. Bogor, Sukabumi, Karawang, Bekasi, Cianjur, Bandung, Bandung Barat, Cimahi, Subang, Purwakarta, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Cirebon, Kota Banjar, Kota Tasikmalaya, Depok, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Indramayu, Sumedang)	Perda No. 22 tahun 2010	menekankan keseimbangan antara pemanfaatan ruang dengan pengelolaan dampaknya	Adanya Otonomi Daerah, Kondisi alam (ketersediaan lahan perkebunan), kondisi sosial ekonomi masyarakat (orientasi kegiatan perkebunan)	Potensi dampak negatif yang akan timbul sebagai akibat dari usulan kebijakan, rencana, atau program
Kajian KLHS	Penerapan Pengendalian Hama Terpadu dan Pengembangan Metode yang Berwawasan Lingkungan	Hasil KLHS	menekankan keseimbangan pemanfaatan perlindungan dan pemulihan cadangan sumber daya alam	instrumen untuk mencegah pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan.	kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaku agribisnis Perkebunan masih rendah penguasaannya terhadap konsep PHT
	Konservasi Lahan kawasan DAS dan lahan-lahan kritis	Hasil KLHS	menekankan aplikasi keseimbangan antar laju pembangunan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Memelihara potensi sumber daya alam dan daya dukung air, udara, tanah dan ekosistem	model pengembangan DAS terpadu harus mempertimbangkan aktifitas/teknologi pengelolaan DAS sebagai satuan unit perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pembangunan di Jawa Barat memasuki tahap kedua RPJP Daerah atau RPJM Daerah tahun 2013-2018 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Posisi Jawa Barat yang strategis dan berdekatan dengan ibukota negara, mendorong Jawa Barat berperan sebagai *agent of development* (agen pembangunan) bagi pertumbuhan nasional.

Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat Jawa Barat.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Jawa Barat serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Pemerintah Daerah pada tahun 2013 – 2018 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat adalah :

"JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA".

Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, untuk mencapai masyarakat Jawa Barat yang mandiri, dinamis dan sejahtera, maka rumusan Misi Provinsi Jawa Barat dalam rangka pencapaian Visi Jawa Barat 2018 ditetapkan dalam 5 (lima) Misi. Misi kedua merupakan Misi yang terkait dengan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, adapun Misi Kedua tersebut adalah ;

Misi Kedua : **Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan**

Penjelasan Misi : Perekonomian Jawa Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis ekonomi pertanian dan non

- pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
- Tujuan Misi : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi disparitas ekonomi antarwilayah
- Sasaran Misi : 1. Jawa Barat sebagai daerah pertanian berbasis agrikultur;
2. Meningkatnya daya saing usaha pertanian;
3. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi;
4. Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan;
5. Meningkatnya pembangunan ekonomi perdesaan dan regional.
- Strategi : Strategi dalam pencapaian sasaran misi 2 yang terkait dengan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat yaitu Meningkatkan produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan dan peternakan.
- Kebijakan : Kebijakan Bidang yang terkait dengan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat ;
1. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, perkebunan dan peternakan.
2. Peningkatan kinerja sumberdaya dan kelembagaan pertanian, perkebunan dan peternakan.
3. Peningkatan kualitas pengendalian hama dan penyakit tanaman dan ternak.
4. Pengembangan usaha dan sarana prasarana pengolahan serta pemasaran produk pertanian, perkebunan dan peternakan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perkebunan terkait dengan misi ke 2 dan untuk mensukseskan pencapaian misi ini Dinas Perkebunan mengimplementasikan program peningkatan produksi pertanian, program pemberdayaan sumberdaya pertanian, program pencegahan dan penanggulangan penyakit tanaman, ternak dan ikan serta program pemasaran dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan pelayanan antara lain:

- a. Jumlah dan kualitas SDM terbatas sehingga pelaksanaan kegiatan kurang efektif, terutama dalam kegiatan pengendalian, evaluasi dan analisis data kegiatan.
- b. Masih terbatasnya sarana-prasarana pendukung terutama pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyampaian laporan.
- c. Belum dipahaminya fungsi laporan sehingga kualitas laporan yang disampaikan belum sesuai dengan yang diharapkan.
- d. Terdapatnya inkonsistensi program kegiatan yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdampak pada kesinambungan pembinaan kegiatan perkebunan

Faktor – faktor penghambat yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan Tabel 3.2 adalah:

- a. Belum semua kegiatan terfasilitasi dengan dana yang memadai
- b. Sosialisasi ketentuan perundangan yang berlaku masih kurang
- c. Pedoman teknis yang ada sering ketinggalan zaman, perlu disesuaikan kondisi saat ini
- d. Masih rendahnya produksi dan produktivitas perkebunan rakyat.
- e. Banyaknya areal tanaman tua dan tidak produktif yang belum diremajakan/ rehabilitasi.
- f. Belum terpenuhinya kebutuhan benih bermutu dan bersertifikat.
- g. Masih lemahnya kemampuan kelembagaan petani
- h. Belum terbentuknya jaringan sistem usaha agribisnis diantara sub sistem agribisnis yang ada.
- i. Mulai berlakunya pengenaan tarif perdagangan pada beberapa komoditas perkebunan di beberapa kawasan dunia.
- j. Belum mandiriya petani dalam penerapan pengendalian hama terpadu.
- k. Kesadaran penggunaan benih unggul bermutu masih kurang.

Faktor – faktor pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan Tabel 3.2 adalah:

- a. Tersedianya tenaga PPNS, PBT (Pengawas Benih Tanaman)
- b. Mengoptimalkan fungsi UPTD

- c. Meningkatkan pengelolaan sumber benih di 13 kebun dinas yang terdapat di 10 Kab/Kota
- d. Mengoptimalkan kegiatan sub unit perlintanbun
- e. Potensi lahan yang sesuai untuk pengembangan perkebunan masih cukup luas.
- f. Produksi beberapa komoditas perkebunan merupakan pangsa pasar dunia (antara lain Teh, Karet, Kina, Kopi, Kakao dan minyak Atsiri)
- g. Tersedianya asset perkebunan di daerah yang masih dapat ditingkatkan fungsinya.
- h. Lembaga perguruan tinggi, riset dan asosiasi komoditas sebagai fasilitator yang dapat difungsikan.
- i. Penggunaan bibit unggul yang bermutu semakin diminati.
- j. Dukungan kebijakan pengembangan komoditi perkebunan yang memadai.
- k. Komoditas perkebunan memberikan peluang penyerapan tenaga kerja.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perkebunan
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Misi 2 : Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan	<p>Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perkebunan terkait dengan misi ke 2 dan untuk mensukseskan pencapaian misi ini Dinas Perkebunan mengimplementasikan progam; Program peningkatan produksi pertanian, pemberdayaan sumberdaya pertanian, pencegahan dan penanggulangan penyakit tanaman, ternak dan ikan serta program pemasaran dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan pelayanan antara lain:</p> <p>a. Jumlah dan kualitas SDM terbatas sehingga pelaksanaan kegiatan kurang efektif, terutama dalam kegiatan pengendalian, evaluasi dan analisis data kegiatan.</p>	Belum semua kegiatan terfasilitasi dengan dana yang memadai	Tersedianya tenaga PPNS, PBT (Pengawas Benih Tanaman)
			Sosialisasi ketentuan perundangan yang berlaku masih kurang	Mengoptimalkan fungsi UPTD
1.	Program peningkatan produksi pertanian		Pedoman teknis yang ada sering ketinggalan zaman, perlu disesuaikan kondisi saat ini	Meningkatkan pengelolaan sumber benih di 13 kebun dinas yang terdapat di 10 Kab/Kota
2.	Program pemberdayaan sumberdaya pertanian			
3.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tanaman, ternak dan ikan		Masih rendahnya produksi dan produktivitas perkebunan rakyat.	Mengoptimalkan kegiatan sub unit perlintanbun
4.	Program pemasaran dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan		Banyaknya areal tanaman tua dan tidak produktif yang belum diremajakan /rehabilitasi.	Potensi lahan yang sesuai untuk pengembangan perkebunan masih cukup luas.
			Belum terpenuhinya kebutuhan benih bermutu dan bersertifikat.	Produksi beberapa komoditas perkebunan merupakan pangsa

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
		b. Masih terbatasnya sarana-prasarana pendukung terutama pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyampaian laporan.		pasar dunia (antara lain Teh, Karet, Kina, Kopi, Kakao dan minyak Atsiri)
		c. Belum dipahaminya fungsi laporan sehingga kualitas laporan yang disampaikan belum sesuai dengan yang diharapkan.	Masih lemahnya kemampuan kelembagaan petani	Tersedianya asset perkebunan di daerah yang masih dapat ditingkatkan fungsinya.
		d. Terdapatnya inkonsistensi program kegiatan yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdampak pada kesinambungan pembinaan kegiatan perkebunan	Belum terbentuknya jaringan sistem usaha agribisnis diantara sub sistem agribisnis yang ada.	Lembaga perguruan tinggi, riset dan asosiasi komoditas sebagai fasilitator yang dapat difungsikan.
			Mulai berlakunya pengenaan tarif perdagangan pada beberapa komoditas perkebunan di beberapa kawasan dunia. Belum mandiri petani dalam penerapan pengendalian hama terpadu. Kesadaran penggunaan benih unggul bermutu masih kurang.	Penggunaan bibit unggul yang bermutu semakin diminati. Dukungan kebijakan pengembangan komoditi perkebunan yang memadai. Komoditas perkebunan memberikan peluang penyerapan tenaga kerja.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perkebunan ditinjau dari sasaran jangka menengah renstra K/L disajikan pada Tabel 3.3 sementara faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perkebunan ditinjau dari sasaran jangka menengah renstra Kabupaten/Kota disajikan pada Tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan dorongan Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Luas areal (Ha) komoditas unggulan nasional (kelapa sawit, kakao, karet, kelapa, kopi, tebu, jambu mete, cengkeh, teh, tembakau, kapas, lada, jarak pagar, nilam, kemiri sunan)	Belum optimalnya pembinaan kepada petani karena perbandingan luasan dengan SDM yang ada belum seimbang	Petugas lapangan terbatas, otonomi daerah, belum ada badan penyuluhan di tingkat Provinsi	Rekrutmen petugas pendamping, koordinasi mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten
2	Produksi komoditas unggulan nasional (ton) (kelapa sawit, kakao, karet, kelapa, kopi, tebu, jambu mete, cengkeh, teh, tembakau, kapas, lada, jarak pagar, nilam, kemiri sunan)	Belum bisa mengakses dalam mempengaruhi harga sarana prasarana perkebunan	Bukan kewenangan Disbun	Diberi kewenangan
3	Produktivitas (kg/ha) komoditas unggulan nasional (kelapa sawit, kakao, karet, kelapa, kopi, tebu, jambu mete, cengkeh, teh, tembakau, kapas, lada, jarak pagar, nilam, kemiri sunan)	Belum optimalnya penerapan teknologi budidaya yang telah disampaikan kepada petani	Belum semua petani menggunakan bibit unggul dan bermutu, keterbatasan pengetahuan, keterampilan dan sikap (PKS)	Pelatihan/pengembangan SDM perkebunan
4	Mutu pertanaman (%) (jumlah populasi tanaman, luas serangan OPT dan penggunaan benih unggul bermutu/bersertifikat)	Ketersediaan benih bermutu memerlukan proses yang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan belum optimalnya penerapan pengamatan dini OPT	Memerlukan waktu dalam proses pembuatan benih dan pemahaman dalam penerapan PHT masih kurang	Dukungan Balai Penelitian Pusat dan Daerah
5	Peningkatan produksi kakao fermentasi bermutu tinggi sebesar 50 % pada akhir tahun 2014	Harga kakao yang difermentasi maupun yang tidak difermentasi tidak signifikan	Penetapan harga jual produk masih ditentukan oleh pembeli/ tengkulak	Kemitraan
6	Peningkatan prosentase karet (bokar) yang sesuai SNI sebesar 50%	Belum tersosialisasikan secara menyeluruh SNI bokar	Prilaku petani belum berubah	Pelatihan dan pembinaan
7	Peningkatan CPO yang diolah menjadi produk turunannya sebanyak 50%	-	-	-
8	Pertumbuhan ekspor kakao 15% (volume) per tahun	-	-	-
9	Pertumbuhan ekspor karet 10% (volume) per tahun	-	-	-

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
10	Pertumbuhan ekspor kopi 15% (volume) per tahun	-	-	-
11	Peningkatan Jalan Usahatani (JUT) pada kawasan tanaman pangan dan hortikultura dan jalan produksi pada tanaman perkebunan dan peternakan	Swadaya masyarakat masih kurang	Daya beli masyarakat masih rendah	Peningkatan multi aktivitas
12	Berkembang sumber air alternatif skala kecil untuk komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Sumber air debitnya terbatas	Penyerapan air tanah semakin berkurang	Konservasi, reboisasi dan rehabilitasi
13	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan air irigasi	Kebocoran disaluran tersier irigasi, belum efisien dalam penggunaan air untuk tanaman	Infrastruktur irigasi sudah tidak memadai	Dukungan instansi terkait
14	Terwujudnya upaya konservasi air	-	-	-
15	Terwujudnya pemberdayaan petani pemakai air kelompok tani	Pengaturan pemakaian air masih didominasi oleh P3A kelompok tanaman pangan	Kelompok P3A belum polifalen	Sosialisasi dan penyuluhan
16	Meningkatnya kualitas koordinasi kelembagaan dalam menangani masalah lahan dan air	-	-	-

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi berdasarkan Sasaran Renstra OPD Kabupaten/Kota
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra OPD Kabupaten/Kota	Permasalahan Pelayanan Dinas Perkebunan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya profesionalisme SDM perkebunan dalam setiap sub sistem agribisnis	Belum seluruh SDM perkebunan mendapat kesempatan pelatihan	Fasilitasi dana terbatas	Melaksanakan pendidikan dengan dana swadaya
2	Meningkatnya produksi dan produktivitas perkebunan	Belum optimalnya penerapan teknologi budidaya yang telah disampaikan kepada petani	Belum semua petani menggunakan bibit unggul dan bermutu, keterbatasan pengetahuan, keterampilan dan sikap (PKS)	Pelatihan/pengembangan SDM perkebunan
3	Meningkatnya mutu produk perkebunan	Standar mutu yang ditentukan oleh pabrikan/pengolah/mitra belum ditaati	Prilaku petani yang ingin segera mendapatkan uang	Penyuluhan dan pembinaan yang berkelanjutan
4	Meningkatnya kawasan lahan dan tegakan komoditi perkebunan	Alih fungsi lahan dan konversi komoditi	Semakin bertambahnya jumlah penduduk dan tuntutan pasar	Optimalisasi lahan tersedia
5	Meningkatnya pengolahan hasil perkebunan	Pengolahan hasil masih ada yang belum sesuai standar	Unit pengolah hasil masih banyak yang konvensional	Fasilitasi unit pengolah hasil yang sesuai standar
6	Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk perkebunan	Belum seluruh produk turunan dapat dimanfaatkan	Teknologi dan pengetahuan masih kurang	Pembinaan dan pendidikan
7	Meningkatnya kemampuan kelembagaan petani	Masih kurangnya pemahaman tentang manfaat dari kelembagaan	Kepentingan pribadi lebih diutamakan	Pembinaan dan pelatihan kelembagaan
8	Meningkatnya kemandirian petani dan pelaku agribisnis	Tingkat ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah masih tinggi	Tingkat swadaya dari petani masih kurang	Pembinaan dan penyuluhan yang kontinue
9	Peningkatan penggunaan benih unggul dan terbinanya kelompok penangkar benih	Benih yang beredar masih banyak yang belum bersertikat	Masih rendahnya pemahaman tentang penggunaan benih unggul bermutu	Sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan
10	Intensifikasi, rehabilitasi, peremajaan, pengembangan dan diversifikasi tanaman perkebunan	Belum seluruhnya kegiatan terfasilitasi	Keterbatasan dana, prasarana dan sarana	Swadaya petani dan optimalisasi prasara dan sarana yang ada
11	Tersedia data potensi lahan perkebunan	Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang kompeten	Pengangkatan dan penempatan SDM belum sesuai berkopetensinya	Mengoptimalkan SDM yang ada

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perkebunan ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disajikan pada Tabel 3.6 dan Tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Perkebunan Berdasarkan Telaahan Rencana
Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganan

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan	Permasalahan Pelayanan Dinas Perkebunan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Kawasan Budidaya (Kab. Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Bandung Barat, Subang, Purwakarta, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Indramayu, Sumedang)	Regulasi tata ruang masih belum mengakomodir kabupaten yang potensial komoditi perkebunan	Informasi RTRW antara Kabupaten/Kota dan Provinsi belum sinergis	Meningkatkan sinergitas dalam RTRW

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan Dinas Perkebunan berdasarkan Analisis KLHS berdasarkan Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan	Permasalahan Pelayanan Dinas Perkebunan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Mengarusutamakan pertimbangan lingkungan hidup dan keberlanjutan pada Kebijakan (Policy), Rencana (Plan) dan Program (Programme) pembangunan	masih rendahnya kepedulian dan kapasitas pelaku usaha/kegiatan dalam menerapkan praktek-praktek usaha/kegiatan yang berwawasan lingkungan	masih banyak masyarakat yang belum memiliki pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kepedulian dan sikap yang mencerminkan penataan terhadap lingkungan	Ketersediaan lahan potensial yang cukup luas
2	Pertimbangan prinsip keterkaitan, keberlanjutan dan keadilan di dalam rumusan kebijakan, rencana dan program pembangunan dan pengembangan perkebunan	kurangnya kapasitas pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam melakukan program penataan lingkungan yang efektif	Keterbatasan Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana dan prsarana	Ketersediaan Sumber Daya Manusia (Petani) yang sangat banyak/mayoritas
3	Keseimbangan antara Pertumbuhan ekonomi dengan konservasi keanekaragaman hayati (kehati)	masih kurangnya fungsi kontrol dari masyarakat terhadap upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pelaku usaha/kegiatan maupun oleh pemerintah.	Ketersediaan dan mutu data yang kurang memadai dalam kehati	Pangsa pasar komoditi perkebunan masih terbuka luas dan permintaan pasar terus meningkat

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam penentuan isu strategis ini terlebih dahulu dilakukan identifikasi isu-isu strategis lingkungan eksternal baik yang mempengaruhi dinamika internasional, dinamika nasional maupun dinamika regional/lokal dikaitkan dengan faktor-faktor pelayanan Dinas Perkebunan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perkebunan ditinjau dari; gambaran pelayanan Dinas Perkebunan, sasaran jangka menengah pada renstra K/L, sasaran jangka menengah dari renstra Dinas Perkebunan dan renstra Kabupaten/Kota, implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bagi pelayanan Dinas Perkebunan dan implikasi Kejian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bagi pelayanan Dinas Perkebunan sehingga diperoleh informasi tentang apa saja yang menjadi isu strategis Dinas Perkebunan yang akan ditangani melalui renstra Dinas Perkebunan pada tahun rencana seperti yang disajikan pada Tabel 3.4, Tabel 3.5 dan Tabel 3.6, sehingga diperoleh 12 (dua belas) isu strategis Dinas Perkebunan seperti pada tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Pengetahuan Mengenai Globalisasi dan Liberalisasi Perdagangan	Peningkatan Kinerja Perkebunan	Peningkatan pemerataan pembangunan & pengembangan perkebunan	-
2	Peningkatan Daya Saing Komoditas Perkebunan Indonesia	Peningkatan Nilai dan mutu Usaha Perkebunan	Pengembangan kemitraan/kelembagaan usaha tani/perkebunan	-
3	Penerapan IPTEK untuk Pembangunan/Pengembangan Perkebunan	Evaluasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Perkebunan	Peningkatan dan pemerataan sarana prasarana yang mendukung usaha perkebunan	-
4	Penentuan Standar Tekhnis yang Ketat untuk Produk Perkebunan	Peningkatan Produktivitas Komoditas Perkebunan	Peningkatan penguasaan penerapan IPTEK dalam bidang perkebunan	-
5	Membuka Akses Pasar Produk Pertanian antar Negara	Peningkatan Fasilitas dan Perlindungan Perkebunan Rakyat	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan perkebunan	-
6	Pemberian Subsidi Domestik Terhadap Negara-Negara Berkembang	Memperbaiki Mekanisme Pasar	Peningkatan tata kelola dan kualitas layanan publik pemerintahan terkait sektor perkebunan	-
7	Penetapan Level Subsidi Ekspor	Mengatasi Krisis Multidimensi yang Memicu Terjadinya Konflik Sosial di Daerah Perkebunan	Pembangunan perkebunan yang terintegrasi, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	-

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1	2	3	4	5
8	Peningkatan Ketahanan Pangan	Meningkatkan Daya Saing Industri dan Produk Perkebunan Indonesia	Peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat sektor pertanian/perkebunan	-
9	Perluasan dan Penyeragaman Fungsi Pertanian	Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan	-
10	Pengembangan Kelembagaan Mengenai Perkebunan	Adopsi dan Penerapan IPTEK untuk Pembangunan/Pengembangan Perkebunan	Pemberdayaan kelembagaan petani perkebunan dan pelaku perkebunan	-
11	Peningkatan Efektivitas Pemanfaatan Hasil Riset Perkebunan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Bimbingan Teknis/Pendidikan dan Latihan	-
12	Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkebunan	Penumbuhan Kelembagaan Petani dan Pengembangan Kemitraan Usaha Tani	Kemitraan Usaha dengan Perkebunan Besar	-
13	Pengintegrasian Usaha Perkebunan	Penyusunan Pedoman bagi Daerah Terkait Otonomi Daerah (OTDA)	Peraturan Gubernur (PERGUB), Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK)	-
14	Peningkatan Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan	Konservasi Sumber Daya Lahan	Kesesuai Lahan dan Komoditi	-
15	Pengembangan Sistem dan Usaha Agribisnis Perkebunan yang Sinergis	Integrasi Usaha Agribisnis Perkebunan	Integrasi Usaha Agribisnis Perkebunan	-
16	Pengembangan Informasi Agribisnis	Pengembangan Pusat Data dan Informasi Agribisnis Perkebunan	Sistem Pengembangan data dan Informasi Perkebunan	-

Tabel 3.8
Contoh Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No.	Kriteria*)	Bobot**)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran renstra K/L atau Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	15
3	Dampak yang ditimbulkan terhadap public	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	10
	Total	100

*) Urutan dan jumlah Kriteria dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Tabel 3.9
Nilai Skala Kriteria

No.	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria Ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Usaha Budidaya Komoditas Unggulan Tanaman Perkebunan	20	15	14	20	10	10	89
2	Meningkatnya Pengembangan Teknologi Budidaya Tanaman Perkebunan	19	15	20	17	10	1	82
3	Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	17	9	9	17	7	6	65
4	Meningkatnya Pemanfaatan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	17	15	7	14	8	1	62
5	Terkendalnya Gangguan Usaha Perkebunan	19	15	10	17	5	1	67
6	Meningkatnya penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan	20	13	15	20	15	2	85
7	Meningkatnya Kemantapan Kelembagaan, SDM dan Dukungan Permodalan dalam Pengelolaan Potensi Sumber Daya Perkebunan	16	15	11	20	12	3	77
8	Meningkatnya Keseuaian Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Perkebunan	16	15	7	6	8	2	54
9	Meningkatnya kesempatan berusaha pada sub Sektor perkebunan melalui pencetakan wirausaha baru	14	13	9	5	12	2	55
10	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk perkebunan melalui pengembangan pengolahan dan peningkatan mutu hasil	14	11	11	20	14	1	71

11	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Tata Niaga Produk perkebunan	14	8	11	20	6	4	63
12	Meningkatnya pelayanan pengembangan usaha perkebunan	16	9	10	12	6	6	59

Tabel 3.10
Rata-rata Skor Isu-isu Strategis

No.	Isu-isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
1	2	3	4
1	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Usaha Budidaya Komoditas Unggulan Tanaman Perkebunan	623	89*)
2	Meningkatnya Pengembangan Teknologi Budidaya Tanaman Perkebunan	574	82***)
3	Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	455	65
4	Meningkatnya Pemanfaatan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	434	62
5	Terkendalinya Gangguan Usaha Perkebunan	469	67
6	Meningkatnya penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan	595	85**)
7	Meningkatnya Kemantapan Kelembagaan, SDM dan Dukungan Permodalan dalam Pengelolaan Potensi Sumber Daya Perkebunan	539	77
8	Meningkatnya Keseuaian Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Perkebunan	378	54
9	Meningkatnya kesempatan berusaha pada sub Sektor perkebunan melalui pencetakan wirausaha baru	385	55
10	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk perkebunan melalui pengembangan pengolahan dan peningkatan mutu hasil	497	71

11	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Tata Niaga Produk perkebunan	441	63
12	Meningkatnya pelayanan pengembangan usaha perkebunan	413	59

Keterangan :

*) Prioritas I, **) Prioritas II, dan ***) Prioritas III

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN , STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Perkebunan

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, dan mempertimbangkan kondisi perkembangan lingkungan strategis (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan), serta melihat kecenderungan perubahan jauh ke depan ke arah perbaikan dengan tahapan yang terencana, konsisten, akuntabel, berkelanjutan dan berorientasi pada pencapaian manfaat secara optimal, maka Visi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dirumuskan sebagai berikut:

**"AKSELERATOR TERWUJUDNYA AGRIBISNIS PERKEBUNAN JAWA
BARAT YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING ".**

Penjabaran makna yang terkandung dalam Visi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat tersebut adalah sebagai berikut:

- *Akselerator* artinya Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat subjek utama dalam menghela/mendorong/mengkoordinasikan/mempercepat seluruh proses pembangunan sub sektor perkebunan di Jawa Barat;
- *Agribisnis Perkebunan* adalah suatu pendekatan usaha perkebunan yang bersifat kesisteman mulai dari subsistem produksi, subsistem pengolahan, subsistem pemasaran dan subsistem jasa lainnya;
- *Maju* adalah suatu hasil pembangunan perkebunan yang lebih secara baik secara berkesinambungan, dibanding kondisi sebelumnya;
- *Sejahtera* adalah kondisi masyarakat perkebunan yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupannya;
- *Daya Saing* adalah keunggulan yang dimiliki pelaku usaha perkebunan dalam menghadapi kekuatan lawan.

Secara keseluruhan Visi tersebut memiliki pemahaman: bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat memosisikan diri sebagai subjek utama dalam mempercepat proses pembangunan agribisnis perkebunan di Jawa Barat, guna mencapai hasil yang lebih baik, memiliki berbagai keunggulan yang diperhitungkan secara luas, serta

mendatangkan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat perkebunan Jawa Barat.

Sejalan dengan visi tersebut, maka Misi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan,
2. Meningkatkan Pemberdayaan Sumber Daya Perkebunan Secara Berkelanjutan,
3. Meningkatkan Mutu Hasil dan Nilai Tambah Produk Usaha Perkebunan.

4.2. Tujuan dan Sasaran

Dari ke-tiga Misi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan pembangunan perkebunan Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Ketersediaan Produk Perkebunan secara optimal dan berkualitas;
2. Meningkatnya Kinerja Sumber Daya Perkebunan secara berkelanjutan;
3. Meningkatnya Daya Saing Produk Usaha Perkebunan.

Adapun dari ke-tiga tujuan pembangunan perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 tersebut memiliki sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan, dengan indikator:
 - 1) Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan (%)
 - 2) Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan (%)
2. Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat, dengan indikator:
 - 3) Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul bersertifikat (%)
 - 4) Prosentase Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang Tersertifikasi (%)
3. Terkendalinya Sumber Daya Lahan Perkebunan;
 - 5) Prosentase Luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat (%)
4. Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan;
 - 6) Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) (%)
5. Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan;
 - 7) Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan (%)

6. Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI;
 - 8) Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI (%)
7. Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan.
 - 9) Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan (%)

Selanjutnya struktur keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Pembangunan Sub Sektor Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 tersebut, serta target capaian kinerja tahunannya digambarkan dalam tabel 4.1. berikut ini:

Tabel 4.1 : Struktur Keterkaitan Misi-Tujuan-Sasaran Pembangunan Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN								
			NARASI	INDIKATOR	Kondisi Tahun dasar 2012	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
						2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan	1 Meningkatkan Ketersediaan Produk Perkebunan secara optimal dan berkualitas	1 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan	1 Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan (%)	2,0%	2,0%	2,1%	2,2%	2,3%	2,4%	2,5%
				2 Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan (%)	2,0%	2,0%	2,1%	2,2%	2,3%	2,4%	2,5%
			2 Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat	3 Prosentase peningkatan ketersediaan benih unggul bersertifikat (%)	2,0%	2,0%	2,1%	2,2%	2,3%	2,4%	2,5%
				4 Prosentase Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang Tersertifikasi (%)	2,0%	2,0%	2,1%	2,2%	2,3%	2,4%	2,5%
2	Meningkatkan Pemberdayaan Sumber Daya Perkebunan Secara Berkelanjutan	2 Meningkatkan Kinerja Sumber Daya Perkebunan secara berkelanjutan	3 Terkendalinya Sumber Daya Lahan Perkebunan	5 Prosentase Luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat (%)	13,58%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
			4 Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan	6 Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) (%)	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
			5 Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan	7 Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan (%)	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-1,0%
3	Meningkatkan Mutu Hasil dan Nilai Tambah	3 Meningkatkan Daya Saing Produk Perkebunan	6 Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI	8 Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI (%)	2,0%	2,0%	2,1%	2,2%	2,3%	2,4%	2,5%

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN								
			NARASI	INDIKATOR	Kondisi Tahun dasar 2012	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
						2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Produk Usaha Perkebunan		7 Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan	9 Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan (%)	2,0%	2,0%	2,1%	2,2%	2,3%	2,4%	2,5%

4.3. Strategi dan Kebijakan

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana tercantum dalam tabel 4.1 tersebut diatas, maka diperlukan suatu strategi pembangunan serta kebijakan pembangunan yang akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu tahun 2013-2018.

Berdasarkan pertimbangan perkembangan lingkungan strategis yang telah dianalisis berdasarkan metoda analisis SWOT, maka telah dirumuskan 9 (sembilan) strategi pelaksanaan pembangunan perkebunan Provinsi Jawa Barat selama tahun 2013-2018 sebagai berikut :

1. Optimalisasi pemanfaatan faktor-faktor produksi dan fokus pengembangan komoditas perkebunan;
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi budidaya adaptif yang ramah lingkungan;
3. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan kelembagaan perbenihan tanaman Perkebunan;
4. Optimalisasi Pelayanan Sertifikasi Benih dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan;
5. Meningkatkan pengawasan alih fungsi lahan dan alih komoditas serta pengendalian degradasi sumber daya lahan perkebunan secara berkelanjutan;
6. Meningkatkan indeks NTP Perkebunan sebagai refleksi dari peningkatan Kinerja pelaku dan kelembagaan usaha Perkebunan;
7. Menurunkan luas wilayah perkebunan yang terindikasi serangan OPT;
8. Meningkatkan Jumlah Pelaku penerapan sistem jaminan mutu produk perkebunan sesuai SNI;
9. Meningkatkan penguasaan pasar Ekspor dan pembinaan kemitraan usaha Perkebunan.

Adapun arah kebijakan pembangunan perkebunan Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018, dengan memperhatikan aspek urusan dan kewenangan Bidang Perkebunan, dirumuskan dalam 9 (sembilan) kebijakan berikut ini:

1. Peningkatan pemanfaatan faktor-faktor produksi melalui intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan komoditas strategis;
2. Pengembangan kaji terap teknologi budidaya dan peningkatan dukungan sarana produksi secara berkelanjutan;

3. Peningkatan produktivitas balai benih dan pembinaan penangkar benih tanaman perkebunan;
4. Pengembangan sistem pelayanan sertifikasi yang efektif dan Peningkatan Pengawasan Jaringan Peredaran Benih
5. Peningkatan koordinasi penanganan penyusutan lahan perkebunan dan Pengembangan teknik konservasi sumber daya lahan serta penanganan gangguan usaha perkebunan secara berkelanjutan;
6. Peningkatan Kompetensi Pekebun, Kelembagaan dan akses Permodalan Usaha Perkebunan;
7. Peningkatan teknologi dan sistem pengendalian hama terpadu yang efektif, efisien serta ramah lingkungan
8. Peningkatan kemampuan dalam Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI;
9. Peningkatan promosi dan pemasaran produk perkebunan.

Selanjutnya struktur keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan pembangunan perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 secara terperinci disajikan dalam tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Akselerator Terwujudnya Agribisnis Perkebunan Jawa Barat yang Maju, Sejahtera dan Berdaya Saing			
MISI I : Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1 Meningkatkan Ketersediaan Produk Perkebunan secara optimal dan berkualitas	1 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan	1 Optimalisasi pemanfaatan faktor-faktor produksi dan fokus pengembangan komoditas perkebunan	1 Peningkatan pemanfaatan faktor-faktor produksi melalui intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan komoditas strategis
		2 Optimalisasi pemanfaatan teknologi budidaya adaptif yang ramah lingkungan	2 Pengembangan kaji terap teknologi budidaya dan peningkatan dukungan sarana produksi secara berkelanjutan
	2 Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat	3 Optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan kelembagaan perbenihan tanaman Perkebunan	3 Peningkatan produktivitas balai benih dan pembinaan penangkar benih tanaman perkebunan
		4 Optimalisasi Pelayanan Sertifikasi Benih dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	4 Pengembangan sistem pelayanan sertifikasi yang efektif dan Peningkatan Pengawasan Jaringan Peredaran Benih
MISI II : Meningkatkan Pemberdayaan Sumber Daya Perkebunan Secara Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
2 Meningkatkan Kinerja Sumber Daya Perkebunan secara berkelanjutan	3 Terkendalinya Sumber Daya Lahan Perkebunan;	5 Meningkatkan pengawasan alih fungsi lahan dan alih komoditas serta pengendalian degradasi	5 Peningkatan koordinasi penanganan penyusutan lahan perkebunan dan Pengembangan teknik konservasi

		sumber daya lahan perkebunan secara berkelanjutan	sumber daya lahan serta penanganan gangguan usaha perkebunan secara berkelanjutan
	4 Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan;	6 Meningkatkan indeks NTP Perkebunan sebagai refleksi dari peningkatan Kinerja pelaku dan kelembagaan usaha Perkebunan	6 Peningkatan Kompetensi Pekebun, Kelembagaan dan akses Permodalan Usaha Perkebunan.
	5 Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan;	7 Menurunkan luas wilayah perkebunan yang terindikasi serangan OPT	7 Peningkatan teknologi dan sistem pengendalian hama terpadu yang efektif, efisien serta ramah lingkungan
MISI III : Meningkatkan Mutu Hasil dan Nilai Tambah Produk Usaha Perkebunan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
3 Meningkatkan Daya Saing Produk Perkebunan	6 Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI	8 Meningkatkan Jumlah Pelaku penerapan sistem jaminan mutu produk perkebunan sesuai SNI.	8 Peningkatan kemampuan dalam Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI
	7 Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan	9 Meningkatkan penguasaan pasar Ekspor dan pembinaan kemitraan usaha Perkebunan	9 Peningkatan promosi dan pemasaran serta pembinaan kemitraan usaha perkebunan.

Beberapa kebijakan teknis yang merupakan penjabaran kebijakan umum pembangunan perkebunan Jawa Barat yang perlu dijalankan selama periode 2013-2018, meliputi :

1. Kebijakan Fokus Pengembangan Komoditi Perkebunan Jawa Barat, yang ditempuh melalui penetapan fokus pengembangan komoditas berdasarkan klasifikasi:
 - a. Komoditas Strategis, yaitu komoditas yang: (1) Merupakan komoditas andalan perkebunan daerah yang secara teknis budidaya sudah memasyarakat; (2) Sangat dikenal dan dikuasai oleh sebagian besar pelaku usaha perkebunan di daerah; (3) Wilayah Penyebarannya secara kuantitatif dan kualitatif merata di Daerah; (4) Merupakan komoditas historis berkelanjutan; serta (5) Secara Ekonomis dapat diandalkan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah. Komoditas ini terdiri dari 8 (delapan) komoditas, yaitu: *Teh, Kopi, Kakao, Karet, Cengkeh, Kelapa, Tebu dan Tembakau*.
 - b. Komoditas Prospektif, yaitu komoditas yang mempunyai keunggulan komparatif tertentu, baik dari segi kemudahan pasar, mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, mempunyai fungsi hidrologis dan mempunyai potensi nilai tambah pelaku usaha perkebunan. Komoditas ini terdiri dari 12 (dua belas) komoditas, yaitu: Kemiri Sunan, Kelapa Sawit, Kelapa Hibrida, Aren, Pala, Lada, Nilam, Jambu Mete, Kayu Manis, Kemiri dan Panili.
 - c. Komoditas Unggulan Spesifik lokal, yaitu komoditas yang hanya ada di wilayah kabupaten/kota tertentu, dan mempunyai potensi untuk menjadi komoditas andalan Kabupaten/Kota sesuai dengan keunggulannya. Komoditas ini terdiri dari 10 (sepuluh) komoditas, yaitu: Akar Wangi, Sereh Wangi, Kina, Kenanga, Mendong, Pandan, Guttapercha, Kumis Kucing, Pinang dan Kapok.
2. Kebijakan pengembangan teknologi budidaya ramah lingkungan, melalui pendekatan: intensifikasi, eksentifikasi, rehabilitasi dan peremajaan; yang didukung dengan upaya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lahan sesuai peruntukannya, pengendalian degradasi sumber daya lahan, penuntasan gangguan usaha perkebunan, pengendalian serangan OPT Perkebunan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan usaha perkebunan secara memadai.
3. Kebijakan Pembinaan Sumber Daya manusia dan Kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan, yang ditempuh melalui pendekatan:

- a. Pembinaan kompetensi SDM perkebunan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan;
 - b. Pembinaan kemantapan kelembagaan pelaku usaha perkebunan (Poktan, Gapoktan, UKM, Asosiasi dan sejenisnya) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kemandirian dan daya saing pelaku usaha perkebunan;
 - c. Pembinaan akses permodalan usaha melalui peningkatan dukungan lembaga keuangan, pengembangan kemitraan usaha dan peningkatan investasi usaha perkebunan.
4. Kebijakan pendukung terhadap pelaksanaan program-program unggulan nasional dan daerah, meliputi:
- a. Penanganan Swasembada Pangan, khususnya untuk komoditas tebu (gula);
 - b. Penciptaan lapangan kerja baru dan pencetakan Wirausaha Baru;
 - c. Pelaksanaan Program/Kegiatan yang terkait Tematik Kewilayahan dan fokus-fokus *Common Goal*;
 - d. Pengembangan komoditas perkebunan sebagai bahan baku energi alternatif;
 - e. Penanganan kelestarian lingkungan hidup pada kawasan kritis dan Daerah Aliran Sungai.
5. Kebijakan peningkatan fungsi dan peran OPD sebagai akselerator Terwujudnya Agribisnis Perkebunan Jawa Barat yang Maju, Sejahtera dan Berdaya Saing, yaitu melalui:
- a. Peningkatan kualitas SDM aparatur dan pelayanan organisasi;
 - b. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana pembangunan perkebunan;
 - c. Peningkatan kualitas perencanaan, data/informasi dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi, maka disusun strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan sub sektor perkebunan sesuai dengan target indikator kinerja yang harus dicapai selama periode Tahun 2013 – 2018, yaitu meliputi program dan kegiatan sebagai berikut:

5.1. RENCANA PROGRAM

A. Program Urusan Pilihan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta dilandasi oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka Urusan Pilihan untuk pembangunan sub sektor perkebunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat selama periode Tahun 2013 – 2018, dilakukan melalui program-program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Produksi Pertanian;
2. Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian;
3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan;
4. Program Pemasaran & Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan.

B. Program Urusan Wajib

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, maka pelaksanaan program/Kegiatannya diwadahi kedalam program berikut ini:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah;
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur; dan
7. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah.

5.2. PROGRAM JANJI GUBERNUR

Untuk mewujudkan janji-janji Gubernur yang telah disampaikan pada saat proses Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, maka telah disusun beberapa agenda pokok yang sudah dituangkan ke dalam RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013–2018, antara lain yang secara khusus terkait dengan urusan Bidang Pertanian/Perkebunan adalah:

1. Mencetak 100.000 Wirausahawan Baru dan membuka 2 juta Lapangan Kerja Baru dalam 5 tahun; serta
2. Peningkatan jaringan irigasi untuk sektor pertanian.

Pelaksanaan program tentang kedua agenda pokok tersebut akan dijalankan secara sinergis dengan berbagai OPD terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Disamping janji-janji kampanye Gubernur tersebut, terdapat pula janji Gubernur pasca Pilgub yang diucapkan pada berbagai kesempatan pertemuan dengan para pelaku usaha perkebunan, diantaranya adalah janji bantuan benih kopi Java Preanger yang akan dilakukan secara bertahap.

5.3. PROGRAM NASIONAL

Pelaksanaan pembangunan Sub Sektor Perkebunan di Jawa Barat pada kenyataannya tidak bisa sepenuhnya mengandalkan ketersediaan APBD Provinsi Jawa Barat sendiri, namun diperlukan adanya dukungan pembiayaan dari APBN baik berupa Dana Dekonsentrasi, Dana Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus, serta Dana Bagi Hasil, yang antara lain dituangkan ke dalam beberapa program sebagai berikut:

A. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan.

Program ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Perkebunan pada Kementerian Pertanian RI, yang meliputi kegiatan:

- 1) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar;
- 2) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim;

- 3) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan;
- 4) Pengembangan Penanganan Pasca Panen Komoditas Perkebunan;
- 5) Dukungan Perlindungan Perkebunan; serta
- 6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Perkebunan

B. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian

Program ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP) pada Kementerian Pertanian RI, yang meliputi kegiatan:

- 1) Pengembangan Mutu dan Standarisasi Pertanian
- 2) Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian
- 3) Pengembangan Pemasaran Domestik
- 4) Pengembangan Penanganan Pasca Panen Pertanian / Pengembangan Usaha dan Investasi.

C. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Program ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian RI, yang meliputi kegiatan:

- 1) Pembangunan Embung;
- 2) Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP);
- 3) Dukungan Kelembagaan untuk PIP;
- 4) Pengembangan Sumber Air;
- 5) Pra/Pasca Sertifikasi Tanah;
- 6) Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian;
- 7) Perluasan Areal dan Pengelolaaan Lahan Pertanian; serta
- 8) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

5.4. RENCANA KEGIATAN

Sebagai penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program yang telah ditetapkan, maka rencana kegiatan prioritas pembangunan Perkebunan Provinsi Jawa Barat dalam lima tahun kedepan (2013-2018), diindikasikan akan terdapat sejumlah Kegiatan berdasarkan Urusan Pilihan dan Urusan Wajib, yang

disesuaikan dengan keperluan pelaksanaan pencapaian indikator kinerja tahunan yang telah ditetapkan di dalam Renstra ini.

Adapun indikasi kegiatan sebagai penjabaran dari program urusan wajib dan pilihan sebagaimana tersebut diatas, adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Produksi Pertanian, dengan indikasi kegiatan:
 - a. Kegiatan yang berkaitan dengan Pengembangan dan Aplikasi Teknologi Perbenihan Tanaman Perkebunan;
 - b. Kegiatan yang berkaitan dengan Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan;
 - c. Kegiatan yang berkaitan dengan Pengembangan Produksi Tanaman Semusim, Produksi Tanaman Tahunan serta dukungan sarana produksi tanaman perkebunan
 - d. Kegiatan yang khusus didanai oleh Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), meliputi fasilitasi pembinaan penangkar benih tembakau, sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman tembakau, serta pengembangan Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Tembakau, serta Pengembangan Budidaya Tanaman Tembakau.
2. Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian, dengan indikasi kegiatan:
 - a. Kegiatan yang berkaitan dengan Pemberdayaan SDM Pelaku Usaha Perkebunan, Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan, Pendukung Akses Permodalan Usaha Perkebunan, serta Kegiatan Penumbuhan Wirausaha Baru Bidang Perkebunan.
 - b. Kegiatan yang berkaitan dengan Penataan Lahan dan Pengembangan Kawasan Perkebunan, Pengembangan dan Pengelolaan Prasarana Perkebunan, serta Kegiatan Pengendalian Degradasi Sumber Daya Perkebunan dan Gangguan Usaha Perkebunan.
 - c. Kegiatan yang berkaitan dengan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau serta kegiatan Pengendalian Sumber Daya Tanaman Tembakau, yang didanai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan, dengan indikasi kegiatan:
 - a. Kegiatan yang berkaitan dengan Pengujian dan Pengembangan Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu, serta Aplikasi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu.

- b. Kegiatan yang berkaitan dengan Pengendalian Hama & Penyakit Tanaman Tembakau yang didanai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
- 4. Program Pemasaran & Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan, dengan indikasi kegiatan:
 - a. Kegiatan yang berkaitan dengan Pengembangan Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan, Pemasaran Hasil Perkebunan, serta Pembinaan Pengembangan Usaha Perkebunan.
 - b. Kegiatan yang berkaitan dengan Pengembangan Mutu Hasil Tanaman Tembakau yang didanai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)
- 5. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah, dengan indikasi kegiatan:
 - a. Kegiatan yang berkaitan dengan Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan di Dinas Perkebunan
- 6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan indikasi kegiatan:
 - a. Kegiatan yang berkaitan dengan Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Sumber Daya Aparatur
- 7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan indikasi kegiatan:
 - a. Kegiatan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran untuk Kantor Pusat Dinas Perkebunan Jawa Barat, serta Kantor UPTD (BPTP, BPBTP dan BSPMB)
- 8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan indikasi kegiatan:
 - a. Kegiatan yang berkaitan dengan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Pusat Dinas Perkebunan
 - b. Kegiatan yang berkaitan dengan Peningkatan Sarpras UPTD (BPTP, BPBTP, BSPMB) yang danai dari alokasi anggaran Revitalisasi UPTD.
 - c. Kegiatan yang berkaitan dengan Peningkatan Sarpras khusus untuk UPTD (BPBTP, BPBTP dan BSPMB) yang didanai dari alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK).
- 9. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan indikasi kegiatan:
 - a. Kegiatan yang berkaitan dengan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pusat Dinas Perkebunan, serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD (BPTP, BPBTP dan BSPMB).

10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan indikasi kegiatan:
 - a. Kegiatan yang berkaitan dengan Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Perkebunan
11. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, dengan indikasi kegiatan:
 - a. Kegiatan yang berkaitan dengan Pengembangan Data/Informasi Perkebunan

Dalam proses perumusan kegiatan tahunan yang akan dijabarkan dalam renja tahun 2014 sd 2018, sangat dimungkinkan indikasi kegiatan tersebut diatas akan dijabarkan kedalam nama judul kegiatan yang akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi saat itu. Namun demikian indikator output kegiatannya sudah ditetapkan dalam Renstra 2013-2018.

Adapun uraian tentang Indikator Rencana Program, Kegiatan, Kelompok Sasaran, serta pendanaan indikatifnya, adalah sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Visi : Akselerator Terwujudnya Agribisnis Perkebunan Jawa Barat Yang Maju, Sejahtera Dan Berdaya Saing
Misi : 1. Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan
2. Meningkatkan Pemberdayaan Sumber Daya Perkebunan Secara Berkelanjutan
3. Meningkatkan Mutu Hasil dan Nilai Tambah Produk Usaha Perkebunan

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis		Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis, Indikator Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)	Kondisi Tahun Dasar		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												
			Narasi	Indikator				2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		
								Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.	Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan	1.1 Meningkatkan Ketersediaan Produk Perkebunan secara optimal dan berkualitas	1.1.1 Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan	1) Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan (%)	1) Program Peningkatan Produksi Pertanian (APBD). 2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)	1) Kegiatan yang berkaitan dengan Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan (%)	2,00	6.500	2,00	9.750	2,10	13.500	2,20	14.750	2,30	16.000	2,40	17.250	2,50	18.500	
							Peningkatan Produksi Komoditas Startegis Perkebunan (ton)	385.347		371.423		373.030		376.370		379.860		383.300		386.740		
							a. Teh	109.313		107.500		108.000		108.500		109.000		109.500		110.000		
							b. Kopi	15.567		16.650		17.000		17.350		17.750		18.100		18.450		
							c. Karet	33.054		33.626		33.660		34.320		34.980		35.640		36.300		
							d. Kakao	2.596		2.240		2.250		2.260		2.270		2.280		2.290		
							e. Kelapa	104.408		104.993		105.100		106.200		107.300		108.400		109.500		
							f. Cengkeh	6.435		6.114		6.120		6.240		6.360		6.480		6.600		
							g. Tebu	104.779		92.250		92.750		93.250		93.750		94.250		94.750		
							h. Tembakau	9.195		8.050		8.150		8.250		8.450		8.650		8.850		
							1)	Luas Intensifikasi (Ha)	300	4.500	1.300	5.000	2.400	5.500	2.400	6.000	2.400	6.500	2.400	7.000	2.400	7.500
							2)	Luas Rehabilitasi (Ha)	-	-	500	2.500	1.500	5.500	1.500	6.000	1.500	6.500	1.500	7.000	1.500	7.500

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis		Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis, Indikator Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)		Kondisi Tahun Dasar		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												
			Narasi	Indikator							2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018
									Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
							3)	Luas Peremajaan (Ha)	750	2.000	1.050	2.250	1.150	2.500	1.150	2.750	1.150	3.000	1.150	3.250	1.150	3.500	
				2) Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan (%)	1) Program Peningkatan Produksi Pertanian (APBD); 2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)	2) Kegiatan yang berkaitan dengan Pengembangan Teknologi Budidaya dan dukungan sarana produksi tanaman perkebunan	Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan (%)		2,00	700	2,00	825	2,10	950	2,20	1.075	2,30	1.200	2,40	1.325	2,50	1.400	
							Peningkatan Produktivitas Komoditas Strategis Perkebunan (kg/Ha)																
								a. Teh	1.469		1.450		1.455		1.460		1.465		1.470		1.475		
								b. Kopi	889		775		800		825		850		875		900		
								c. Karet	995		475		500		525		550		575		600		
								d. Kakao	481		459		459		468		477		486		495		
								e. Kelapa	830		790		791		806		822		837		853		
								f. Cengkeh	337		330		335		340		345		350		355		
								g. Tebu	4.746		4.450		4.475		4.500		4.525		4.550		4.575		
				h. Tembakau	891		815		816		832		848		864		880						
				4)	Jumlah Demplot/Demfarm/Dem Area Teknologi Budidaya tanaman perkebunan (lokasi)	65	500	68	525	69	550	70	575	71	600	72	625	73	600				
				5)	Jumlah Sarana budidaya perkebunan yang tersalurkan (poktan)	4	200	4	300	4	400	5	500	6	600	7	700	8	800				
			1.1.2 Meningkatkan Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat	3) Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas	1) Program Peningkatan Produksi Pertanian (APBD); 2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)	3) Kegiatan yang berkaitan dengan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman	Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas Strategis (%)		2,00	4.100	2,00	5.720	2,10	7.040	2,20	7.360	2,30	7.680	2,40	8.000	2,50	8.320	
							Jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas	27.913.230		27.913.230		28.500.000		29.127.000		29.796.921		30.512.047		31.274.848			

*Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018*

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis		Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis, Indikator Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)	Kondisi Tahun Dasar		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatorif												
			Narasi	Indikator				2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		
								Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				Strategis (%)	s dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)	Perkebunan	Strategis (phn/btg)															
							a. Teh	4.407.500		4.407.500		4.500.000		4.599.000		4.704.777		4.817.692		4.938.134		
							b. Kopi	3.427.900		3.427.900		3.500.000		3.577.000		3.659.271		3.747.094		3.840.771		
							c. Karet	293.840		293.840		300.000		306.600		313.652		321.179		329.209		
							d. Kakao	1.469.200		1.469.200		1.500.000		1.533.000		1.568.259		1.605.897		1.646.045		
							e. Kelapa	122.430		122.430		125.000		127.750		130.688		133.825		137.170		
							f. Cengkeh	220.370		220.370		225.000		229.950		235.239		240.885		246.907		
							g. Tebu	16.160.000		16.160.000		16.500.000		16.863.000		17.250.849		17.664.869		18.106.491		
							h. Tembakau	1.469.200		1.469.200		1.500.000		1.533.000		1.568.259		1.605.897		1.646.045		
							i. Komoditas Lainnya	342.790		342.790		350.000		357.700		365.927		374.709		384.077		
				6)	Jumlah benih tanaman perkebunan yang tersalurkan (Phn/Btg)	1.200.000	2.100	1.225.000	3.575	1.250.000	4.750	1.275.000	4.925	1.300.000	5.100	1.325.000	5.275	1.350.000	5.450			
				7)	Jumlah Pengembangan Teknologi Pembenihan (jenis)	1	1.500	1	1.600	1	1.700	1	1.800	1	1.900	1	2.000	1	2.100			
				8)	Jumlah Penangkar Benih yang terbina (penangkar)	50	200	55	220	60	240	65	260	70	280	75	300	80	320			
				9)	Jumlah Penetapan Kebun Sumber Benih (lokasi)	3	300	3	325	4	350	4	375	5	400	5	425	6	450			
				4)	Prosentase Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang Tersertifikasi (%)	1) Program Peningkatan Produksi Pertanian (APBD); 2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu	4) Kegiatan yang berkaitan dengan sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih	Prosentase Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang Tersertifikasi (%)	2,00	1.075	2,00	1.275	2,10	1.400	2,20	1.525	2,30	1.650	2,40	1.775	2,50	1.900

*Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018*

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis		Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis, Indikator Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)		Kondisi Tahun Dasar		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif													
			Narasi	Indikator							2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
									Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
					Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)	Tanaman Perkebunan	10)	Jumlah Pengembangan Inovasi Pengujian Mutu Benih (jenis)	1	75	2	150	2	150	2	150	2	150	2	150	2	150		
							11)	Jumlah Penanganan kasus Peredaran Benih Tanaman Perkebunan yang tdk bersertifikat (Kasus)	1	500	1	600	2	700	2	800	3	900	3	1.000	4	1.100		
2.	Meningkatkan Pemberdayaa n Sumber Daya Perkebunan Secara Berkelanjutan	2.1 Meningkatkan Kinerja Sumber Daya Perkebuna n secara berkelanjutan	2.1.1 Terkendalin ya Sumber Daya Lahan Perkebuna n	5) Prosentase Luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat (%)	1) Program Pemberdaya an Sumberday a Pertanian; 2) Program Penyediaan dan Pengemban gan Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP); 3) Program Peningkata n Produksi, Produktivita s dan Mutu Tanaman Perkebuna n Berkelanjut an (APBN)	5) Kegiatan yang berkaitan dengan Penataan dan Konservasi Sumber Daya Lahan, Antisipasi Perubahan Iklim, Pengendali an Gangguan Usaha serta Pendukung an Sarana Prasarana Perkebuna n,	Prosentase Luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat (%)		13,58	2.900	13,00	3.300	13,00	3.700	13,00	4.100	13,00	4.450	13,00	4.850	13,00	5.400		
								Luas Minimum Eksisting Lahan Perkebunan yg Terkendalikan (Ha)	492.660		482.238		482.238		482.238		482.238		482.238		482.238		482.238	
							12)	Jumlah dokumen Norma, Standar, Kebijakan, Pedoman (NSKP) Penataan dan Pelestarian Lahan Perkebunan (Dokumen)	2	150	2	175	2	200	2	225	2	200	2	225	2	225	2	300
							13)	Jumlah Demplot/Demf arm penataan dan penerapan teknologi pelestarian lahan perkebunan (lokasi)	2	500	3	600	3	700	3	800	3	900	3	1.000	3	1.000	3	1.100
							14)	Perluasan areal perkebunan (Ha)	100	800	100	900	100	1.000	100	1.100	100	1.200	100	1.300	100	1.400		

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis		Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis, Indikator Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)		Kondisi Tahun Dasar		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif											
			Narasi	Indikator					2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
									Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							15)	Jumlah Pengembangan an Optimasi Lahan (Ha)	100	100	100	125	100	150	100	175	100	200	100	225	100	300
							16)	Jumlah Pengembangan an Konservasi Air dan Anomali Iklim (Unit)	10	100	10	125	10	150	10	175	10	200	10	225	10	300
							17)	Jumlah Pengembangan an Sumber Air (unit)	9	750	9	775	9	800	9	825	9	850	9	875	9	900
							18)	Jumlah Penanganan Kasus Gangguan Usaha Perkebunan (Kasus)	3	500	3	600	3	700	4	800	4	900	5	1.000	5	1.100
			2.1.2 Meningkatkan Kesejahteraan Petani Perkebunan	6) Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) (%)	1) Program Pemberdayaan Sumberdaya Pertanian (APBD); 2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)	6) Kegiatan yang berkaitan dengan Pembinaan Kompetensi SDM, Kelembagaan, dan akses Permodalan Usaha Perkebunan	Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) (%)		3.590	1,00	4.445	1,00	4.550	1,00	4.655	1,00	4.760	1,00	4.865	1,00	4.970	
							Capaian Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) rata-rata tahunan (point)		108	109	110	111	112	113	114							
							19)	Jumlah Hasil Pembinaan Kompetensi SDM Pelaku Usaha Perkebunan (Org)	1.000	3.000	3.200	3.750	3.225	3.750	3.250	3.750	3.275	3.750	3.300	3.750	3.325	3.750
							20)	Jumlah Hasil Pembinaan Kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan (Kelompok/lembaga)	56	500	67	600	125	700	130	800	135	900	140	1.000	145	1.100
							21)	Jumlah Akses Permodalan Usaha Perkebunan (kali)	1	90	1	95	2	100	2	105	3	110	3	115	4	120
							Prosentase Penurunan Intensitas		-1,00	3.230	-1,00	3.480	-1,00	3.730	-1,00	3.980	-1,00	4.230	-1,00	4.480	-1,00	4.730
			2.1.3 Menurunnya intensitas	7) Prosentase Penurunan	1.Program pencegahan dan	7) Kegiatan yg berkaitan																

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis		Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis, Indikator Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)	Kondisi Tahun Dasar		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatorif												
			Narasi	Indikator				2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		
								Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			serangan OPT Perkebunan	Intensitas Serangan OPT Perkebunan (%)	penanggulungan penyakit tanaman, ternak dan ikan (APBD); 2.Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)	dengan Pengembangan sarana teknologi dan Aplikasi Pengendalian Hama Terpadu (PHT)	Serangan OPT Perkebunan (%)															
								Luas wilayah Maksimum yang terindikasi serangan OPT Perkebunan (Ha)	38.852		38.500		38.000		37.500		37.000		36.500		36.000	
							22)	luas penanggulungan OPT melalui penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan (Ha)	630	1.400	640	1.500	650	1.600	660	1.700	670	1.800	680	1.900	690	2.000
							23)	Jumlah OPT hasil eksplorasi dan seleksi jenis - jenis agensia hayati musuh alami untuk PHT perkebunan (jenis)	6	80	7	100	7	120	7	140	7	160	7	180	7	200
							24)	Jumlah pengembangan Bahan dan alat Teknologi PHT														
							a. Agens Hayati (ton)	6	250	7	260	7	270	7	280	7	290	7	300	7	310	
							b. Petisida Nabati (kwintal)	5	250	5	260	5	270	5	280	5	290	5	300	5	310	
							c. Musuh Alami (jenis)	3	250	3	260	3	270	3	280	3	290	3	300	3	310	
							25)	Jumlah aplikasi pengujian, pengendalian dan penanggulungan OPT perkebunan (lokasi)	5	1.000	5	1.100	5	1.200	5	1.300	5	1.400	5	1.500	5	1.600

*Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018*

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis		Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis, Indikator Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)	Kondisi Tahun Dasar		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif											
			Narasi	Indikator				2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
								Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3.	Meningkatkan Mutu Hasil dan Nilai Tambah Produk Usaha Perkebunan	3.1 Meningkatkan Daya Saing Produk Perkebunan	3.1.1 Meningkatkan Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI	8) Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI (%)	1) Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan (APBD); 2) Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian (APBN)	8) Kegiatan yg berkaitan dengan Peningkatan Mutu dan Pengolahan Produk Perkebunan	Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI (%)	2,00	3.080	2,00	3.350	2,10	3.720	2,20	4.090	2,30	4.460	2,40	4.830	2,50	5.200
							Jumlah Pelaku Usaha Perkebunan yang menerapkan sistem jaminan Mutu sesuai SNI (org)	48	49	50	51	52	53	54							
							26) Jumlah Produk yang difasilitasi uji mutu Hasil Perkebunan (jenis)	7	80	7	100	8	120	8	140	9	160	9	180	10	200
							27) Jumlah Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan (jenis)	1	1.000	1	1.000	1	1.100	2	1.200	2	1.300	3	1.400	3	1.500
							28) Jumlah Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan yang tersalurkan (kel usaha tani)	4	2.000	5	2.250	5	2.500	5	2.750	5	3.000	5	3.250	5	3.500
			3.1.2 Meningkatkan Volume Ekspor Produk Perkebunan	9) Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan (%)	1) Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan (APBD); 2) Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing,	9) Kegiatan yg berkaitan dengan Pemasaran Produk dan Pengembangan Usaha Perkebunan	Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan (%)	2,00	2.550	2,00	3.050	2,10	3.600	2,20	4.100	2,30	4.650	2,40	5.150	2,50	5.700
							Jumlah Volume Ekspor Produk Perkebunan Jawa Barat (Kg)	220.000.000	220.250.000	225.000.000	230.000.000	235.500.000	241.250.000	247.500.000							
							29) Jumlah Kab/Kota yang aktif menjalankan Pelayanan Informasi Pasar (PIP) Produk	13	250	14	350	15	500	15	600	15	750	16	850	16	1.000

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis		Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis, Indikator Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)		Kondisi Tahun Dasar		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif											
			2012						2013		2014		2015		2016		2017		2018			
			Volume	Rp (juta)					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Industri Hilir Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian (APBN)			Perkebunan (Kab/Kota)														
							30)	Jumlah promosi pemasaran hasil perkebunan di dalam dan luar negeri (kali)	2	1.500	3	1.750	3	2.000	4	2.250	4	2.500	5	2.750	5	3.000
							31)	Jumlah Pengembang an Agrowisata Perkebunan (lokasi)	1	100	2	125	2	150	2	175	2	200	3	225	3	250
							32)	Jumlah Pelayanan Rekomendasi Perijinan Usaha Perkebunan (Kali)	3	500	4	600	4	700	4	800	4	900	5	1.000	5	1.100
							33)	Jumlah jalinan Kemitraan Usaha Perkebunan (kel usaha tani)	1	200	2	225	2	250	3	275	3	300	4	325	4	350
									27.725		35.195		42.190		45.635		49.080		52.525		56.120	

5.5. KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran adalah kelompok penerima manfaat dari pelaksanaan program/kegiatan pembangunan sub sektor perkebunan, yaitu berupa kawasan/wilayah/lokasi SDA, petani, kelompok tani, gapoktan, pelaku usaha perkebunan, organisasi profesi bidang perkebunan, serta kelompok komoditas binaan perkebunan sendiri.

5.5.1 Sasaran Kawasan/Wilayah/Lokasi

Pelaksanaan pembangunan sub sektor perkebunan Provinsi Jawa Barat memiliki sasaran Kawasan/Wilayah/Lokasi yang mengacu kepada: RTRW Nasional, RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, RTRW Kabupaten/Kota se Jawa Barat, serta berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang menyangkut arah pemanfaatan ruang/kawasan/perwilayahan dan kesesuaian lahan untuk pengembangan komoditas perkebunan.

Usaha perkebunan dilakukan secara terpadu dan terkait dalam agribisnis perkebunan dengan pendekatan kawasan pengembangan perkebunan, dimana dalam kawasan pengembangan perkebunan tersebut pelaku usaha perkebunan dapat melakukan diversifikasi usaha.

Wilayah geografis di Jawa Barat yang menghasilkan produk perkebunan tertentu yang bersifat spesifik lokasi perlu dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis. Wilayah geografis yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang dialihfungsikan. Untuk menentukan wilayah geografis yang dimaksud, maka perlu dilakukan upaya-upaya penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perkebunan agar berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan dengan menghargai kearifan tradisional dan budaya lokal.

Adapun beberapa dokumen terkait yang digunakan sebagai acuannya, antara lain adalah: Grand Design Pembangunan Ekonomi Jawa Barat, Konsep pengembangan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN), Konsep Pengembangan Jabar Selatan, Konsep Pengembangan Jabar Utara, Konsep Pengembangan Jabar Tengah, Konsep Tematik Kewilayahan, Konsep Pengembangan Kawasan DAS, Konsep Pengembangan Kawasan Andalan, Rencana Aksi Multi Pihak Implementasi Pekerjaan (RAM-IP) dan lain sebagainya.

Berdasarkan data kondisi sebaran komoditas perkebunan di Kabupaten/Kota se Jawa Barat, maka sasaran pengembangan perwilayahan komoditas perkebunan yang dianggap dominan di Jawa Barat terbagi atas zonasi sebagai berikut:

- Kawasan Pengembangan Komoditas Teh: Bandung, Bandung Barat, Subang, Purwakarta, Bogor, Cianjur, Sukabumi, Garut, Tasikmalaya, Majalengka, Sumedang dan Ciamis.
- Kawasan Pengembangan Komoditas Kopi: Bogor, Sukabumi, Cianjur, Majalengka, Kuningan, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Bandung Barat, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar.
- Kawasan Pengembangan Komoditas Tebu: Subang, Indramayu, Majalengka, Sumedang, Cirebon, Kuningan dan Garut;
- Kawasan Pengembangan Komoditas Karet: Sukabumi, Cianjur, Subang, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran, Bandung Barat,
- Kawasan Pengembangan Komoditas Kelapa Dalam: Ciamis, Pangandaran, Tasikmalaya, Garut, Cianjur, Sukabumi, Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu dan Cirebon. (Wilayah Pesisir)
- Kawasan Pengembangan Komoditas Kakao: Ciamis, Sukabumi, Cianjur, Bogor dan Karawang
- Kawasan Pengembangan Komoditas Tembakau: Garut, Sumedang, Majalengka, Bandung, Cirebon, Kuningan, Sukabumi, Ciamis, Bandung Barat, Cianjur, Tasikmalaya, Subang, Kota Banjar dan Kota Tasik.
- Kawasan Pengembangan Komoditas Cengkeh: Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya, Cianjur, Kuningan, Ciamis, Majalengka, Bogor, Subang, Purwakarta, Bandung Barat, Cirebon, Karawang, Kota Banjar dan Kota Tasik.
- Kawasan Pengembangan Komoditas Tanaman Atsiri (Akar Wangi, Sereh Wangi, Nilam, Kenanga): Garut, Sumedang, Kuningan, Cirebon.
- Kawasan Pengembangan Komoditas Mendong dan Pandan: Tasikmalaya, Kota Tasik, Subang, Ciamis, Sukabumi, Kuningan dan Bekasi.
- Wilayah Pengembangan Komoditas Kelapa Sawit: Bogor, Sukabumi, Cianjur, *Subang dan Garut.*
- Kawasan Pengembangan Komoditas Campuran (Pala, Lada, Paneli, Kemiri, Kayu Manis, Jarak, Kumis Kucing, Kapok, Aren, Kelapa Hibrida, Kina, Pinang): umumnya

tersebar pada beberapa kabupaten/kota yang kondisi penyebarannya tidak begitu dominan.

Dengan memperhatikan wilayah sebaran komoditas tanaman perkebunan tersebut diatas, serta dengan mempertimbangkan kecenderungan perkembangan agribisnisnya, maka dalam jangka waktu 2013-2018, fokus pengembangan komoditas akan diprioritaskan sebagai berikut:

1. WKPP-I (Kab. Bogor, Kota Bogor, Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi, Kab. Cianjur dan Kota Depok), wilayah ini memiliki luas total wilayah perkebunan sebesar 142.534 Ha (Tahun 2012) atau sekitar 21,70% terhadap total luas WKPP-I dan sekitar 3,28% dari Luas Provinsi Jawa Barat. Di Wilayah ini terdapat 91.319 Ha Perkebunan Rakyat (64%), 31.756 Ha Perkebunan Besar Swasta (22%), dan 19.458 Ha Perkebunan Besar Negara (14%).

Jenis Komoditas yang dominan di wilayah ini adalah: Teh (30 %), Kelapa Dalam (18%), Karet (18%), Cengkeh (9%), Kelapa Sawit (6%), Kelapa Hibrida (6%), Kopi (4%), Pala (3%), Aren (3%), Kakao (2%), dan lainnya (Jambu Mete, Lada, Kapok, Pinang, Panili, Pandan, Nilam, Kina, Kemiri, Kayu Manis dan Kumis Kucing).

Fokus pengembangan sub sektor perkebunan di wilayah ini perlu diarahkan sebagai berikut:

- Mempertahankan luas lahan eksisting perkebunan melalui upaya rehabilitasi, peremajaan, intensifikasi serta pendekatan regulasi pertanahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Optimasi pengembangan komoditas strategis (Teh, Kopi, Karet, Kakao) melalui pengembangan teknologi budidaya dan peningkatan pemanfaatan benih unggul bersertifikat.
- Pengendalian Gangguan Usaha Perkebunan, baik Gangguan OPT maupun Non OPT.
- Peningkatan dukungan fasilitasi sarana dan prasarana perkebunan.
- Pembinaan kelembagaan, SDM pelaku usaha perkebunan dan peningkatan akses permodalan.
- Pengembangan penanganan pasca panen, teknologi pengolahan dan pemasaran produk perkebunan.

2. WKPP-II (Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta dan Kab. Subang), wilayah ini memiliki luas total wilayah perkebunan sebesar

41.487 Ha (Tahun 2012) atau sekitar 3,73% terhadap total luas WKPP-II dan sekitar 1,12% dari Luas Provinsi Jawa Barat. Di Wilayah ini terdapat 25.407 Ha Perkebunan Rakyat (61%), 2.432 Ha Perkebunan Besar Swasta (6%), dan 13.649 Ha Perkebunan Besar Negara (33%).

Jenis Komoditas yang dominan di wilayah ini adalah: Kelapa Dalam (29%), Karet (21%), Teh (18%), Tebu (12%), Cengkeh (7%), Kopi (4%), Kopi (4%), Kelapa Sawit (3%), Kakao (1%), Aren (1%), Kapok (1%), Lada (1%) dan lainnya (Sereh Wangi, Pinang, Panili, Pandan, Nilam, Kemiri Sunan, Jambu Mete, Kemiri dan Tembakau)

Fokus pengembangan sub sektor perkebunan di wilayah ini perlu diarahkan sebagai berikut:

- Mempertahankan luas lahan eksisting perkebunan melalui upaya rehabilitasi, peremajaan, intensifikasi serta pendekatan regulasi pertanahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Optimasi pengembangan komoditas strategis (Teh, Kopi, Karet, Kakao) melalui pengembangan teknologi budidaya dan peningkatan pemanfaatan benih unggul bersertifikat.
- Pengendalian Gangguan Usaha Perkebunan, baik Gangguan OPT maupun Non OPT.
- Peningkatan dukungan fasilitasi sarana dan prasarana perkebunan.
- Pembinaan kelembagaan, SDM pelaku usaha perkebunan dan peningkatan akses permodalan.
- Pengembangan penanganan pasca panen, teknologi pengolahan dan pemasaran produk perkebunan.

3. WKPP-III (Kab. Cirebon, Kota Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka dan Kab. Kuningan), wilayah ini memiliki luas total wilayah perkebunan sebesar 53.675 Ha (Tahun 2012) atau sekitar 9,36% terhadap total luas WKPP-III dan sekitar 1,45% dari Luas Provinsi Jawa Barat. Di Wilayah ini terdapat 46.504 Ha Perkebunan Rakyat (87%), 113 Ha Perkebunan Besar Swasta (0,21%), dan 7.058 Ha Perkebunan Besar Negara (13%).

Jenis Komoditas yang dominan di wilayah ini adalah: Kelapa Dalam (28%), Tebu (31%), Cengkeh (9%), Kopi (5%), Tembakau (4%), Kapok (4%), Aren (3%), Kemiri (2%), Teh (1%), Pala (1%), Nilam (1%), Lada (1%), Jarak (1%), dan

Lainnya (Pinang, Panili, Pandan, Kelapa Hibrida, Kayu Manis, Kakao, Kenanga, Kemiri Sunan, Jambu Mete, Karet, Kayu Manis dan Kina).

Fokus pengembangan sub sektor perkebunan di wilayah ini perlu diarahkan sebagai berikut:

- Mempertahankan luas lahan eksisting perkebunan melalui upaya rehabilitasi, peremajaan, intensifikasi serta pendekatan regulasi pertanahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Optimasi pengembangan komoditas strategis (Teh, Kopi, Karet, Kakao) melalui pengembangan teknologi budidaya dan peningkatan pemanfaatan benih unggul bersertifikat.
- Pengendalian Gangguan Usaha Perkebunan, baik Gangguan OPT maupun Non OPT.
- Peningkatan dukungan fasilitasi sarana dan prasarana perkebunan.
- Pembinaan kelembagaan, SDM pelaku usaha perkebunan dan peningkatan akses permodalan. Pengembangan penanganan pasca panen, teknologi pengolahan dan pemasaran produk perkebunan.

4. WKPP-IV (Kab. Bandung, Kota Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Sumedang, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kota Tasik, Kab. Ciamis, Kota Banjar dan Kab. Pangandaran), wilayah ini memiliki luas total wilayah perkebunan sebesar 254.966 Ha (Tahun 2012) atau sekitar 18,65% terhadap total luas WKPP-IV dan sekitar 6,87% dari Luas Provinsi Jawa Barat. Di Wilayah ini terdapat 208.324 Ha Perkebunan Rakyat (82%), 20.170 Ha Perkebunan Besar Swasta (8%), dan 26.471 Ha Perkebunan Besar Negara (10%).

Jenis Komoditas yang dominan di wilayah ini adalah: Kelapa Dalam (45%), Teh (17%), Karet (9%), Kopi (8%), Cengkeh (5%), Aren (3%), Kakao (3%), Tembakau (3%), Kelapa Sawit (1%), Lada (1%), Akar Wangi (1%), Jarak (1%), dan lainnya (Jambu Mete, Pinang, Panili, Pandan, Nilam, Kemiri, Kemiri Sunan, Mendong, Kenanga, Kayu Manis dan Kelapa Hibrida)

Fokus pengembangan sub sektor perkebunan di wilayah ini perlu diarahkan sebagai berikut:

- Mempertahankan luas lahan eksisting perkebunan melalui upaya rehabilitasi, peremajaan, intensifikasi serta pendekatan regulasi pertanahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Optimasi pengembangan komoditas strategis (Teh, Kopi, Karet, Kakao) melalui pengembangan teknologi budidaya dan peningkatan pemanfaatan benih unggul bersertifikat.
- Pengendalian Gangguan Usaha Perkebunan, baik Gangguan OPT maupun Non OPT.
- Peningkatan dukungan fasilitasi sarana dan prasarana perkebunan.
- Pembinaan kelembagaan, SDM pelaku usaha perkebunan dan peningkatan akses permodalan.
- Pengembangan penanganan pasca panen, teknologi pengolahan dan pemasaran produk perkebunan.

Dalam rangka pengembangan perwilayahan perkebunan, kebijakannya dilakukan secara terpadu dengan menggunakan pendekatan pengembangan agribisnis perkebunan, berbasis kawasan dengan mempertimbangan kelayakan skala ekonomi.

5.5.2 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam

Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. Perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.

Pengembangan sumber daya manusia perkebunan dilaksanakan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan/atau metode pengembangan lainnya untuk meningkatkan keterampilan, profesionalisme, kemandirian, dan meningkatkan dedikasi

Sasaran pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) perkebunan Jawa Barat difokuskan kepada upaya peningkatan kompetensi penguasaan teknologi perkebunan, serta peningkatan wawasan dan pengalaman dalam pengembangan usaha di bidang perkebunan, termasuk didalamnya upaya peningkatan peran dan kualitas kelembagaan petani perkebunan, serta peningkatan dukungan akses permodalannya.

Aspek pembiayaan usaha perkebunan pada dasarnya bersumber dari pelaku usaha perkebunan, masyarakat, serta lembaga pendanaan dalam dan luar negeri, Pemerintah, provinsi, maupun dari kabupaten/kota. Dalam hal ini peran pemerintah

adalah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya lembaga keuangan perkebunan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik usaha perkebunan. Adapun pembiayaan yang bersumber dari Pemerintah, Provinsi, dan kabupaten/kota adalah diutamakan untuk para pekebun.

Pemberdayaan usaha perkebunan pada dasarnya dilaksanakan oleh Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota bersama pelaku usaha perkebunan serta lembaga terkait lainnya, yang meliputi: fasilitasi sumber pembiayaan/permodalan; menghindari pengenaan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; fasilitasi pelaksanaan ekspor hasil perkebunan; mengutamakan hasil perkebunan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri; mengatur pemasukan dan pengeluaran hasil perkebunan; dan/atau memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi.

Pengembangan perusahaan perkebunan dilakukan melalui sistem kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan antara pihak perusahaan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan, antara lain dalam bentuk kerja sama penyediaan sarana produksi, kerja sama produksi, pengelolaan dan pemasaran, transportasi, kerja sama operasional, kepemilikan saham, maupun pelaksanaan jasa pendukung lainnya.

Pengembangan usaha industri pengelolaan hasil perkebunan dilakukan untuk memperoleh nilai tambah yang berdaya saing, melalui penerapan system dan usaha agribisnis perkebunan. Dalam hal ini pemerintah berperan menetapkan system mutu produk olahan hasil perkebunan dan pedoman industri pengolahan hasil perkebunan yang baik dan benar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Untuk mewujudkan agribisnis perkebunan Jawa Barat yang maju dan modern, maka segenap pelaku usaha perkebunan, termasuk asosiasi pemasaran, asosiasi komoditas, masyarakat dan kelembagaan lainnya, harus bekerja sama menyelenggarakan informasi pasar, promosi serta menumbuhkembangkan pusat pemasaran baik di dalam maupun di luar negeri.

Sebagai upaya perwujudan pengembangan agribisnis perkebunan yang maju, sejahtera dan berdaya saing, maka disamping mempertahankan kondisi luas lahan eksisting, juga harus dilakukan berbagai upaya lainnya, yaitu: peningkatan kualitas benih, pengembangan teknologi budidaya yang ramah lingkungan, pengendalian hama penyakit tanaman, pengendalian gangguan usaha perkebunan, peningkatan teknologi

pasca panen, mutu hasil dan pemasarannya, serta memperhatikan perijinan usaha perkebunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.5.3 Komoditas

Jenis komoditas binaan perkebunan Jawa Barat adalah 30 Jenis, terdiri dari: Teh, Kopi, Kakao, Karet, Cengkeh, Kelapa, Tebu, Tembakau, Akar Wangi, Kemiri Sunan, Nilam, Lada, Panili, Aren, Kina, Kemiri, Kapok, Pandan, Mendong, Jarak, Sereh Wangi, Pala, Kayu Manis, Kumis Kucing, Kenanga, Kelapa Hibrida, Jambu Mete, Gutta Percha, Pinang, dan Kelapa Sawit.

Ke-30 komoditas tersebut keberadaannya secara umum tersebar di hampir seluruh Kabupaten/Kota se Jawa Barat, yang diantaranya memiliki kekhasan tumbuh dominan di suatu daerah, seperti Akar Wangi di Kabupaten Garut, Tebu di wilayah Ciayumajakuning, dan Guthaperca hanya di Kabupaten Sukabumi. Disamping itu perkembangan produksi dan produktivitas beberapa komoditas tersebut dalam 5 tahun terakhir ada yang mengalami peningkatan seperti Kopi, Aren, Karet dan Kelapa Sawit, tetapi sebagian besarnya mengalami kecenderungan penurunan atau fluktuatif mengikuti kondisi pasar.

Sebagai upaya peningkatan fokus pengembangan komoditas, maka dari ke-30 komoditas tersebut selanjutnya dikategorikan kedalam 3 jenis, yaitu:

- 1) Komoditas strategis merupakan komoditas andalan perkebunan daerah yang secara teknis budidaya sudah memasyarakat, sangat dikenal dan dikuasai oleh sebagian besar pelaku usaha perkebunan di Daerah, wilayah penyebarannya secara kuantitatif dan kualitatif merata di Daerah, merupakan komoditas historis berkelanjutan; dan secara ekonomi dapat diandalkan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah.
- 2) Komoditas prospektif merupakan komoditas yang mempunyai keunggulan komparatif tertentu, baik dari segi kemudahan pasar, mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, mempunyai fungsi hidrologis dan mempunyai potensi nilai tambah pelaku usaha perkebunan.
- 3) Komoditas unggulan spesifik lokal merupakan komoditas tertentu yang hanya ada di wilayah Kabupaten/Kota dan mempunyai potensi untuk menjadi komoditas andalan Kabupaten/Kota sesuai dengan keunggulannya.

Pengkategorian komoditas tersebut dilakukan untuk memudahkan pengawalan fokus pengembangan komoditas berdasarkan skala prioritas kebijakan pembangunan perkebunan.

Dalam rangka melindungi keberadaan komoditas tanaman perkebunan Jawa Barat yang memiliki keunggulan atau kekhasan tertentu, maka sesuai dengan ketentuan perundangan Pemerintah Daerah akan menetapkan wilayah geografis penghasil produk perkebunan bersifat spesifik lokasi untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis, meliputi jenis tanaman perkebunan dan hubungannya dengan cita rasa spesifik hasil tanaman serta tata cara penetapan batas wilayah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.6. RENCANA PENDANAAN INDIKATIF

Kegiatan pembangunan perkebunan di Provinsi Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memfasilitasi sebesar-besarnya partisipasi masyarakat dengan mendayagunakan keterpaduan kegiatan yang dibiayai oleh APBN, APBD, Swasta dan sumber-sumber dana pembangunan lainnya. Dana-dana tersebut termasuk yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Implementasi pembangunan perlu adanya dukungan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat guna tercapainya program pembangunan jangka menengah selama kurun waktu 2014 – 2018 seperti yang telah disajikan pada Tabel 5.1 di atas

1. Tahun Anggaran 2014

**Tabel 5.2.a : Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif
Tahun 2014**

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis		Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis, Indikator Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif		
			Narasi	Indikator				2014		
								Volume	Rp (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan	1.1 Meningkatkan Ketersediaan Produk Perkebunan secara optimal dan berkualitas	1.1.1 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan	1) Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan (%)	1) Program Peningkatan Produksi Pertanian (APBD). 2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)	1) Kegiatan yang berkaitan dengan Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan (%)	2,10	13.500	
								Peningkatan Produksi Komoditas Strategis Perkebunan (ton)	373.030	
								a. Teh	108.000	
								b. Kopi	17.000	
								c. Karet	33.660	
								d. Kakao	2.250	
								e. Kelapa	105.100	
								f. Cengkeh	6.120	
								g. Tebu	92.750	
							h. Tembakau	8.150		
							1)	Luas Intensifikasi (Ha)	2.400	5.500
							2)	Luas Rehabilitasi (Ha)	1.500	5.500
							3)	Luas Peremajaan (Ha)	1.150	2.500
				2) Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan (%)	1) Program Peningkatan Produksi Pertanian (APBD). 2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan	2) Kegiatan yang berkaitan dengan Pengembangan Teknologi Budidaya dan dukungan sarana produksi tanaman perkebunan	Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan (%)	2,10	950	
								Peningkatan Produktivitas Komoditas Strategis Perkebunan (Kg/Ha)		
								a. Teh	1.455	
								b. Kopi	800	
								c. Karet	500	
								d. Kakao	459	
e. Kelapa	791									

*Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018*

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis		Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis, Indikator Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatorif			
			Narasi	Indikator					2014			
									Volume	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10		
					Berkelanjutan (APBN)			f. Cengkeh	335			
								g. Tebu	4.475			
								h. Tembakau	816			
							4)	Jumlah Demplot/Demfarm/Dem Area Teknologi Budidaya tanaman perkebunan (lokasi)	69	550		
							5)	Jumlah sarana budidaya perkebunan yang tersalurkan (poktan)	4	400		
				1.1.2 Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat	3) Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas Strategis (%)	1) Program Peningkatan Produksi Pertanian (APBD); 2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)	3) Kegiatan yang berkaitan dengan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Perkebunan	Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas Strategis (%)		2,10	7.040	
										Jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas Strategis (pohon/batang)	28.500.000	
										a. Teh	4.500.000	
										b. Kopi	3.500.000	
										c. Karet	300.000	
										d. Kakao	1.500.000	
										e. Kelapa	125.000	
										f. Cengkeh	225.000	
										g. Tebu	16.500.000	
										h. Tembakau	1.500.000	
										i. Komoditas Lainnya	350.000	
									6)	Jumlah benih tanaman perkebunan yang tersalurkan (Phn/Btg)	1.250.000	4.750
									7)	Jumlah Pengembangan Teknologi Pembenihan (jenis)	1	1.700
									8)	Jumlah Penangkar Benih yang terbina (penangkar)	60	240
									9)	Jumlah Penetapan Kebun Sumber Benih (lokasi)	4	350
						4) Prosentase Peningkatan Benih	1) Program Peningkatan	4) Kegiatan yang berkaitan dengan	Prosentase Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang Tersertifikasi (%)		2,10	1.400

*Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018*

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis		Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis, Indikator Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatorif	
			Narasi	Indikator					2014	
									Volume	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
				tanaman perkebunan yang Tersertifikasi (%)	Produksi Pertanian (APBD); 2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)	sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan		Jumlah benih tanaman perkebunan yang tersertifikasi (pohon/batang)	28.500.000	550
							10)	Jumlah Pengembangan Inovasi Pengujian Mutu Benih (jenis)	2	150
							11)	Jumlah Penanganan kasus Peredaran Benih Tanaman Perkebunan yang tdk bersertifikat (Kasus)	2	700
2.	Meningkatkan Pemberdayaa n Sumber Daya Perkebunan Secara Berkelanjutan	2.1 Meningkatkan Kinerja Sumber Daya Perkebunan secara berkelanjutan	2.1.1 Terkendalnya Sumber Daya Lahan Perkebunan	5) Prosentase Luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap Luas Jawa Barat (%)	1) Program Pemberdayaan Sumberdaya Pertanian; 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP); 3) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)	5) Kegiatan yang berkaitan dengan Penataan dan Konservasi Sumber Daya Lahan, Antisipasi Perubahan Iklim, Pengendalian Gangguan Usaha serta Pendukung Sarana Prasarana Perkebunan,	Prosentase Luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat (%)		13,00	3.700
								Luas Minimum Eksisting Lahan Perkebunan yang terkendalikan (Ha)	482.238	
							12)	Jumlah dokumen Norma, Standar, Kebijakan, Pedoman (NSKP) Penataan dan Pelestarian Lahan Perkebunan (Dokumen)	2	200
							13)	Jumlah Demplot/Demfarm penataan dan penerapan teknologi pelestarian lahan perkebunan (lokasi)	3	700
							14)	Perluasan areal perkebunan (Ha)	100	1.000
							15)	Jumlah Pengembangan Optimasi Lahan (Ha)	100	150
							16)	Jumlah Pengembangan Konservasi Air dan Anomali Iklim (Unit)	10	150
							17)	Jumlah Pengembangan Sumber Air (unit)	9	800
							18)	Jumlah Penanganan Kasus Gangguan Usaha Perkebunan (Kasus)	3	700

*Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018*

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis		Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis, Indikator Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatorif	
			Narasi	Indikator					2014	
									Volume	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
			2.1.2 Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan	6) Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) (%)	1) Program Pemberdayaan Sumberdaya Pertanian (APBD); 2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)	6) Kegiatan yang berkaitan dengan Pembinaan Kompetensi SDM, Kelembagaan, dan akses Permodalan Usaha Perkebunan	Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) (%)		1,00	4.550
								Capaian Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) rata-rata tahunan (point)	110	
							19)	Jumlah Hasil Pembinaan Kompetensi SDM Pelaku Usaha Perkebunan (Org)	3.225	3.750
							20)	Jumlah Hasil Pembinaan Kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan (Kelompok/lembaga)	125	700
							21)	Jumlah Akses Permodalan Usaha Perkebunan (kali)	2	100
			2.1.3 Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan	7) Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan (%)	1.Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tanaman, ternak dan ikan (APBD); 2.Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)	7) Kegiatan yg berkaitan dengan Pengembangan sarana teknologi dan Aplikasi Pengendalian Hama Terpadu (PHT)	Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan (%)		-1,00	3.730
								Luas wilayah Maksimum yang terindikasi serangan OPT Perkebunan (Ha)	38.000	
							22)	luas penanggulangan OPT melalui penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan (Ha)	650	1.600
							23)	Jumlah OPT hasil eksplorasi dan seleksi jenis - jenis agensia hayati musuh alami untuk PHT perkebunan (jenis)	7	120
							24)	Jumlah pengembangan Bahan dan alat Teknologi PHT		
								a. Agens Hayati (ton)	7	270
								b. Petisida Nabati (kwintal)	5	270
								c. Musuh Alami (jenis)	3	270
							25)	Jumlah aplikasi pengujian, pengendalian dan penanggulangan OPT perkebunan (lokasi)	5	1.200

*Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018*

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis		Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis, Indikator Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatorif		
			Narasi	Indikator				2014		
								Volume	Rp (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.	Meningkatkan Mutu Hasil dan Nilai Tambah Produk Usaha Perkebunan	3.1 Meningkatkan Daya Saing Produk Perkebunan	3.1.1 Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI	8) Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI (%)	1) Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan (APBD); 2) Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian (APBN)	8) Kegiatan yg berkaitan dengan Peningkatan Mutu dan Pengolahan Produk Perkebunan	Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI (%)		2,10	3.720
								Jumlah Pelaku Usaha Perkebunan yang menerapkan sistem jaminan Mutu sesuai SNI (org)	50	
							26)	Jumlah Produk yang difasilitasi uji mutu Hasil Perkebunan (jenis)	8	120
							27)	Jumlah Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan (jenis)	1	1.100
							28)	Jumlah Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan yang tersalurkan (Kel Usaha Tani)	5	2.500
							Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan (%)		2,10	3.600
								Jumlah Volume Ekspor Produk Perkebunan Jawa Barat (Kg)	225.000.000	
							29)	Jumlah Kab/Kota yang aktif menjalankan Pelayanan Informasi Pasar (PIP) Produk Perkebunan (Kab/Kota)	15	500
							30)	Jumlah promosi pemasaran hasil perkebunan di dalam dan luar negeri (kali)	3	2.000
							31)	Jumlah Pengembangan Agrowisata Perkebunan (lokasi)	1	150
		32)	Jumlah Pelayanan Rekomendasi Perijinan Usaha Perkebunan (Kali)	4	700					
		33)	Jumlah Jalinan Kemitraan Usaha Perkebunan (Kel Usaha Tani)	1	250					

*Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018*

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis		Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis, Indikator Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif	
			Narasi	Indikator					2014	
									Volume	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
										42.190

2. Tahun Anggaran 2015

**Tabel 5.2.b : Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif
Tahun 2015**

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis		Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis, Indikator Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif		
			Narasi	Indikator				2015		
								Volume	Rp (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan	1.1 Meningkatkan Ketersediaan Produk Perkebunan secara optimal dan berkualitas	1.1.1 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan	1) Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan (%)	1) Program Peningkatan Produksi Pertanian (APBD). 2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)	1) Kegiatan yang berkaitan dengan Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan (%)	2,20	14.750	
								Peningkatan Produksi Komoditas Strategis Perkebunan (ton)	376.370	
								a. Teh	108.500	
								b. Kopi	17.350	
								c. Karet	34.320	
								d. Kakao	2.260	
								e. Kelapa	106.200	
								f. Cengkeh	6.240	
								g. Tebu	93.250	
							h. Tembakau	8.250		
							1)	Luas Intensifikasi (Ha)	2.400	6.000
							2)	Luas Rehabilitasi (Ha)	1.500	6.000
							3)	Luas Peremajaan (Ha)	1.150	2.750
				2) Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan (%)	1) Program Peningkatan Produksi Pertanian (APBD). 2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu	2) Kegiatan yang berkaitan dengan Pengembangan Teknologi Budidaya dan dukungan sarana produksi tanaman perkebunan	Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan (%)	2,20	1.075	
								Peningkatan Produktivitas Komoditas Strategis Perkebunan (ton/Ha)		
								a. Teh	1.460	
								b. Kopi	825	
								c. Karet	525	

*Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018*

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis		Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis, Indikator Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatorif		
			Narasi	Indikator					2015		
									Volume	Rp (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	
					Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)			d. Kakao	468		
								e. Kelapa	806		
								f. Cengkeh	340		
								g. Tebu	4.500		
								h. Tembakau	832		
							4)	Jumlah Demplot/Demfarm/Dem Area Teknologi Budidaya tanaman perkebunan (lokasi)	70	575	
							5)	Jumlah Sarana budidaya perkebunan yang tersalurkan (poktan)	5	500	
							Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas Strategis (%)		2,20	7.360	
								Jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas Strategis (pohon/batang)	29.127.000		
									a. Teh	4.599.000	
									b. Kopi	3.577.000	
			c. Karet	306.600							
			d. Kakao	1.533.000							
			e. Kelapa	127.750							
			f. Cengkeh	229.950							
			g. Tebu	16.863.000							
			h. Tembakau	1.533.000							
			i. Komoditas Lainnya	357.700							
			6)	Jumlah benih tanaman perkebunan yang tersalurkan (Phn/Btg)	1.275.000	4.925					
			7)	Jumlah Pengembangan Teknologi Pembenihan (jenis)	1	1.800					
			8)	Jumlah Penangkar Benih yang terbina (penangkar)	65	260					
			1.1.2 Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat	3) Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas Strategis (%)	1) Program Peningkatan Produksi Pertanian (APBD); 2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)	3) Kegiatan yang berkaitan dengan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Perkebunan					

*Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018*

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis		Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis, Indikator Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatorif	
			Narasi	Indikator					2015	
									Volume	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
				4) Prosentase Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang Tersertifikasi (%)	1) Program Peningkatan Produksi Pertanian (APBD); 2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)	4) Kegiatan yang berkaitan dengan sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	9)	Jumlah Penetapan Kebun Sumber Benih (lokasi)	4	375
							Prosentase Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang Tersertifikasi (%)		2,20	1.525
								Jumlah benih tanaman perkebunan yang tersertifikasi (pohon/batang)	29.127.000	575
							10)	Jumlah Pengembangan Inovasi Pengujian Mutu Benih (jenis)	2	150
							11)	Jumlah Penanganan kasus Peredaran Benih Tanaman Perkebunan yang tdk bersertifikat (Kasus)	2	800
2.	Meningkatkan Pemberdayaa n Sumber Daya Perkebunan Secara Berkelanjutan	2.1 Meningkatkan Kinerja Sumber Daya Perkebunan secara berkelanjutan	2.1.1 Terkendalnya Sumber Daya Lahan Perkebunan	5) Prosentase Luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat (%)	1) Program Pemberdayaan Sumberdaya Pertanian; 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP); 3) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)	5) Kegiatan yang berkaitan dengan Penataan dan Konservasi Sumber Daya Lahan, Antisipasi Perubahan Iklim, Pengendalian Gangguan Usaha serta Pendukungan Sarana Prasarana Perkebunan,	Prosentase Luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap Luas Jawa Barat (%)		13,00	4.100
								Luas Minimum Eksisting Lahan Perkebunan yang terkendalikan (Ha)	482.238	
							12)	Jumlah dokumen Norma, Standar, Kebijakan, Pedoman (NSKP) Penataan dan Pelestarian Lahan Perkebunan (Dokumen)	2	225
							13)	Jumlah Demplot/Demfarm penataan dan penerapan teknologi pelestarian lahan perkebunan (lokasi)	3	800
							14)	Perluasan areal perkebunan (Ha)	100	1.100
							15)	Jumlah Pengembangan Optimasi Lahan (Ha)	100	175
							16)	Jumlah Pengembangan Konservasi Air dan Anomali Iklim (Unit)	10	175
							17)	Jumlah Pengembangan Sumber Air (unit)	9	825

*Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018*

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis		Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis, Indikator Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatorif	
			Narasi	Indikator					2015	
									Volume	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
							18)	Jumlah Penanganan Kasus Gangguan Usaha Perkebunan (Kasus)	3	800
			2.1.2 Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan	6) Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) (%)	1) Program Pemberdayaan Sumberdaya Pertanian (APBD); 2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)	6) Kegiatan yang berkaitan dengan Pembinaan Kompetensi SDM, Kelembagaan, dan akses Permodalan Usaha Perkebunan	Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) (%)		1,00	4.655
								Capaian Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) rata-rata tahunan (point)	111	
							19)	Jumlah Hasil Pembinaan Kompetensi SDM Pelaku Usaha Perkebunan (Org)	3.250	3.750
							20)	Jumlah Hasil Pembinaan Kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan (Kelompok/lembaga)	130	800
							21)	Jumlah Akses Permodalan Usaha Perkebunan (kali)	2	105
			2.1.3 Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan	7) Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan (%)	1.Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tanaman, ternak dan ikan (APBD); 2.Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)	7) Kegiatan yg berkaitan dengan Pengembangan sarana teknologi dan Aplikasi Pengendalian Hama Terpadu (PHT)	Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan (%)		-1,00	3.980
								Luas wilayah Maksimum yang terindikasi serangan OPT Perkebunan (Ha)	37.500	
							22)	luas penanggulangan OPT melalui penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan (Ha)	660	1.700
							23)	Jumlah OPT hasil eksplorasi dan seleksi jenis - jenis agensia hayati musuh alami untuk PHT perkebunan (jenis)	7	140
							24)	Jumlah pengembangan Bahan dan alat Teknologi PHT		
								a. Agens Hayati (ton)	7	280
								b. Petisida Nabati (kwintal)	5	280
								c. Musuh Alami (jenis)	3	280

*Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018*

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis		Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis, Indikator Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatorif	
			Narasi	Indikator					2015	
									Volume	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
							25)	Jumlah aplikasi pengujian, pengendalian dan penanggulangan OPT perkebunan (lokasi)	5	1.300
3.	Meningkatkan Mutu Hasil dan Nilai Tambah Produk Usaha Perkebunan	3.1 Meningkatkan Daya Saing Produk Perkebunan	3.1.1 Meningkatnya Penerapkan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI	8) Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI (%)	1) Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan (APBD); 2) Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian (APBN)	8) Kegiatan yg berkaitan dengan Peningkatan Mutu dan Pengolahan Produk Perkebunan	Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI (%)		2,20	4.090
								Jumlah Pelaku Usaha Perkebunan yang menerapkan sistem jaminan Mutu sesuai SNI (org)	51	
							26)	Jumlah Produk yang difasilitasi uji mutu Hasil Perkebunan (jenis)	8	140
							27)	Jumlah Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan (jenis)	2	1.200
							28)	Jumlah Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan yang tersalurkan (kel usaha tani)	5	2.750
			3.1.2 Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan	9) Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan (%)	1) Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan (APBD); 2) Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir Pemasaran dan Ekspor Hasil	9) Kegiatan yg berkaitan dengan Pemasaran Produk dan Pengembangan Usaha Perkebunan	Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan (%)		0,02	4.100
								Jumlah Volume Ekspor Produk Perkebunan Jawa Barat (Kg)	230.000.000	
							29)	Jumlah Kab/Kota yang aktif menjalankan Pelayanan Informasi Pasar (PIP) Produk Perkebunan (Kab/Kota)	15	600
							30)	Jumlah promosi pemasaran hasil perkebunan di dalam dan luar negeri (kali)	4	2.250
							31)	Jumlah Pengembangan Agrowisata Perkebunan (lokasi)	2	175

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis		Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis, Indikator Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif	
			Narasi	Indikator					2015	
									Volume	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
					Pertanian (APBN)		32)	Jumlah Pelayanan Rekomendasi Perijinan Usaha Perkebunan (Kali)	4	800
							33)	Jumlah jalinan Kemitraan Usaha Perkebunan (kel usaha tani)	3	275
										45.635

3. Tahun Anggaran 2016

**Tabel 5.2.c : Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif
Tahun 2016**

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis		Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis, Indikator Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif		
			Narasi	Indikator					2016		
									Volume	Rp (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	
1.	Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan	1.1 Meningkatkan Ketersediaan Produk Perkebunan secara optimal dan berkualitas	1.1.1 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan	1) Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan (%)	1) Program Peningkatan Produksi Pertanian (APBD). 2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)	1) Kegiatan yang berkaitan dengan Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan (%)		2,30	16.000	
								Peningkatan Produksi Komoditas Strategis Perkebunan (ton)		379.860	
								a. Teh		109.000	
								b. Kopi		17.750	
								c. Karet		34.980	
								d. Kakao		2.270	
								e. Kelapa		107.300	
								f. Cengkeh		6.360	
								g. Tebu		93.750	
								h. Tembakau		8.450	
							1)	Luas Intensifikasi (Ha)	2.400	6.500	
							2)	Luas Rehabilitasi (Ha)	1.500	6.500	

*Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018*

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis		Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis, Indikator Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatorif	
			Narasi	Indikator					2016	
									Volume	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
							3)	Luas Peremajaan (Ha)	1.150	3.000
				2) Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan (%)	1) Program Peningkatan Produksi Pertanian (APBD). 2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)	2) Kegiatan yang berkaitan dengan Pengembangan Teknologi Budidaya dan dukungan sarana produksi tanaman perkebunan	Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan (%)		2,30	1.200
								Peningkatan Produktivitas Komoditas Strategis Perkebunan (ton/Ha)		
								a. Teh	1.465	
								b. Kopi	850	
								c. Karet	550	
								d. Kakao	477	
								e. Kelapa	822	
								f. Cengkeh	345	
				g. Tebu	4.525					
				h. Tembakau	848					
				4)	Jumlah Demplot/Demfarm/Dem Area Teknologi Budidaya tanaman perkebunan (lokasi)	71	600			
				5)	Jumlah Sarana budidaya perkebunan yang tersalurkan (poktan)	6	600			
			1.1.2 Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat	3) Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas Strategis (%)	1) Program Peningkatan Produksi Pertanian (APBD); 2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)	3) Kegiatan yang berkaitan dengan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Perkebunan	Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas Strategis (%)		2,30	7.680
								Jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas Strategis (pohon/batang)	29.796.921	
								a. Teh	4.704.777	
								b. Kopi	3.659.271	
								c. Karet	313.652	
								d. Kakao	1.568.259	
								e. Kelapa	130.688	
								f. Cengkeh	235.239	
			g. Tebu	17.250.849						

*Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018*

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis		Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis, Indikator Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatorif		
			Narasi	Indikator					2016		
									Volume	Rp (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	
								h. Tembakau	1.568.259		
								i. Komoditas Lainnya	365.927		
							6)	Jumlah benih tanaman perkebunan yang tersalurkan (Phn/Btg)	1.300.000	5.100	
							7)	Jumlah Pengembangan Teknologi Pembenihan (jenis)	1	1.900	
							8)	Jumlah Penangkar Benih yang terbina (penangkar)	70	280	
							9)	Jumlah Penetapan Kebun Sumber Benih (lokasi)	5	400	
					4) Prosentase Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang Tersertifikasi (%)	1) Program Peningkatan Produksi Pertanian (APBD); 2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)	4) Kegiatan yang berkaitan dengan sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	Prosentase Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang Tersertifikasi (%)		2,30	1.650
								Jumlah benih tanaman perkebunan yang tersertifikasi (pohon/batang)	29.796.921	600	
				10)				Jumlah Pengembangan Inovasi Pengujian Mutu Benih (jenis)	2	150	
				11)				Jumlah Penanganan kasus Peredaran Benih Tanaman Perkebunan yang tdk bersertifikat (Kasus)	3	900	
2.	Meningkatkan Pemberdayaa n Sumber Daya Perkebunan Secara Berkelanjutan	2.1 Meningkatkan Kinerja Sumber Daya Perkebunan secara berkelanjutan	2.1.1 Terkendalinya Sumber Daya Lahan Perkebunan	5) Prosentase Luas minimum eksisting lahan terhadap luas Jawa Barat (%)	1) Program Pemberdayaan Sumberdaya Pertanian; 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP); 3) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas	5) Kegiatan yang berkaitan dengan Penataan dan Konservasi Sumber Daya Lahan, Antisipasi Perubahan Iklim, Pengendalian Gangguan Usaha serta Pendukungan Sarana Prasarana Perkebunan,	Prosentase Luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat (%)		13,00	4.450	
								Luas Minimum Eksisting Lahan Perkebunan yang terkendalikan (Ha)	482.238		
							12)	Jumlah dokumen Norma, Standar, Kebijakan, Pedoman (NSKP) Penataan dan Pelestarian Lahan Perkebunan (Dokumen)	2	200	
							13)	Jumlah Demplot/Demfarm penataan dan penerapan teknologi pelestarian lahan perkebunan (lokasi)	3	900	

*Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018*

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis		Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis, Indikator Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatorif	
			Narasi	Indikator					2016	
									Volume	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
					dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)		14)	Perluasan areal perkebunan (Ha)	100	1.200
							15)	Jumlah Pengembangan Optimasi Lahan (Ha)	100	200
							16)	Jumlah Pengembangan Konservasi Air dan Anomali Iklim (Unit)	10	200
							17)	Jumlah Pengembangan Sumber Air (unit)	9	850
							18)	Jumlah Penanganan Kasus Gangguan Usaha Perkebunan (Kasus)	3	900
			2.1.2 Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan	6) Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) (%)	1) Program Pemberdayaan Sumberdaya Pertanian (APBD); 2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)	6) Kegiatan yang berkaitan dengan Pembinaan Kompetensi SDM, Kelembagaan, dan akses Permodalan Usaha Perkebunan	Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) (%)		1,00	4.760
								Capaian Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) rata-rata tahunan (point)	112	
							19)	Jumlah Hasil Pembinaan Kompetensi SDM Pelaku Usaha Perkebunan (Org)	3.275	3.750
							20)	Jumlah Hasil Pembinaan Kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan (Kelompok/lembaga)	135	900
							21)	Jumlah Akses Permodalan Usaha Perkebunan (kali)	3	110
			2.1.3 Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan	7) Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan (%)	1.Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tanaman, ternak dan ikan (APBD); 2.Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan	7) Kegiatan yg berkaitan dengan Pengembangan sarana teknologi dan Aplikasi Pengendalian Hama Terpadu (PHT)	Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan (%)		-1,00	4.230
								Luas wilayah Maksimum yang terindikasi serangan OPT Perkebunan (Ha)	37.000	
							22)	luas penanggulangan OPT melalui penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan (Ha)	670	1.800
							23)	Jumlah OPT hasil eksplorasi dan seleksi jenis - jenis agensia hayati musuh alami untuk PHT perkebunan (jenis)	7	160

*Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018*

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis		Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis, Indikator Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatorif	
			Narasi	Indikator					2016	
									Volume	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
					Berkelanjutan (APBN)		24)	Jumlah pengembangan Bahan dan alat Teknologi PHT		
								a. Agens Hayati (ton)	7	290
								b. Petisida Nabati (kwintal)	5	290
								c. Musuh Alami (jenis)	3	290
							25)	Jumlah aplikasi pengujian, pengendalian dan penanggulangan OPT perkebunan (lokasi)	5	1.400
3.	Meningkatkan Mutu Hasil dan Nilai Tambah Produk Usaha Perkebunan	3.1 Meningkatkan Daya Saing Produk Perkebunan	3.1.1 Meningkatnya Penerapkan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI	8) Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI (%)	1) Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan (APBD); 2) Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian (APBN)	8) Kegiatan yg berkaitan dengan Peningkatan Mutu dan Pengolahan Produk Perkebunan	Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI (%)		2,30	4.460
								Jumlah Pelaku Usaha Perkebunan yang menerapkan sistem jaminan Mutu sesuai SNI (org)	52	
							26)	Jumlah Produk yang difasilitasi uji mutu Hasil Perkebunan (jenis)	9	160
							27)	Jumlah Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan (jenis)	2	1.300
							28)	Jumlah Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan yang tersalurkan (poktan)	5	3.000
			3.1.2 Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan	9) Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan (%)	1) Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan (APBD); 2)	9) Kegiatan yg berkaitan dengan Pemasaran Produk dan Pengembangan Usaha Perkebunan	Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan (%)		2,30	4.650
								Jumlah Volume Ekspor Produk Perkebunan Jawa Barat (Kg)	235.500.000	
							29)	Jumlah Kab/Kota yang aktif menjalankan Pelayanan Informasi Pasar (PIP) Produk Perkebunan (Kab/Kota)	15	750

*Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018*

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis		Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis, Indikator Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatorif	
			Narasi	Indikator					2016	
									Volume	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
					Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian (APBN)		30)	Jumlah promosi pemasaran hasil perkebunan di dalam dan luar negeri (kali)	4	2.500
							31)	Jumlah Pengembangan Agrowisata Perkebunan (lokasi)	2	200
							32)	Jumlah Pelayanan Rekomendasi Perijinan Usaha Perkebunan (Kali)	4	900
							33)	Jumlah jalinan Kemitraan Usaha Perkebunan (kel usaha tani)	3	300
										49.080

4. Tahun Anggaran 2017

**Tabel 5.2.d : Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatorif
Tahun 2017**

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis		Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis, Indikator Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatorif	
			Narasi	Indikator					2017	
									Volume	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8		19	20
1.	Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan	1.1 Meningkatkan Ketersediaan Produk Perkebunan secara optimal dan berkualitas	1.1.1 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan	1) Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan (%)	1) Program Peningkatan Produksi Pertanian (APBD). 2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)	1) Kegiatan yang berkaitan dengan Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan (%)		2,40	17.250
								Peningkatan Produksi Komoditas Strategis Perkebunan (ton)	383.300	
								a. Teh	109.500	
								b. Kopi	18.100	
								c. Karet	35.640	
								d. Kakao	2.280	
								e. Kelapa	108.400	
								f. Cengkeh	6.480	

*Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018*

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis		Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis, Indikator Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatorif				
			Narasi	Indikator					2017				
									Volume	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8		19	20			
								g. Tebu	94.250				
								h. Tembakau	8.650				
							1)	Luas Intensifikasi (Ha)	2.400	7.000			
							2)	Luas Rehabilitasi (Ha)	1.500	7.000			
							3)	Luas Peremajaan (Ha)	1.150	3.250			
					2) Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan (%)	1) Program Peningkatan Produksi Pertanian (APBD). 2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)	2) Kegiatan yang berkaitan dengan Pengembangan Teknologi Budidaya dan dukungan sarana produksi tanaman perkebunan	Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan (%)	2,40	1.325			
										Peningkatan Produktivitas Komoditas Strategis Perkebunan (ton/Ha)			
										a. Teh	1.470		
										b. Kopi	875		
										c. Karet	575		
										d. Kakao	486		
										e. Kelapa	837		
										f. Cengkeh	350		
										g. Tebu	4.550		
										h. Tembakau	864		
										4)	Jumlah Demplot/Demfarm/Dem Area Teknologi Budidaya tanaman perkebunan (lokasi)	72	625
										5)	Jumlah Sarana budidaya perkebunan yang tersalurkan (poktan)	7	700
						1.1.2 Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat	3) Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas Strategis (%)	1) Program Peningkatan Produksi Pertanian (APBD); 2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas	3) Kegiatan yang berkaitan dengan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Perkebunan	Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas Strategis (%)		2,40	8.000
										Jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas Strategis (pohon/batang)	30.512.047		
										a. Teh	4.817.692		
										b. Kopi	3.747.094		
										c. Karet	321.179		

*Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018*

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis		Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis, Indikator Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatorif	
			Narasi	Indikator					2017	
									Volume	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8		19	20
					dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)			d. Kakao	1.605.897	
								e. Kelapa	133.825	
								f. Cengkeh	240.885	
								g. Tebu	17.664.869	
								h. Tembakau	1.605.897	
								i. Komoditas Lainnya	374.709	
							6)	Jumlah benih tanaman perkebunan yang tersalurkan (Phn/Btg)	1.325.000	5.275
							7)	Jumlah Pengembangan Teknologi Pembenihan (jenis)	1	2.000
							8)	Jumlah Penangkar Benih yang terbina (penangkar)	75	300
							9)	Jumlah Penetapan Kebun Sumber Benih (lokasi)	5	425
				4) Prosentase Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang Tersertifikasi (%)	1) Program Peningkatan Produksi Pertanian (APBD); 2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)	4) Kegiatan yang berkaitan dengan sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	Prosentase Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang Tersertifikasi (%)		2,40	1.775
								Jumlah benih tanaman perkebunan yang tersertifikasi (pohon/batang)	30.512.047	625
							10)	Jumlah Pengembangan Inovasi Pengujian Mutu Benih (jenis)	2	150
							11)	Jumlah Penanganan kasus Peredaran Benih Tanaman Perkebunan yang tdk bersertifikat (Kasus)	3	1.000
2.	Meningkatkan Pemberdayaa n Sumber Daya Perkebunan Secara Berkelanjutan	2.1 Meningkatkan Kinerja Sumber Daya Perkebunan secara berkelanjutan	2.1.1 Terjaganya Proporsi Luas eksisting minimum Lahan perkebunan	5) Prosentase Luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat (%)	1) Program Pemberdayaan Sumberdaya Pertanian; 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana	5) Kegiatan yang berkaitan dengan Penataan dan Konservasi Sumber Daya Lahan, Antisipasi Perubahan Iklim, Pengendalian Gangguan Usaha	Prosentase Luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat(%)		13,00	4.850
								Luas Minimum Eksisting Lahan Perkebunan yang terkendalikan (Ha)	482.238	
							12)	Jumlah dokumen Norma, Standar, Kebijakan, Pedoman (NSKP)	2	225

*Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018*

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis		Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis, Indikator Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatorif	
			Narasi	Indikator					2017	
									Volume	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8		19	20
					Pertanian (PSP); 3) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)	serta Pendukung Sarana Prasarana Perkebunan,		Penataan dan Pelestarian Lahan Perkebunan (Dokumen)		
							13)	Jumlah Demplot/Demfarm penataan dan penerapan teknologi pelestarian lahan perkebunan (lokasi)	3	1.000
							14)	Perluasan areal perkebunan (Ha)	100	1.300
							15)	Jumlah Pengembangan Optimasi Lahan (Ha)	100	225
							16)	Jumlah Pengembangan Konservasi Air dan Anomali Iklim (Unit)	10	225
							17)	Jumlah Pengembangan Sumber Air (unit)	9	875
							18)	Jumlah Penanganan Kasus Gangguan Usaha Perkebunan (Kasus)	3	1.000
			2.1.2 Meningkatkan Kinerja Usaha Tani Perkebunan	6) Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) (%)	1) Program Pemberdayaan Sumberdaya Pertanian (APBD); 2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)	6) Kegiatan yang berkaitan dengan Pembinaan Kompetensi SDM, Kelembagaan, dan akses Permodalan Usaha Perkebunan	Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) (%)		1,00	4.865
								Capaian Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) rata-rata tahunan (point)	113	
							19)	Jumlah Hasil Pembinaan Kompetensi SDM Pelaku Usaha Perkebunan (Org)	3.300	3.750
							20)	Jumlah Hasil Pembinaan Kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan (Kelompok/lembaga)	140	1.000
							21)	Jumlah Akses Permodalan Usaha Perkebunan (kali)	3	115
			2.1.3 Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan	7) Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan (%)	1.Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tanaman, ternak	7) Kegiatan yg berkaitan dengan Pengembangan sarana teknologi dan Aplikasi	Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan (%)		-1,00	4.480
								Luas wilayah Maksimum yang terindikasi serangan OPT Perkebunan (Ha)	36.500	

*Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018*

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis		Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis, Indikator Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatorif	
			Narasi	Indikator					2017	
									Volume	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8		19	20
					dan ikan (APBD); 2.Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)	Pengendalian Hama Terpadu (PHT)	22)	luas penanggulangan OPT melalui penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan (Ha)	680	1.900
							23)	Jumlah OPT hasil eksplorasi dan seleksi jenis - jenis agensia hayati musuh alami untuk PHT perkebunan (jenis)	7	180
							24)	Jumlah pengembangan Bahan dan alat Teknologi PHT		
								a. Agens Hayati (ton)	7	300
								b. Petisida Nabati (kwintal)	5	300
								c. Musuh Alami (jenis)	3	300
							25)	Jumlah aplikasi pengujian, pengendalian dan penanggulangan OPT perkebunan (lokasi)	5	1.500
3.	Meningkatkan Mutu Hasil dan Nilai Tambah Produk Usaha Perkebunan	3.1 Meningkatkan Daya Saing Produk Perkebunan	3.1.1 Meningkatnya Penerapkan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI	8) Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI (%)	1) Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan (APBD); 2) Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian (APBN)	8) Kegiatan yg berkaitan dengan Peningkatan Mutu dan Pengolahan Produk Perkebunan	Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI (%)		2,40	4.830
								Jumlah Pelaku Usaha Perkebunan yang menerapkan sistem jaminan Mutu sesuai SNI (org)	53	
							26)	Jumlah Produk yang difasilitasi uji mutu Hasil Perkebunan (jenis)	9	180
							27)	Jumlah Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan (jenis)	3	1.400
							28)	Jumlah Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan yang tersalurkan (kel usaha tani)	5	3.250
			3.1.2 Meningkatnya	9) Prosentase Peningkatan	1) Program Pemasaran dan	9) Kegiatan yg berkaitan dengan	Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan (%)		2,40	5.150

*Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018*

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis		Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis, Indikator Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif	
			Narasi	Indikator					2017	
									Volume	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8		19	20
			Volume Ekspor Produk Perkebunan	Volume Ekspor Produk Perkebunan (%)	Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan (APBD); 2) Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian (APBN)	Pemasaran Produk dan Pengembangan Usaha Perkebunan		Jumlah Volume Ekspor Produk Perkebunan Jawa Barat (Kg)	241.250.000	
							29)	Jumlah Kab/Kota yang aktif menjalankan Pelayanan Informasi Pasar (PIP) Produk Perkebunan (Kab/Kota)	16	850
							30)	Jumlah promosi pemasaran hasil perkebunan di dalam dan luar negeri (kali)	5	2.750
							31)	Jumlah Pengembangan Agrowisata Perkebunan (lokasi)	3	225
							32)	Jumlah Pelayanan Rekomendasi Perijinan Usaha Perkebunan (Kali)	5	1.000
							33)	Jumlah jalinan Kemitraan Usaha Perkebunan (kel usaha tani)	4	325
										52.525

5. Tahun Anggaran 2018

**Tabel 5.2.e : Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif
Tahun 2018**

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis		Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis, Indikator Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif	
			Narasi	Indikator				2018	
								Volume	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	21	22
1.	Meningkatkan Kapasitas	1.1 Meningkatkan	1.1.1 Meningkatnya	1) Prosentase Peningkatan	1) Program Peningkatan	1) Kegiatan yang berkaitan dengan	Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan (%)	2,50	18.500

*Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018*

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis		Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis, Indikator Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatorif	
			Narasi	Indikator					2018	
									Volume	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8		21	22
	Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan	Ketersediaan Produk Perkebunan secara optimal dan berkualitas	Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan	Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan (%)	Produksi Pertanian (APBD). 2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan		Peningkatan Produksi Komoditas Strategis Perkebunan (ton)	386.740	
							a. Teh	110.000		
							b. Kopi	18.450		
							c. Karet	36.300		
							d. Kakao	2.290		
							e. Kelapa	109.500		
							f. Cengkeh	6.600		
							g. Tebu	94.750		
							h. Tembakau	8.850		
							1)	Luas Intensifikasi (Ha)	2.400	7.500
							2)	Luas Rehabilitasi (Ha)	1.500	7.500
							3)	Luas Peremajaan (Ha)	1.150	3.500
				Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan (%)	2,50	1.400				
				Peningkatan Produktivitas Komoditas Strategis Perkebunan (ton/Ha)						
				a. Teh	1.475					
				b. Kopi	900					
				c. Karet	600					
				d. Kakao	495					
				e. Kelapa	853					
				f. Cengkeh	355					
				g. Tebu	4.575					
	h. Tembakau	880								
	4)	Jumlah Demplot/Demfarm/Dem Area Teknologi Budidaya tanaman perkebunan (lokasi)	73	600						

*Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018*

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis		Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis, Indikator Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatorif	
			Narasi	Indikator					2018	
									Volume	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8		21	22
							5)	Jumlah Sarana budidaya perkebunan yang tersalurkan (poktan)	8	800
			1.1.2 Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat	3) Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas Strategis (%)	1) Program Peningkatan Produksi Pertanian (APBD); 2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)	3) Kegiatan yang berkaitan dengan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Perkebunan	Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas Strategis (%)		2,50	8.320
								Jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas Strategis (pohon/batang)	31.274.848	
							a. The	4.938.134		
							b. Kopi	3.840.771		
							c. Karet	329.209		
							d. Kakao	1.646.045		
							e. Kelapa	137.170		
							f. Cengkeh	246.907		
							g. Tebu	18.106.491		
							h. Tembakau	1.646.045		
							i. Komoditas Lainnya	384.077		
							6)	Jumlah benih tanaman perkebunan yang tersalurkan (Phn/Btg)	1.350.000	5.450
							7)	Jumlah Pengembangan Teknologi Pembenihan (jenis)	1	2.100
							8)	Jumlah Penangkar Benih yang terbina (penangkar)	80	320
							9)	Jumlah Penetapan Kebun Sumber Benih (lokasi)	6	450
							Prosentase Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang Tersertifikasi (%)		2,50	1.900
								Jumlah benih tanaman perkebunan yang tersertifikasi (pohon/batang)	31.274.848	650
							10)	Jumlah Pengembangan Inovasi Pengujian Mutu Benih (jenis)	2	150

*Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018*

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis		Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis, Indikator Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatorif	
			Narasi	Indikator					2018	
									Volume	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8		21	22
					dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)		11)	Jumlah Penanganan kasus Peredaran Benih Tanaman Perkebunan yang tdk bersertifikat (Kasus)	4	1.100
2.	Meningkatkan Pemberdayaa n Sumber Daya Perkebunan Secara Berkelanjutan	2.1 Meningkatkan Kinerja Sumber Daya Perkebunan secara berkelanjutan	2.1.1 Terjaganya Proporsi Luas eksisting minimum Lahan perkebunan	5) Prosentase Luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat (%)	1) Program Pemberdayaan Sumberdaya Pertanian; 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP); 3) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)	5) Kegiatan yang berkaitan dengan Penataan dan Konservasi Sumber Daya Lahan, Antisipasi Perubahan Iklim, Pengendalian Gangguan Usaha serta Pendukung Sarana Prasarana Perkebunan,	Prosentase Luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat (%)		13,00	5.400
								Luas Minimum Eksisting Lahan Perkebunan yang terkendalikan (Ha)	482.238	
							12)	Jumlah dokumen Norma, Standar, Kebijakan, Pedoman (NSKP) Penataan dan Pelestarian Lahan Perkebunan (Dokumen)	2	300
							13)	Jumlah Demplot/Demfarm penataan dan penerapan teknologi pelestarian lahan perkebunan (lokasi)	3	1.100
							14)	Perluasan areal perkebunan (Ha)	100	1.400
							15)	Jumlah Pengembangan Optimasi Lahan (Ha)	100	300
							16)	Jumlah Pengembangan Konservasi Air dan Anomali Iklim (Unit)	10	300
							17)	Jumlah Pengembangan Sumber Air (unit)	9	900
							18)	Jumlah Penanganan Kasus Gangguan Usaha Perkebunan (Kasus)	3	1.100
					2.1.2 Meningkatnya Kinerja Usaha Tani Perkebunan	6) Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) (%)	1) Program Pemberdayaan Sumberdaya Pertanian (APBD); 2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas	6) Kegiatan yang berkaitan dengan Pembinaan Kompetensi SDM, Kelembagaan, dan akses Permodalan Usaha Perkebunan	Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) (%)	
							Capaian Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) rata-rata tahunan (point)	114		
						19)	Jumlah Hasil Pembinaan Kompetensi SDM Pelaku Usaha Perkebunan (Org)	3.325	3.750	

*Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018*

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis		Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis, Indikator Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatorif	
			Narasi	Indikator					2018	
									Volume	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8		21	22
					dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)		20)	Jumlah Hasil Pembinaan Kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan (Kelompok/lembaga)	145	1.100
							21)	Jumlah Akses Permodalan Usaha Perkebunan (kali)	4	120
			2.1.3 Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan	7) Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan (%)	1.Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tanaman, ternak dan ikan (APBD); 2.Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)	7) Kegiatan yg berkaitan dengan Pengembangan sarana teknologi dan Aplikasi Pengendalian Hama Terpadu (PHT)	Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan (%)		-1,00	4.730
								Luas wilayah Maksimum yang terindikasi serangan OPT Perkebunan (Ha)	36.000	
							22)	luas penanggulangan OPT melalui penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan (Ha)	690	2.000
							23)	Jumlah OPT hasil eksplorasi dan seleksi jenis - jenis agensia hayati musuh alami untuk PHT perkebunan (jenis)	7	200
							24)	Jumlah pengembangan Bahan dan alat Teknologi PHT		
								a. Agens Hayati (ton)	7	310
								b. Petisida Nabati (kwintal)	5	310
								c. Musuh Alami (jenis)	3	310
							25)	Jumlah aplikasi pengujian, pengendalian dan penanggulangan OPT perkebunan (lokasi)	5	1.600
3.	Meningkatkan Mutu Hasil dan Nilai Tambah Produk Usaha Perkebunan	3.1 Meningkatkan Daya Saing Produk Perkebunan	3.1.1 Meningkatnya Penerapkan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI	8) Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI (%)	1) Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan	8) Kegiatan yg berkaitan dengan Peningkatan Mutu dan Pengolahan Produk Perkebunan	Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI (%)		2,50	5.200
							Jumlah Pelaku Usaha Perkebunan yang menerapkan sistem jaminan Mutu sesuai SNI (org)	54		

*Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018*

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis		Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis, Indikator Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatorif	
			Narasi	Indikator					2018	
									Volume	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8		21	22
					(APBD); 2) Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian (APBN)		26)	Jumlah Produk yang difasilitasi uji mutu Hasil Perkebunan (jenis)	10	200
							27)	Jumlah Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan (jenis)	3	1.500
							28)	Jumlah Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan yang tersalurkan (kel usaha tani)	5	3.500
			3.1.2 Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan	9) Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan (%)	1) Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan (APBD); 2) Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian (APBN)	9) Kegiatan yg berkaitan dengan Pemasaran Produk dan Pengembangan Usaha Perkebunan	Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan (%)		2,50	5.700
								Jumlah Volume Ekspor Produk Perkebunan Jawa Barat (Kg)	247.500.000	
							29)	Jumlah Kab/Kota yang aktif menjalankan Pelayanan Informasi Pasar (PIP) Produk Perkebunan (Kab/Kota)	16	1.000
							30)	Jumlah promosi pemasaran hasil perkebunan di dalam dan luar negeri (kali)	5	3.000
							31)	Jumlah Pengembangan Agrowisata Perkebunan (lokasi)	3	250
							32)	Jumlah Pelayanan Rekomendasi Perijinan Usaha Perkebunan (Kali)	5	1.100
							33)	Jumlah jalinan Kemitraan Usaha Perkebunan (kel usaha tani)	4	350

BAB VI

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1. Tinjauan Substansi RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 memiliki Visi: "JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA". Visi tersebut dijabarkan kedalam 5 (lima) misi sebagai berikut:

- Misi 1 : Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- Misi 2 : Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan
- Misi 3 : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik
- Misi 4 : Mewujudkan Jawa Barat Yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis Yang Berkelanjutan
- Misi 5 : Meningkatkan Kehidupan Sosial, seni dan budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga, serta Pengembangan Pariwisata Dalam Bingkai Kearifan Lokal

Berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, maka misi RPJMD 2013-2018 yang dianggap sangat terkait, adalah misi-kedua, yaitu **Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan**. Adapun turunan indikator kinerja dari misi kedua tersebut, secara terstruktur dijabarkan kedalam: Tujuan Misi, Sasaran Misi, Strategi, Arah Kebijakan serta Indikator Kinerja Program, yang secara keseluruhan keterkaitannya digambarkan dalam Tabel 6.1. dibawah.

Tabel 6.1
Indikator Sasaran Kinerja RPJMD Tahun 2013-2018
yang menjadi Acuan Indikator Sasaran Renstra Dinas Perkebunan Jawa Barat Tahun 2013-2018

No.	Indikator RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Misi Kedua: Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan Indikator Sasaran 2 Misi Kedua: - Nilai Tukar Petani (NTP) (poin) - Sertifikasi Jaminan Mutu Pelaku Usaha Produk Pertanian (buah)	108,93 89	109-110 130	110-111 205	111-112 305	112-113 415	113-114 540	115-116 690
2	Tujuan Misi 2: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah							
3	Sasaran Misi 2.2.: Meningkatkan Daya Saing Usaha Pertanian							
4	Strategi 2.2.1: Meningkatkan Produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan dan peternakan							
4.a	Arah Kebijakan Strategis 2.2.1.1.: Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, perkebunan dan peternakan							

No.	Indikator RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4.b	- <i>Indikator Kinerja Program 2.2.1.1. : Tingkat produksi dan produktivitas komoditas perkebunan (persen)</i>	>2	>2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
	Arah Kebijakan Strategis 2.2.1.2. (Peningkatan kinerja sumber daya dan kelembagaan pertanian perkebunan dan peternakan)							
	- <i>Indikator Kinerja: Proporsi luas lahan eksisting perkebunan (persen)</i>	13 %	13 %	13 %	13 %	13 %	13 %	13 %
4.c	- <i>Indikator Kinerja: Kemantapan kelembagaan perkebunan (persen)</i>	20%	20%	20%	30%	35%	38%	40%
	Arah Kebijakan Strategis 2.2.1.3. (Peningkatan Kuantitas pengendalian hama dan penyakit tanaman dan ternak)							
4.d	- <i>Indikator Kinerja: Intensitas serangan OPT tanaman perkebunan (persen)</i>	<10	<10	<10	<10	<9	<9	<9
	Arah Kebijakan Strategis 2.2.1.4. (Pengembangan usaha dan sarana prasarana pengolahan serta							

No.	Indikator RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	pemasaran produk pertanian, perkebunan dan peternakan) - <i>Indikator Kinerja: Tingkat Nilai Tambah Produk Perkebunan (persen)</i>	>2	>2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5

Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

6.2. Penjabaran Indikator RPJMD dalam Renstra

Rangkuman Indikator RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 sebagaimana yang disajikan dalam Tabel 6.1 tersebut diatas, selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan indikator Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2013-2018 sebagaimana yang disajikan dalam tabel 6.2 dibawah.

Dalam tabel 6.2 tersebut secara terstruktur dijelaskan, bahwa Visi Dinas Perkebunan yaitu **"Akselerator Terwujudnya Agribisnis Perkebunan Jawa Barat yang Maju, Sejahtera dan Berdaya Saing"**, secara skematis dijabarkan kedalam: 3 Misi, 3 Tujuan, 7 Sasaran, 9 Strategi, 9 Kebijakan, 4 Program Pokok APBD, 3 Program Pokok APBN, dan 7 Program Penunjang APBD. Adapun 7 Sasaran yang dimaksud terdiri dari:

1. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan;
2. Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat;
3. Terjaganya Proporsi Luas Minimum Eksisting Lahan Perkebunan;
4. Meningkatnya Kinerja Usaha Tani Perkebunan;
5. Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan;
6. Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI; serta
7. Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan.

Selengkapnya mengenai struktur penjabaran indikator RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2013-2018 dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, disajikan pada tabel 6.2.

Tabel 6.2.
Skema Indikator Kinerja Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

Visi								
Akselerator Terwujudnya Agribisnis Perkebunan Jawa Barat yang Maju, sejahtera dan Berdaya Saing								
Misi 1				Misi 2			Misi 3	
Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan				Meningkatkan Pemberdayaan Sumberdaya Perkebunan secara Berkelanjutan			Meningkatkan Mutu Hasil dan Nilai Tambah Produk Usaha Perkebunan	
Tujuan 1				Tujuan 2			Tujuan 3	
Meningkatkan Ketersediaan Produk Perkebunan secara optimal dan berkualitas				Meningkatkan Kinerja Sumber Daya Perkebunan secara berkelanjutan			Meningkatkan Daya Saing Produk Perkebunan	
Sasaran 1		Sasaran 2		Sasaran 3	Sasaran 4	Sasaran 5	Sasaran 6	Sasaran 7
Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan		Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat		Terjaganya Proporsi Luas Minimum Eksisting Lahan Perkebunan	Meningkatnya Kinerja Usaha Tani Perkebunan	Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan	Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI	Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan
Indikator 1	Indikator 2	Indikator 3	Indikator 4	Indikator 5	Indikator 6	Indikator 7	Indikator 8	Indikator 9
Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan (2,1-2,5%)	Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan (2,1-2,5%)	Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul komoditas strategis (2,1-2,5%)	Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang Tersertifikasi (2,1-2,5%)	Prosentase Luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat (13%)	Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) (1%)	Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan (-1%)	Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI (2,1-2,5%)	Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan (2,1-2,5%)
Strategi 1	Strategi 2	Strategi 3	Strategi 4	Strategi 5	Strategi 6	Strategi 7	Strategi 8	Strategi 9
Optimalisasi pemanfaatan faktor-faktor produksi dan fokus pengembangan komoditas perkebunan	Optimalisasi pemanfaatan teknologi budidaya adaptif yang ramah lingkungan	Optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan kelembagaan perbenihan tanaman Perkebunan	Optimalisasi Pelayanan Sertifikasi Benih dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	Meningkatkan pengawasan alih fungsi lahan dan alih komoditas serta pengendalian degradasi sumber daya lahan perkebunan secara berkelanjutan	Meningkatkan indeks NTP Perkebunan sebagai refleksi dari peningkatan Kinerja pelaku dan kelembagaan usaha Perkebunan	Menurunkan luas wilayah perkebunan yang terindikasi serangan OPT	Meningkatkan Jumlah Pelaku penerapan sistem jaminan mutu produk perkebunan sesuai SNI	Meningkatkan penguasaan pasar Ekspor dan pembinaan kemitraan usaha Perkebunan
Kebijakan 1	Kebijakan 2	Kebijakan 3	Kebijakan 4	Kebijakan 5	Kebijakan 6	Kebijakan 7	Kebijakan 8	Kebijakan 7
Peningkatan pemanfaatan faktor-faktor produksi melalui intensifikasi,	Pengembangan kaji terap teknologi budidaya dan peningkatan	Peningkatan produktivitas balai benih dan pemberdayaan	Pengembangan sistem pelayanan sertifikasi yang efektif dan	Peningkatan koordinasi penanganan penyusutan lahan	Peningkatan Kompetensi Pekebun, Kelembagaan dan	Peningkatan teknologi dan sistem pengendalian hama terpadu yang efektif,	Peningkatan kemampuan dalam Penerapan Sistem Jaminan Mutu	Peningkatan promosi dan pemasaran serta pembinaan

*Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018*

rehabilitasi dan peremajaan komoditas strategis	dukungan sarana produksi secara berkelanjutan	penangkar benih tanaman perkebunan	Peningkatan Pengawasan Jaringan Peredaran Benih	perkebunan dan Pengembangan teknik konservasi sumber daya lahan serta penanganan gangguan usaha perkebunan secara berkelanjutan	akses Permodalan Usaha Perkebunan	efisien serta ramah lingkungan	produk perkebunan sesuai SNI	kemitraan usaha perkebunan
Program	Program	Program	Program	Program	Program	Program	Program	Program
1. Program Peningkatan Produksi Pertanian (APBD) 2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)	1. Program Peningkatan Produksi Pertanian (APBD) 2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)	1. Program Peningkatan Produksi Pertanian (APBD) 2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)	1. Program Peningkatan Produksi Pertanian (APBD) 2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)	1. Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian (APBD) 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) 3. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)	1. Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian (APBD) 2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)	1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Hama Penyakit Tanaman, Hewan dan Ikan (APBD) 2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)	1. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan (APBD) 2. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian (APBN) 3. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)	1. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan (APBD) 2. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian (APBN) 3. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)
Program Penunjang								
8. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah; 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 12. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 13. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; dan 14. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah.								

BAB VII

P E N U T U P

7.1 Kesimpulan

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan bersifat indikatif. Adapun Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 ini merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, yang memuat visi dan misi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat yang mengacu kepada visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2013-2018 memuat Visi **"Akselerator Terwujudnya Agribisnis Perkebunan Jawa Barat yang Maju, Sejahtera dan Berdaya Saing"**, yang merupakan penjabaran dari Visi Jawa Barat Tahun 2013-2018 yaitu **"Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua"**. Di dalam Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2013-2018 ini juga memuat 3 (tiga) misi yang merupakan penjabaran dari Misi ke-II RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, yaitu **"Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan"**. Adapun ke-tiga misi tersebut adalah: (1) Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan; (2) Meningkatkan Pemberdayaan Sumberdaya Perkebunan secara Berkelanjutan; serta (3) Meningkatkan Mutu Hasil dan Nilai Tambah Produk Usaha Perkebunan.

Secara substansial Visi-Misi Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2013-2018 tersebut dijabarkan kedalam 3 Tujuan, 7 Sasaran, 9 Strategi, 9 Kebijakan, 4 Program Pokok APBD, 7 Program Penunjang APBD, dan 3 Program APBN, serta sejumlah indikasi kegiatan yang disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan pembangunan sub sektor perkebunan selama periode 2013-2018. Adapun target sasaran pembangunan yang akan dicapai selama periode tersebut adalah:

8. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan;
9. Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat;
10. Terjaganya Proporsi Luas eksisting minimum Lahan perkebunan;
11. Meningkatnya Kinerja Usaha Tani Perkebunan;

12. Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan;
13. Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI; serta
14. Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan

Dalam penyusunan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 ini, selain didasarkan kepada hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat periode 2008-2013, juga dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis baru, peluang dan tantangan yang dihadapi, prioritas pembangunan daerah, serta kemampuan kondisi sumber daya yang dimiliki.

Selanjutnya diharapkan agar Renstra Dinas Perkebunan ini dapat difungsikan secara konsisten untuk menjadi acuan dalam proses perencanaan serta pelaksanaan pembangunan bagi segenap pemangku kepentingan pembangunan sub sektor perkebunan di Jawa Barat selama periode 2013-2018.

7.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjamin terlaksananya pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 ini secara optimal, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 ini merupakan dokumen rencana jangka menengah (lima tahunan) untuk pembangunan sub sektor perkebunan di Jawa Barat. Oleh karena itu dokumen ini **harus menjadi acuan** dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat selama periode 2013-2018.
2. Semua pihak pemangku kepentingan pembangunan Sub Sektor Perkebunan Jawa Barat, dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan Sub Sektor Perkebunan di Jawa Barat selama periode 2013-2018, baik kebijakan pembangunan yang bersifat umum maupun bersifat teknis operasional, **harus mengacu** kepada substansi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program/kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini.
3. Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 ini dalam pelaksanaannya diarahkan secara sinergis untuk dapat dibiayai oleh berbagai sumber anggaran, baik dana APBN pada Kementerian Pertanian, dana APBD

Provinsi Jawa Barat, dana pendampingan APBD Kabupaten/Kota, sumber dana dari peran dunia usaha (CSR/PKBL), serta peran masyarakat pelaku usaha perkebunan sendiri.

4. Apabila dalam periode waktu pelaksanaan Renstra ini terdapat hal-hal pokok yang perlu disesuaikan, terutama terkait dengan substansi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, maka selanjutnya substansi Renstra ini dapat diperbaiki sesuai kebutuhan.

7.3 Rekomendasi

Untuk menjamin keberadaan dokumen Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 ini sebagai acuan perencanaan pembangunan lima tahunan secara optimal, maka diperlukan adanya langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan verifikasi optimal tentang kesesuaian substansi yang termuat dalam Renstra ini dengan substansi yang termuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, sebelum Renstra ini ditetapkan.
2. Setelah Renstra ini ditetapkan, maka selanjutnya perlu dilakukan sosialisasi Renstra ini melalui berbagai kesempatan, berikut pengkajian kedalaman substansi yang termuat didalamnya, kepada berbagai pihak yang terkait yang berkepentingan, terutama seluruh aparatur Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, pemangku kebijakan pembangunan sub sektor perkebunan di Kabupaten/Kota, instansi vertikal, serta seluruh stakeholders pembangunan sub sektor perkebunan di Jawa Barat.
3. Semua pihak yang berkepentingan perlu menjaga komitmen dalam mewujudkan visi-misi yang termuat dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat selama periode 2013-2018.
4. Agar substansi Renstra ini diketahui dan difahami berbagai pihak, maka perlu dipublikasikan dalam bentuk cetakan maupun melalui media elektronik, baik berupa dokumen lengkap maupun ringkasannya.